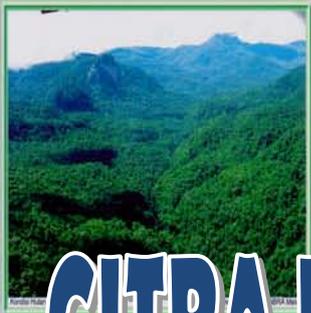


# CITRA KALIMANTAN TENGAH DALAM ARSIP



**Arsip Nasional Republik Indonesia**  
Jakarta, Mei 2008

**LEGENDA**

	Kota Pusat		Tempat Menarik
	Kota Kabupaten / Kota		Wisata Perairan
	Kota Kecamatan		Candi / Monumen
	Kota Desa		Sumber Air Panas
	Desung		Obor
	Desa Perbatasan		Pemukiman Tradisional
	Desa Kalurahan / Desa		Kerak
	Desa Kelurahan		Kelapa
	Desa Lurah		Kelapa Duri
	Desa Uluh Negeri		Kayu
	Lampung Uluh Negeri		Tambang
	Pemukim dan Negeri		Papir
	Pemukim dan Negeri		

**SUMBER:**  
1. Peta Refferensi Skala 1 : 250.000 Tahun 1988 oleh  
Dit. Lantak / ETRM Tahun 2000  
2. Peta Topografi 1:50.000 Skala 1 : 200.000 Tahun 1970  
3. Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, BAPETDA  
4. Peta Persebaran Persebaran Kantoner Tengah, BAKOSURTANAL  
5. Undang-Undang Persebaran Wilayah Provinsi dan Kabupaten  
6. Sisi Persebaran Persebaran dan 1. SEKRETARIAT

**PROVINSI**

**SKALA 1 : 750.000**

Proyeksi: Transverse Mercator

# CITRA KALIMANTAN TENGAH DALAM ARSIP



**Arsip Nasional Republik Indonesia**  
**Jakarta, Mei 2008**



Lambang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



AGUSTIN TERAS NARANG, SH.  
Gubernur Kalimantan Tengah  
Periode 2005-2010



**R. ATU NARANG, SE.**  
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah  
Periode 2004-2009



IR. H. ACHMAD DIRAN  
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah  
Periode 2005-2010



IR. THAMPUNAH SINSENG, DIPL. HE.  
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
2005 - sekarang

## MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH



Brigadir Jenderal Polisi  
DRS. DINAR, MBA.  
Kepala Kepolisian Daerah  
Kalimantan Tengah



Kolonel Infanteri  
JUDI HARIANTO  
Komandan Resort Militer 102  
Panju Panjung, Kalimantan Tengah



DANIEL TOMBE MARRUNG, SH., MH.  
Kepala Kejaksaan Tinggi  
Kalimantan Tengah



PANTO ALBUIN SIANIPAR, SH.  
Ketua Pengadilan Tinggi  
Kalimantan Tengah

GUBERNUR DAN PEJABAT GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
1 JANUARI 1957 – 2008



Raden Tumenggung  
Arya Milono  
cvGubernur  
01-01-1957  
s/d 30-06-1958



Tjilik Riwut  
Gubernur  
30-06-1958  
s/d 17-02-1967



Ir. Reynold Sylvanus  
Gubernur  
07-02-1967  
s/d 03-10-1978



Willy Ananias Gara  
Gubernur  
03-10-1978  
s/d 07-10-1983



Eddy Sabara  
Pejabat Gubernur  
07-10-1983  
s/d 23-01-1984



Gatot Safari Amrih, SH  
Gubernur  
23-10-1984  
s/d 21-01-1989



Drs. Soeparmanto  
Gubernur  
23-01-1989  
s/d 22-01-1993



Drs. Warsito  
Rasman, MA.  
Gubernur  
22-01-1993  
s/d 19-07-1999



Rappiudin  
Hamarung, SH  
Pejabat Gubernur  
17-07-1999  
s/d 08-03-2000



Drs. Asmawi Agani  
Gubernur  
08-03-2000  
s/d 23-03-2005



DR. Sodjuangan  
Situmorang, MSi.  
Pejabat Gubernur  
23-03-2005  
s/d 04-08-2005



Agustin Teras Narang  
Gubernur  
04-08-2005  
s/d 2010

KETUA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
1958 – 2008



Oesman Abdullah  
1958-1960



Tjilik Riwut  
1961-1965



H.M. Kasjful Anwar  
1965-1968



Amir Hamzah, SH.  
1969-1971



Willy Ananias Gara  
1971-1979



E.A. Toewak  
1979-1982



H.Darlam A.M. Atjeh  
1982-1987



H. Soeshandoko  
1987-1997



Drs.H.Duwiter  
Mangkusari  
1997-1999



H. Endang Kosasih  
PAW (1999)



H.S.A. Fawzy Zain B.  
1999-2004



R. Atu Narang, SE.  
2004-2009

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
1961 – 2008



Ir. Reynold Sylvanus  
1961 - 1967



Victor Phaing  
1986 - 1991



H.J. Andries  
1991 – 1996



Ir. E. Gerson  
1996 – 1998



Drs. Siswanto Adi  
1998 – 1999



Nahson Taway  
2000-2005



Ir. H. Achmad Diran  
2005-sekarang

**WALIKOTA/BUPATI  
DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 2008**



**Ir. Tuah Pahoe**  
Walikota Palangka Raya



**Ir. Willy M. Yoseph**  
Bupati Murung Raya



**Drs. H. Zain Alkim**  
Bupati Barito Timur



**Ir. Yuliansyah**  
Bupati Barito Utara



**Ir. Bahruddin H. Lisa**  
Bupati Barito Selatan



**H. Achmad Amur, SH**  
Bupati Pulang Pisau



**Drs. Duwel Rawing**  
Bupati Katingan



**H. Darwan Ali**  
Bupati Seruyan



**Drs. H. Nawawi Mahmuda**  
Bupati Sukamara



**Drs. HM. Gusti M. Afhani**  
Bupati Lamandau



**Ir. H. Muhammad Mawardi, MM**  
Bupati Kapuas



**Drs. J. Djudae Anom**  
Bupati Gunung Mas



**Ujang Iskandar, ST**  
Bupati Kotawaringin Barat



**Drs. M. Wahyudi K. Anwar**  
Bupati Kotawaringin Timur

## LAMBANG PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Kota  
Palangka Raya



Kabupaten  
Murung Raya



Kabupaten  
Barito Timur



Kabupaten  
Barito Utara



Kabupaten  
Barito Selatan



Kabupaten  
Pulang Pisau



Kabupaten  
Katingan



Kabupaten  
Seruyan



Kabupaten  
Sukamara



Kabupaten  
Lamandau



Kabupaten  
Kapuas



Kabupaten  
Gunung Mas



Kabupaten  
Kotawaringin  
Barat



Kabupaten  
Kotawaringin  
Timur



# Sambutan Kepala Arsip Nasional RI



## SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia, bukan saja daerah ini memiliki potensi Sumber Daya Alam yang bernilai ekonomis melainkan karena kekayaan budayanya menjadi objek wisata unggulan Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga menjadi salah satu provinsi yang bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwarnai oleh berbagai dinamika baik sosial, ekonomi maupun politik. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Melalui khasanah arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), maka disusunlah suatu program, yang disebut dengan Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa dan sekaligus untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Melalui khasanah arsip tersebut dapat diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai

peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Materi Citra Daerah berasal dari arsip baik dalam bentuk teks, peta, dan foto sebagai satu kesatuan informasi yang menggambarkan sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Sebuah dinamika perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menjadi bukti akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan nasional yang merupakan gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara dan sekaligus merupakan bahan bukti pertanggungjawaban nasional bagi generasi mendatang.

Mencermati tumbuhnya semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman akan makna pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif bagi kelangsungan kehidupan tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya daerah yang pada gilirannya menjadi proses dinamika nasional.

Adanya keterbatasan penyajian materi sekiranya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi penyempurnaan penyusunan Citra Daerah selanjutnya. Akhirnya dengan kehadiran Citra Daerah ini, diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, 23 Mei 2008  
Kepala,

Djoko Utomo

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lambang Provinsi Kalimantan Tengah	iii
Foto Gubernur Kalimantan Tengah	iv
Foto Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah 2004-2009	v
Foto Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	vi
Foto Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	vii
Foto Muspida Provinsi Kalimantan Tengah	viii
Foto Gubernur dan Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah Periode 1957-2008	ix
Foto Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah 1958-2008	x
Foto Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 1961-2008	xi
Foto Walikota/Bupati di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah	xii
Lambang-lambang Pemerintah Kota/Kabupaten	xiii
Peta Provinsi Kalimantan Tengah	xiv
Sambutan Kepala ANRI	xv
Daftar Isi	xviii
<b>PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	2
B. Letak Geografis	4
C. Arti Lambang Provinsi Kalimantan Tengah	6
D. Perkembangan Sejarah Kalimantan Tengah	7
1. Periode Kerajaan	9
2. Periode Kolonial Bangsa Eropa	11
3. Periode 1942 - 1945	14
4. Periode 1945 - 2008	16
E. Kalimantan Tengah dalam Khasanah Arsip	27
Daftar Pustaka	29
<b>CITRA KALIMANTAN TENGAH DALAM ARSIP</b>	30
Geografis	31
Politik dan Pemerintahan	42
Pertahanan dan Keamanan	79
Perekonomian	87
Pendidikan	100
Kesenian dan Kebudayaan	113
Infrastruktur	139
Keagamaan	158
<b>DAFTAR ARSIP</b>	169
<b>PENUTUP</b>	191

# Pendahuluan

# CITRA KALIMANTAN TENGAH DALAM ARSIP

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Mewacanakan "daerah" sebagai kondisi dasar diharapkan akan membangun pemahaman kita tentang bangsa (*nation*), dan rasa kebangsaan (*nasionalisme*). Di masa lalu eksistensi daerah terbentuk karena ikatan kultural yang melekat pada wilayah dan masyarakatnya. Dalam perkembangannya eksistensi dan dinamika daerah diwujudkan pada kemandirian dan prakarsa daerah yang bersangkutan untuk memajukan masyarakat dan wilayahnya. Dalam konteks tersebut keberhasilan yang dicapai suatu daerah akan menjadi sumbangan bagi keberhasilan dalam membangun sebuah bangsa.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan. Pelaksanaan Otonomi Daerah pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan prima kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing secara optimal.

Salah satu aspek yang cukup mendasar dengan penerapan otonomi daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah beralihnya kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu diberikan informasi mengenai peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar Pemerintah Daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis secara mandiri dan bertanggung jawab pada masa mendatang. Pemaknaan mengenai pentingnya masa lampau

yang terekam dalam arsip harus dimaknai oleh kearifan lokal dan nasional dalam upaya mempertahankan nilai-nilai martabat bangsa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan *nations and character building* sesuai cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah melalui Program Citra Daerah. Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Data dan fakta yang terkandung dalam arsip sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan.

Program Citra Daerah yang dikembangkan Arsip Nasional RI sejak tahun 2003 dilaksanakan dalam bentuk penyerahan hasil alihmedia (berupa *hard copy* dan *soft copy*) dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh Provinsi di Indonesia. Salah satu Provinsi yang menerima Citra Daerah pada tahun 2008 ini adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Arsip mengenai Kalimantan Tengah yang diserahkan mencakup kurun waktu mulai awal abad ke-18 sampai dengan

abad ke-20, yaitu sejak masa *Vereeniging Oost Indische Compagnie (VOC)* sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan berisikan informasi tentang berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Kalimantan Tengah pada periode tersebut. *Citra Kalimantan Tengah Dalam Arsip* ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi masyarakat Kalimantan Tengah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

## B. LETAK GEOGRAFI

Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah *Greenland* dan Papua. Luas pulau tersebut 736.000 km<sup>2</sup> yang secara politik saat ini dimiliki oleh 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Luas Kalimantan yang termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 539.500 km<sup>2</sup>, sedangkan sisanya seluas 196.500 km<sup>2</sup> terletak di bagian utara Pulau Kalimantan merupakan wilayah negara Malaysia (Serawak) dan Brunei Darussalam.

Letak geografis Kalimantan Tengah berada di sekitar garis khatulistiwa pada 0°45' LU -3°40' LS dan 111°– 116° BT. Wilayah Kalimantan Tengah bagian utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, di selatan dengan Laut Jawa, di sebelah barat dengan Kalimantan Barat dan sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Karakteristik iklim di Kalimantan Tengah adalah iklim tropis lembab dan panas. Klasifikasi Koppen: Afa. Suhu udara rata-rata 29°C, maksimum 33°C. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 2.732 mm dengan rata-rata hari hujan 120 hari, makin ke Utara curah hujan semakin tinggi.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan melimpah. Provinsi ini juga memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam, antara lain budaya Dayak yang menjadi salah satu ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah.

Hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah dialiri oleh sungai besar dan kecil yang mengalir dari Utara ke Selatan dengan bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai tersebut dapat dikembangkan untuk berbagai keperluan. Beberapa sungai besar di Kalimantan Tengah antara lain:

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. Sungai Arut_____      | 250 Km  |
| 2. Sungai Barito_____    | 1900 Km |
| 3. Sungai Jelai_____     | 200 Km  |
| 4. Sungai Kahayan_____   | 600 Km  |
| 5. Sungai Kapuas_____    | 600 Km  |
| 6. Sungai Katingan_____  | 650 Km  |
| 7. Sungai Kumai_____     | 175 Km  |
| 8. Sungai Lamandau_____  | 300 Km  |
| 9. Sungai Mentaya_____   | 400 Km  |
| 10. Sungai Sebangau_____ | 200 Km  |
| 11. Sungai Seruyan_____  | 350 Km  |

Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai daratan seluas 157.983 km<sup>2</sup>. Kalimantan Tengah saat ini merupakan Provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Timur. Pada tabel berikut dapat dilihat perbandingan luas Provinsi Kalimantan Tengah dengan wilayah negara lain.

Nama Negara/ Wilayah	Luas Tahun 2007 (km <sup>2</sup> )
<b>Indonesia</b>	1.904.556
<b>Pulau Kalimantan</b>	743.330
<b>Kalimantan Indonesia</b>	535.834
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>153.564</b>
<b>Belanda</b>	41.532
<b>Swiss</b>	41.290
<b>Singapura</b>	704

Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah Palangka Raya. Kota Palangka Raya adalah kota yang lahir dari suatu *grand desain* asli Republik Indonesia. Kota ini di bangun oleh prakarsa Presiden RI Soekarno bersama dengan tokoh-tokoh putera daerah yang diwakili oleh Bapak Tjilik Riwut. Kota yang di

bangun oleh beragam tangan kebersamaan anak suku bangsa. Inilah satu-satunya kota pertama yang direncanakan dan di bangun dari tiada. Kota yang dapat dikatakan lahir dari buah tangan di masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1957.

Kota Palangka Raya dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah pembangunan kota bagi Indonesia, karena kota ini dilahirkan melalui buah tangan kemerdekaan dari tiada menjadi nyata. Di kota inilah secara teratur setiap tahunnya diadakan secara sederhana Festival Seni Budaya Dayak "**Isen Mulang**". Agenda seni budaya yang merepresentasikan sebagian kecil khasanah seni budaya tradisional suku Dayak dan akulturasi budaya masyarakatnya dengan masyarakat pendatang yang lainnya.

### C. ARTI LAMBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Lambang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berbentuk segi lima berwarna merah dan di tengah lambang berwarna hijau, dengan moto **ISEN MULANG** yang berarti "Pantang Mundur".

- **Segi lima**, berbentuk perisai melambangkan falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila.
- Warna **Merah**, adalah lambang keberanian, keperkasaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang memecah belah persatuan dan kesatuan.
- **Hijau**, adalah lambang kesuburan bumi *Tanbun Bungai* dengan berbagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- **Talawang (Perisai)**, adalah lambang alat penangkis serangan musuh yang melambangkan kewaspadaan dan

ketahanan masyarakat terhadap anasir-anasir yang merusak baik dari luar maupun dari dalam.

- **Belanga (Guci)**, adalah lambang barang pusaka yang bernilai tinggi, yang melambangkan potensi kekayaan alam Kalimantan Tengah.
- **Tali Tengang (Tali yang terbuat dari kulit kayu)**, adalah lambang kekokohan dan kekompakan yang tidak mudah di cerai beraikan.
- **Kapas dan Parei (Kapas dan Padi)**, adalah lambang bahan sandang pangan yang melambangkan kemakmuran bangsa Indonesia pada umumnya dan rakyat Kalimantan Tengah pada khususnya.
- **Bintang Lapak Lime ( Bintang Segi Lima)**, adalah lambang Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
- **Kambang Kapas (Bunga Kapas) 17 buah, Dawen (daun) 8 lembar dan Bua Parei (Buah Padi) 45 butir** adalah lambang Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.
- **Burung Tingang (Burung Enggang)**, adalah lambang pertanda kemakmuran dan kedinamisan serta tekad rakyat Kalimantan Tengah untuk ikut serta secara aktif pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.
- **Mandau dan sipet (Parang dan Sumpit)** adalah pasangan senjata yang di buat oleh nenek moyang Suku Dayak Kalimantan Tengah yang digunakan untuk bekerja, berburu dan menghadapi serangan musuh.
- **Garantung (gong)** adalah lambang bahwa masyarakat Kalimantan Tengah menjunjung tinggi kesenian, kebudayaan, berpandangan optimis dalam menghadapi berbagai tugas dalam suasana gotong royong sebagai lambang persatuan dan kesatuan.

#### D. GAMBARAN SEJARAH

Berdasarkan hasil penelitian arkeologi, Pulau Kalimantan telah dihuni manusia sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Manusia pertama yang masuk wilayah Kalimantan bagian Timur

ialah dari ras *Negroid Weddid*, saat ini ras tersebut telah punah. Mereka datang dari daratan Asia pada zaman glasial (es).

Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, menyusul masuk ke wilayah Kalimantan bagian Timur kelompok yang lebih besar, yang disebut *Proto-Melayu* atau *Melayu Tua*. Mereka berasal dari Yunan Selatan (China Daratan), daerah selatan Gurun Gobi, dan datang secara bergelombang menuju Semenanjung Asia Selatan, kemudian menyeberang ke Kalimantan Barat. Sebagian dari arus gelombang migran itu ada yang meneruskan perjalanannya ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Bahkan di antaranya ada yang menyeberang ke Sulawesi Tengah dan Utara.

Gelombang migran pertama itu memasuki Kalimantan melalui dua jalan. Pertama, mereka datang ke Kalimantan Utara, lalu melanjutkan perjalanannya ke pedalaman Kalimantan hingga ke Kalimantan Timur. Penduduk ini tergolong dalam ***Suku Dayak Kenyah***, yang memiliki daerah pemukiman di Kalimantan Timur, yaitu di daerah *Apau Da'a*, Kecamatan *Kayan Ulu*. Mereka menyebar ke daerah-daerah lainnya di Kalimantan, sehingga menciptakan sekitar 40 anak suku yang sedatuk dengan suku Kenyah. Kedua, migran langsung memasuki Kalimantan Timur dengan menyusuri sungai-sungai, seperti Sungai Mahakam, Sungai Segah, dan Sungai Kayan. Selanjutnya mereka bermukim di daerah Apo Kayan, Kecamatan Kayan Ulu. Penduduk ini tergolong dalam ***Suku Dayak Kayan*** yang datang ke Kalimantan Timur lebih dahulu dari pada Suku Kenyah. Perjalanan mereka dari daerah asal di Yunan Selatan, Cina, sampai di Kalimantan Timur berlangsung selama dua abad dengan menggunakan perahu bercadik. Karena rentang waktu yang begitu panjang, mereka yang sampai di Kalimantan Timur adalah keturunannya.

Sekitar tahun 500 SM datang gelombang migran kedua. Mereka berasal dari Semenanjung Kra dan termasuk kelompok *Deutro-Melayu*, atau *Melayu Muda*. Dari Semenanjung Kra mereka berangkat ke timur menyeberangi pantai bagian selatan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Gelombang migran kedua ini sudah bercampur baur dengan ras Melayu, dan kemudian dalam perjalannya yang memakan waktu dua abad mereka bercampur pula dengan ras

*Wedoide* — terutama yang melalui jalur Sumatera— dan ras *Mongoloide*.

Sebagian besar penduduk, baik dari gelombang pertama maupun kedua, mendiami tempat-tempat di sekitar kawasan pantai Kalimantan Timur. Sedangkan sebagian migran yang berasal dari gelombang pertama mendiami daerah-daerah pedalaman Kalimantan dan membentuk komunitas suku bangsa antara lain suku bangsa **Dayak Ngaju** yang merupakan suku Dayak dominan yang ada di Kalimantan Tengah. Suku Dayak Ngaju pada umumnya tinggal di sepanjang aliran sungai Kahayan dan sungai Kapuas di pedalaman Kalimantan.

Perkampungan yang pada umumnya berada di sepanjang aliran sungai berkembang menjadi suatu kehidupan masyarakat yang unik yang merupakan asimilasi antara kehidupan tradisional dan modern, antara yang belum maju dan yang maju, antara yang terbuka dan yang terisolasi. Mereka yang menghuni kawasan tepi sungai berkembang lebih cepat dari kelompok lainnya. Kemajuan yang mereka capai merupakan salah satu bukti bahwa percampuran budaya di antara berbagai ras di sana membawa pengaruh positif bagi perkembangan suatu masyarakat.

Kepercayaan asli masyarakat suku Dayak adalah **Kaharingan** yang lebih menekankan pada harmonisasi antara manusia dengan alam. Agama Kristen mulai menyentuh masyarakat suku Dayak Kalimantan pada akhir abad ke-19, ketika kaum misionaris/zending dari Eropa terutama dari Jerman dan Belanda yang mengemban tugas di bidang pendidikan dan kesehatan datang ke pedalaman Kalimantan. Namun kondisi alam dan tradisi yang kuat masyarakatnya merupakan medan yang sulit untuk mengembangkan misi zending. Sedangkan Agama Islam berkembang melalui para pedagang dan mubaliq Islam yang datang di Kalimantan melalui pantai/muara sungai. Oleh karena itu masyarakat yang berada di sekitar tepi pantai dan muara-muara sungai lebih dahulu memeluk agama Islam.

## 1. PERIODE KERAJAAN

Pada akhir tahun 500 M, perdagangan antara Nusantara dan Cina mulai meningkat. Menurut catatan-catatan Cina dari

dinasti Liang menyebutkan tentang sebuah kerajaan yang dinamai *P'oli* atau *Poni*, mungkin Brunei, yang pada tahun 700 mengirim upeti kepada kaisar *Tang* di Cina. Pada saat itu, kota-kota perdagangan muncul di delta Sungai Serawak dan Brunei. Wilayah Kalimantan ketika itu dikenal dengan nama **Tanjung Pulo** atau **Tanjung Pura**.

Pada tahun 1292, patih Kerajaan Majapahit, Gajah Mada berhasil menguasai Tanjung Pura dan pada tahun 1362 Kotawaringin juga berhasil dikuasai hingga Brunei. Maka mulai pada abad ke-14 itulah, di Kalimantan mulai berdiri kerajaan-kerajaan Hindu, seperti di Berau Kalimantan Timur, Sukasada di Kalimantan Barat, dan Banjarmasin di Kalimantan Selatan.

Pada akhir abad ke-14 Raja Kutai menjadi pemeluk Islam pertama di Kalimantan. Kemudian diikuti Sabah pada tahun 1405, Brunei pada tahun 1410, dan Malaka pada tahun 1440. Sementara itu, hubungan perdagangan berlangsung terus, dan pengaruh-pengaruh Jawa Hindu tampak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Kotawaringin, Kalimantan Tengah; dan Sambas Kalimantan Barat.

Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Alfonso de Albuquerque dari Portugis, pada tahun 1511 M, perdagangan di Brunei dan pelabuhan-pelabuhan di Nusantara, berkembang pesat. Pengaruh Islam meningkat di Brunei yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam hingga seluruh penduduk pantai Kalimantan akhirnya memeluk Islam. Pada awal abad ke-16, Islam menyebar hingga sebagian besar pulau Kalimantan.

Kehidupan pemerintahan di wilayah Kalimantan Tengah diawali dengan adanya pemerintahan yang berbentuk Kerajaan, yakni Kerajaan Dayak, namun kapan dan dimana kerajaan tersebut berdiri serta bagaimana keberadaannya, tidak diperoleh penjelasan lebih lanjut. Satu-satunya kerajaan di Kalimantan Tengah yang masih banyak meninggalkan informasi adalah Kerajaan Kotawaringin. Kerajaan ini berdiri resmi pada tahun 1679 pada saat Pangeran Adipati Antakusuma naik Tahta sebagai Raja Kotawaringin yang pertama. Kerajaan ini berubah menjadi kesultanan seiring dengan telah dianutnya agama Islam menjadi agama resmi kerajaan.

Pengaruh agama Islam sangat besar dalam kehidupan kesultanan, huruf arab dengan bahasa melayu digunakan

sebagai alat resmi kesultanan terutama dalam hubungan perdagangan dan kerjasama. Namun, sayang perkembangan sejarah mengenai Kerajaan/Kesultanan Kotawaringin ini sangat minim, sehingga sulit menguraikan secara rinci sejarah kerajaan ini dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Menjelang kedatangan bangsa Eropa di Kalimantan Tengah, Kesultanan Kotawaringin merupakan bagian dari Kesultanan Banjarmasin di Kalimantan Selatan.

## 2. PERIODE KOLONIAL BANGSA EROPA

Menurut catatan sejarah, orang Eropa pertama yang datang di wilayah Kalimantan adalah orang Italia kemudian orang Portugis dan Belanda. Bangsa Belanda pertama kali datang ke Kalimantan pada tahun 1598. Namun, baru pada awal abad ke-17, Belanda dan Inggris mulai berusaha menguasai wilayah Kalimantan. Pada tahun 1747, Belanda berhasil mendapatkan Banjarmasin. Sedangkan, *The British East India Company* memperoleh suatu wilayah di Sabah dari Sultan Brunei pada 1784.

Pada abad ke-19, Belanda tetap meneruskan perdagangan dengan kesultanan-kesultanan di sekitarnya. Namun, setelah **James Brooks** dari Inggris memperoleh wilayah di Sarawak dari Brunei pada 1842, Belanda kemudian memaksakan kontrak-kontrak dagang dengan kesultanan-kesultanan tersebut. Bahkan, ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris dan Belanda berhasil masuk ke pedalaman. Di sana mereka melakukan pemetaan, mengadakan kontak dengan berbagai suku Dayak, dan menyebarkan agama Kristen. Saat itu, Kalimantan terbagi ke dalam beberapa kesultanan kecil yang memiliki hubungan satu sama lain. Suku-suku tersebut menguasai perdagangan sungai, mereka mengenakan pajak terhadap barang-barang dan menerima persembahan berupa padi, hasil-hasil hutan, dan bahkan budak-budak dari suku-suku pedalaman yang tergantung pada mereka.

Sebagaimana halnya yang terjadi di bagian wilayah Indonesia lainnya, masuknya Belanda ke wilayah Kalimantan Tengah semula bertujuan untuk melakukan perdagangan yang kemudian diikuti dengan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan

setempat untuk melindungi usaha-usaha penaklukan terhadap wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan tersebut. Politik *divide at impera* dilakukan oleh Belanda untuk memecah belah suku-suku di pedalaman yang akhirnya suku-suku tersebut sulit berkembang. Ada suku-suku yang menyerah dan membayar upeti, sedangkan suku-suku lainnya cukup kuat atau hidup jauh di pedalaman dengan segala kemerdekaannya.

Ketika Kerajaan/Kesultanan Banjar di Banjarmasin akhirnya ditaklukan oleh tentara Belanda, Kesultanan Kotawaringin pun akhirnya berada pada kekuasaan Belanda. Sistem Pemerintahan Belanda mulai diberlakukan di Kalimantan ketika Kominsaris Gubernemen Kalimantan Selatan dan Timur **F.N. Niewen Huizen** secara resmi mengumumkan penghapusan Kerajaan Banjar di Banjarmasin pada tanggal 11 Juni 1860. Pada saat itu dinyatakan antara lain bahwa Kerajaan Banjar dihapuskan dan tidak lagi diperintah oleh raja (Sultan). Seluruh pemerintah bekas Kerajaan Banjar langsung dibawah pemerintah Belanda. Pada masa ini pemerintahan Kolonial Belanda di Kalimantan dibagi atas dua karesidenan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Residen. Kedua Karesidenan itu adalah Kalimantan bagian barat (*Westerafdeeling van Borneo*) dan Kalimantan bagian Selatan dan Timur (*Zuider en Oosterafdeeling van Borneo*). Kalimantan Tengah pada saat itu termasuk dalam wilayah Kalimantan bagian Selatan dan Timur dengan ibukotanya Banjarmasin. Dengan demikian pusat kekuasaan politik dan pemerintah Belanda di Kalimantan Tengah dikendalikan oleh administrasi pemerintah Belanda yang berpusat di Banjarmasin.

Wilayah *Zuider en Oosterafdeeling van Borneo* terdiri atas 5 (lima) afdelingen yaitu:

1. *Afdeeling* Banjarmasin;
2. *Afdeeling* Sungai Hulu;
3. *Afdeeling* Kapuas Barito (*Afdeling* Kapuas Barito kemudian menjadi bagian dari Kalimantan Tengah);
4. *Afdeeling* Samarinda;
5. *Afdeeling* Bulungan Berau.

Pembagian wilayah yang lebih kecil tersebut berpedoman pada pola aliran sungai yang mengalir di Kalimantan Tengah.

*Afdeeling* Kapuas Barito atau *afdeeling* Dayak Besar terdiri dari 6 *onderafdelingen* yang masing-masing dikepalai oleh seorang kontrolir (*controleur*). Untuk Kasultanan Kotawaringin masih diperkenankan meneruskan tradisinya sebagai wakil pemerintah Belanda dengan ditempatkan seorang *controleur* oleh pemerintah Belanda. Oleh karena kekuasaan Belanda yang sangat luas maka Belanda mengalami kekurangan tenaga dalam mengelola pemerintahan meskipun telah dilakukan pembagian wilayah. Belanda kemudian membatasi kekuasaan langsungnya pada tingkat *onderafdeling* saja sedang untuk pemerintahan pada tingkat distrik dan *onderdistrik* dikuasakan pada petinggi suku Dayak dan beberapa Tumenggung dan Demang. Mereka diangkat untuk menduduki jabatan kepala *distrik* dan kepala *onderdistrik*.

Dalam rangka terus memperkuat dominasinya di Kalimantan, Belanda harus mematahkan perlawanan kesultanan-kesultanan dan suku-suku pedalaman Kalimantan. Oleh sebab itu, Belanda kemudian terlibat dalam beberapa pertempuran, antara lain **Perang Banjar** 1859 – 1863, dan **Perang Wangkang** 1870 – 1890 yang dilakukan Belanda untuk meredakan pemberontakan suku-suku pedalaman, suku-suku **Tebidah** dan **Ot Danum** (hulu sungai). Namun, karena tidak seimbangya perlengkapan senjata, akhirnya semua perlawanan dan pemberontakan itu dapat dipadamkan oleh Belanda.

Usaha Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya, terus dilakukan dengan berupaya memecah belah suku-suku di pedalaman. Keadaan ini segera disadari oleh suku-suku bangsa di Pedalaman Kalimantan. Pada tahun 1894 bertempat di hulu Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah diselenggarakan Rapat Damai **Tumbang Anoy**, yang menghimpun 30 pimpinan suku Dayak, untuk mengakhiri pertentangan bersenjata antarsuku. Sementara itu, di Sarawak konflik antarsuku masih berlangsung hingga 1896. Kedamaian antarsuku itu memang terbukti ketika **Niewen Huizen** dapat dengan selamat melintasi Pegunungan **Muller** yang dikenal oleh penduduk Kalimantan Tengah dengan nama **Bukit Raya** pada 1896.

Dalam perkembangan sistem pemerintahan berikutnya, berdasarkan *Staadblad* 1898 nomor 178, Borneo bagian selatan dibagi ke dalam sembilan (9) wilayah administratif yakni:

1. *Afdeeling* Banjarmasin,
2. *Afdeeling* Martapura,
3. *Afdeeling* Kutai,
4. *Afdeeling* Amuntai,
5. *Afdeeling* Tanah Dusun (Teweh),
6. *Afdeeling* Tanah Dayak,
7. *Afdeeling* Kapuas/Sampit,
8. *Afdeeling* Pasir dan
9. *Afdeeling* Tanah Bambu.

Dari 9 afdeling tersebut tiga (3) afdeling menjadi bagian dari Kalimantan Tengah saat ini, yaitu *afdeling* Tanah Dusun (Teweh), Tanah Dayak dan Kapuas/Sampit.

Sementara itu untuk meningkatkan komitmen masyarakat Dayak memperjuangkan kemerdekaan dari Belanda, pada tanggal 20 Agustus 1938 berdiri organisasi **Pakat Dayak** yang bertujuan untuk meneruskan kegiatan-kegiatan yang dirintis oleh organisasi Sarekat Dayak sebelumnya. Pakat Dayak dipimpin oleh **M. Mahar**. Selain organisasi Pakat Dayak berdiri pula organisasi **Komite Kesadaran Suku Dayak** yang bertujuan untuk menuntut hak kedudukan Suku Dayak dalam sidang Dewan Rakyat dalam pemerintahan Hindia Belanda.

### 3. PERIODE 1942 -1945

Pada masa perang Asia Pasifik terjadi, wilayah-wilayah pendudukan bangsa Eropa di Asia bagian Timur dan Tenggara diserbu bala tentara Jepang, termasuk wilayah pendudukan Belanda di Indonesia. Bangsa Jepang pertama kali memasuki wilayah Kalimantan pada tanggal 10 Januari 1942, melalui Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian Jepang melanjutkan serangannya dan berhasil menghancurkan Lapangan udara Belanda di Tarakan dan Samarinda. Pada tanggal 13 Januari, Komandan KNIL di Tarakan menyerahkan diri kepada bala tentara Jepang.

Jepang segera mengubah susunan pemerintahan yang ada di wilayah Kalimantan Timur-Selatan. Di bawah pemerintahan militer Jepang, *onder afdeling* Samarinda dan *onder afdeling Bulungan en Berau* yang merupakan Wilayah Timur dari Residensi Kalimantan Bagian Selatan dan Timur (*Oosterafdeling*

*van Residentie Zuid en Oost Borneo*) bentukan Belanda sebelumnya dihapuskan.

Pada masa Pendudukan Jepang Wilayah Kalimantan dibagi menjadi 3 (tiga) karesidenan yaitu

1. Kalimantan Timur
2. Kalimantan Barat
3. Kalimantan Selatan.

Dalam struktur pemerintahan, Kalimantan Tengah termasuk dalam wilayah Kapuas Barito dan satu daerah Swapraja yakni Kasultanan Kotawaringin.

Berdasarkan *Osamu Seirei* No. 27 tahun 1942 ditetapkan bahwa *Shu* (*karesidenan*), sebagai pemerintahan tertinggi. Di bawah *shu* terdapat *ken* (kabupaten) dan *si* (kotapraja), sementara di bawah *ken* adalah *gun* (kawedanaan) dan di bawah *gun* ada *son* (kecamatan), yang paling bawah adalah *ku* (desa). Pada tahun 1944 Jepang memperkenalkan *tonarigumi* (rukun tetangga) yang beranggotakan 10 hingga 20 kepala keluarga dengan seorang pemimpin. Pada masa pemerintahan Jepang ini, kegiatan pemerintahan Kalimantan Tengah berada di bawah kekuasaan Pemerintah militer Angkatan Laut (*Kaigun*) Armada Selatan Kedua bersama dengan wilayah Kalimantan lainnya, Sulawesi, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar.

Pada awalnya kedatangan Jepang disambut hangat oleh rakyat Indonesia, karena diharapkan dapat membawa perbaikan sebagaimana propaganda yang dilancarkan oleh Jepang sebelumnya. Bahkan di beberapa kota di Kalimantan Tengah pada bulan-bulan pertama kedatangannya, Jepang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengadakan rapat umum di lapangan terbuka dengan mengibarkan bendera Merah Putih.

Tetapi harapan itu ternyata segera pupus, karena sikap Jepang yang keras dan kejam. Organisasi pergerakan rakyat ditekan, dilarang mengadakan kegiatan, dan bahkan dibubarkan. Kegiatan masyarakat hanya diijinkan berlangsung melalui badan atau organisasi yang didirikan Jepang, seperti *Seinendan* untuk para pemuda dan *Fujinkai* untuk kaum wanita. Banyak rakyat yang dihukum tanpa melalui proses pengadilan. Demikian pula harta benda rakyat diambil secara paksa untuk kepentingan perang. Hal ini menyebabkan kehidupan rakyat yang sudah menderita menjadi semakin berat. Dibentuknya *Giyugun*

maupun *Pembela Tanah Air (Peta)* semata-mata hanyalah untuk membantu Jepang dalam perang untuk menguasai Asia Timur Raya. Oleh karena itu, pada bulan-bulan terakhir pendudukan Jepang, di beberapa tempat terjadi perlawanan, seperti di Hulu Sungai Mahakam, di pedalaman Muara Amuntai, di Kampung Biduk Talisayan, dan di kampung Talassau, Gunung Tabur. Keadaan ini berlangsung sampai Jepang menyerah tak bersyarat kepada Sekutu pada bulan Agustus 1945.

#### 4. PERIODE 1945-2008

Ketika Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia melepaskan diri dari penjajahan, Kalimantan Tengah memasuki babak baru dalam kehidupan pemerintah. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Kalimantan Tengah merupakan salah satu bagian karesidenan di bawah pemerintah Propinsi Kalimantan yang beribukota di Banjarmasin.

Namun, sebelum pemerintah melakukan penataan dalam struktur maupun organisasi pemerintahan, khususnya Kalimantan, usaha Belanda untuk menguasai Indonesia kembali terjadi. Kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia, ternyata diikuti oleh tentara *Netherlands Indies Civil Administration (NICA)*, mereka berusaha mendirikan pemerintahannya kembali. Setelah dianggap kondusif, tentara Sekutu meninggalkan Kalimantan Timur pada pertengahan Desember 1945. Sejak itu Kalimantan Timur berada di bawah pemerintahan NICA. Untuk mengukuhkan kekuasaannya, pada bulan Januari 1946, NICA mendirikan *Oost Borneo Residentie* dengan ibukotanya Samarinda. Selain itu pemerintah kolonial Belanda mengusahakan pembentukan negara-negara yang bersifat kedaerahan yang nantinya akan menjadi negara bagian dari Negara Indonesia Serikat.

Selama perang pasca Kemerdekaan RI, Kalimantan Tengah merupakan salah satu kantong perjuangan dan gerilya di Pulau Kalimantan. Pada awal kemerdekaan, Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor bermarkas di Jogjakarta. Pada tanggal 25 Juli 1947, Gubernur Kalimantan meminta panglima Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI)

Komodor Udara S. Suryadarma mengirimkan pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan kembali ke Kalimantan. Untuk memenuhi permintaan itu pada tanggal 17 Oktober 1947 pesawat dakota RI-2 menerbangkan sejumlah pemuda-pemuda Kalimantan dibawah pimpinan Mayor **Tjilik Riwut** dan Mayor **Suhodo** melakukan penerjunan di Sambu, Kotawaringin. Dalam perkembangan selanjutnya tokoh-tokoh pejuang ini bersama penduduk melakukan penyerangan pada basis pendudukan pasukan Belanda di berbagai tempat seperti Pangkalan Bun, Teluk Bogam, Sungai Rengas dan tempat-tempat lainnya.

Sementara itu, untuk mempermudah penguasaan wilayah, NICA membagi Kalimantan menjadi 5 satuan daerah bagian RIS, masing-masing adalah Satuan Kenegaraan Dayak Besar, Satuan Kenegaraan Kalimantan Tenggara, Satuan Kenegaraan Banjar, Satuan Kenegaraan Kalimantan Timur serta Satuan Kenegaraan Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Upaya Belanda membentuk Negara-negara boneka itu tidak membuahkan hasil sehingga sekembalinya Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia sebagai hasil **Konferensi Meja Bundar**, 27 Desember 1949, maka satu persatu negara bentukan Belanda dapat dibubarkan.

Pasca pengakuan kedaulatan RI oleh pihak Belanda, kehidupan pemerintahan di Kalimantan pun mengalami perubahan ditandai dengan dijadikannya bekas *Gouvernement van Borneo* menjadi Provinsi Administratif Kalimantan.

Sejak terbentuknya Provinsi Administratif Kalimantan tahun 1950, telah muncul suara-suara yang menghendaki Kalimantan dibentuk lebih dari satu provinsi. Keinginan yang secara terbuka dikemukakan muncul dari kalangan Rakyat Dayak dalam tiga (3) Kabupaten di Kalimantan, yaitu: Kabupaten Kapuas, Barito dan Kotawaringin yang menginginkan dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi tiga Kabupaten tersebut. Keinginan, hasrat dan pernyataan disampaikan dan disalurkan baik melalui organisasi massa (ormas) maupun melalui saluran partai politik (parpol). Aspirasi itu pertama kali dicetuskan melalui Ikatan Keluarga Dayak (IKAD) di Banjarmasin pada awal 1952. IKAD memprakarsai

pembentukan Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah (PPHRKT) di Banjarmasin.

Dalam perkembangan selanjutnya, Provinsi Administratif Kalimantan yang telah terbentuk sejak pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Pemerintah Belanda, melalui Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 status administratif tersebut berubah menjadi Provinsi Otonom Kalimantan.

Sementara itu, Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) menyelenggarakan Kongres di Bahu, Palawa pada tanggal 22-25 Mei 1953. Salah satu hasil kongres adalah resolusi menuntut terbentuknya Provinsi Otonom Kalimantan Tengah.

Tanggal 17 April 1954 PPHRKT kembali menyelenggarakan rapat. Hasil rapat adalah suatu resolusi yang berisi tuntutan agar Pemerintah Pusat segera membentuk provinsi keempat di Kalimantan yakni Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Resolusi Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah itu berkaitan dengan keputusan Kabinet di Jakarta dalam rapat ke 37 tanggal 3 Februari 1954, yang secara prinsip memutuskan untuk memecah Provinsi Kalimantan menjadi 3 provinsi.

Segala pernyataan, resolusi maupun mosi berisi tuntutan dan desakan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan, kepada Pemerintah Pusat/ Kabinet maupun kepada DPR-S RI dan DPR-RI hasil Pemilihan Umum tahun 1955. Namun tuntutan yang sangat menggelora dari rakyat dalam 3 Kabupaten (Kapuas, Barito, dan Kotawaringin) itu kurang mendapatkan perhatian yang signifikan, karena ternyata, baik pihak Pemerintah Pusat/Kabinet dan Parlemen (DPR-RI hasil Pemilu 1955) tetap menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1957.

Pada saat Undang-Undang ini terbit, wilayah Kalimantan Tengah merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Ibukota Banjarmasin. Bekas **Daerah Otonom Dayak Besar** dan **Swapraja Kotawaringin** dibentuk menjadi 3 Kabupaten yaitu **Kabupaten Kapuas**, **Kabupaten Barito** dan **Kabupaten Kotawaringin** (ketiga kabupaten ini merupakan bagian dari Kalimantan Tengah saat ini). Dalam penjelasan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 antara lain dinyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi Provinsi Otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun".

Atas adanya penjelasan Undang-Undang tersebut Rakyat Kalimantan Tengah merasa kurang puas. Hal ini menyebabkan keadaan keamanan dan ketentraman di tiga Kabupaten menjadi terganggu, terjadi bentrokan bersenjata dan kesalahpahaman antara aparat keamanan dengan organisasi militan Gerakan Mandau Talawang Pantja Sila (GMTPS). Sementara itu kalangan cendekiawan, tokoh politik dan masyarakat Kalimantan Tengah terus berusaha memperjuangkan agar Kalimantan Tengah dapat dipisahkan dari Kalimantan Selatan dan diberi status sebagai provinsi otonom sendiri.

Terbentuknya status provinsi tidaklah mudah, berbagai upaya dilakukan untuk menunjukkan bahwa potensi Kalimantan Tengah sudah layak diberi status provinsi seperti daerah lainnya agar lebih berpeluang untuk berkembang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan **Kongres Rakyat Kalimantan Tengah** yang dilangsungkan di Banjarmasin pada tanggal 25 Desember 1956, dengan Pimpinan Ketua Presidium Mahir Mahar dan tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan Tengah. Kongres berhasil melahirkan suatu resolusi dan mencetuskan Ikrar Bersama. Pada diktum resolusi selengkapnya: "Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan pengertian sebelum terlaksananya Pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kalimantan Tengah sudah dijadikan suatu Provinsi Otonom".

Sedangkan Ikrar Bersama Peserta Kongres Rakyat Kalimantan Tengah esensinya terdiri dari 2 butir:

- (1) Bersatu tekad, tidak terpisahkan dan konsekwen menyelesaikan perjuangan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah selekas-lekasnya;
- (2) Bersatu tekad tidak terpisahkan untuk mengangkat derajat hidup yang layak bagi segala lapisan rakyat dalam daerah Kalimantan Tengah khususnya dan Indonesia umumnya.

Selain itu, Kongres juga membentuk **Dewan Rakyat Kalimantan Tengah** dengan tugas: menindaklanjuti Keputusan Kongres terutama resolusi. Dewan Rakyat Kalimantan Tengah

mengirim utusan menghadap Gubernur Kalimantan, selanjutnya Dewan Rakyat Kalimantan Tengah bersama-sama Gubernur Milono ke Jakarta menghadap Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah, serta memberikan penjelasan-penjelasan. Dengan demikian, telah terdapat saling pengertian dan kesesuaian pendapat antara Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Pusat.

Upaya dan keinginan masyarakat Kalimantan Tengah untuk menjadi daerah otonom terpisah dari Provinsi Kalimantan Selatan berhasil. Arah kepada pembentukan Daerah Otonom Kalimantan Tengah diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor U.P.34/41/24 tanggal 28 Desember 1956 antara lain menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1957 membentuk Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sementara ditempatkan di Banjarmasin. Gubernur **R.T.A. Milono** selanjutnya ditugaskan sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara **Tjilik Riwut**, Bupati Kepala Daerah Kotawaringin diangkat menjadi Residen pada Kementerian Dalam Negeri dan ditugaskan membantu Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan **George Obus**, Bupati Kepala Daerah Kapuas, kemudian ditempatkan pada kantor Gubernur Kalimantan di Banjarmasin, dan diperbantukan pada Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah di Banjarmasin. Sebagai Sekretaris Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah ditunjuk **Drs. F.A.D. Patianom**.

Dengan demikian, terbentuklah Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dengan penunjukan R.T.A. Milono sebagai Gubernur Pembentuk dibantu 2 (dua) orang pejabat senior yaitu Tjilik Riwut dan G. Obus serta pejabat Pamong Praja berpengalaman Drs. F.A.D. Patianom sebagai Sekretaris dengan 21 orang personil bekerja keras menyiapkan segala sesuatu bagi terwujudnya pembentukan Provinsi Otonom Kalimantan Tengah dan selalu menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri.

Dengan terbentuknya Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, maka mulailah dicari tempat kedudukan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Warga dari 3

Kabupaten masing-masing menghendaki agar ibukota Kalimantan Tengah ditempatkan di daerahnya diikuti dengan silang pendapat. Berkenaan dengan itu Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah R.T.A. Milono mengambil suatu kebijaksanaan membentuk suatu Panitia untuk merumuskan dan mencari dimana daerah atau tempat yang strategis untuk dijadikan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Panitia tersebut dibentuk pada 23 Januari 1957 diketuai oleh Mahir Mahar didampingi oleh 6 orang anggota, 2 diantaranya adalah Tjilik Riwut, Residen Kalimantan Tengah dan G. Obus, Bupati Kepala Daerah Kapuas yang diperbantukan pada Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah.

Setelah Panitia mengadakan rapat-rapat dan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh Kalimantan Tengah baik dari kalangan sipil maupun militer antara lain restu dari Kolonel Koesno Utomo, Panglima Tentara dan Teritorium VI/Tanjungpura, Panitia menetapkan kesimpulan bahwa: sekitar desa **Pahandut**, dikampung Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling ditetapkan untuk calon ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Dasar pertimbangan memilih tempat tersebut menjadi calon ibukota, antara lain: Karena adanya perbedaan pendapat tentang calon-calon ibukota misalnya ada yang mengusulkan Kuala Kapuas, Pulang Pisau, Buntok, Muara Teweh, Sampit, dan Pangkalan Bun; maka dipandang perlu dicari satu kebijaksanaan untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Panitia berpendapat, karena alasan tuntutan tadi perlu sekali mencari jalan keluar yaitu mencari daerah baru yang dapat diterima oleh sebagian besar Rakyat Kalimantan Tengah dan Pejabat Pemerintah tingkat Kalimantan. Panitia berpendapat, alangkah baiknya jika calon ibukota berada di tengah-tengah masyarakat seluruhnya untuk memudahkan melaksanakan pimpinan dan koordinasi pada masa-masa yang akan datang dan memiliki satu kota baru yang dibangun di tengah-tengah hutan rimba dengan kekuatan bangsa sendiri di alam merdeka. Tentu saja hal lain yang dipertimbangkan adalah pertimbangan dari sudut politik, sosial ekonomi, pertahanan keamanan dan psikologis.

Pada akhir bulan Januari 1957, Panitia melakukan observasi langsung di tempat calon ibukota dipimpin Ketua Panitia Mahir Mahar seraya mengadakan penelitian, pembicaraan

dan rapat-rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Hasil peninjauan/penelitian atas calon ibukota tersebut dilaporkan kepada Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan sepenuhnya, bahwa daerah tersebut menjadi calon ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, artinya lokasi sekitar desa Pahandut antara Kampung Bukit Jekan dan Bukit Tangkiling ditetapkan sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk namanya, masih harus dicari sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada pembangunan kota tersebut. Untuk itu maka Panitia yang sama ditugasi pula untuk mencari nama bagi Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah; namun untuk sementara disebutkan: Pahandut, calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tanggal 23 Juli 1957 terbitlah Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang *Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur* (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1957 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284). Undang-undang Darurat ini secara resmi diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 23 Mei 1957.

Dengan keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, maka berakhirilah tugas R.T.A. Milono sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Bersamaan dengan berakhirnya masa tugasnya tersebut, Pemerintah Pusat mengangkat R.T.A. Milono menjadi Gubernur Kalimantan Tengah.

Pada upacara adat (Gerakan Mandau Talawang Pantja Sila) di lapangan Bukit Ngalangkang, Pahandut 18 Mei 1957, Gubernur R.T.A. Milono dalam pidatonya antara lain menyatakan cita-cita untuk memberi nama ibukota Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan jiwa pembangunan dan tujuan suci. Nama yang dipilih ialah **Palangka Raya**.

Palangka Raya artinya tempat yang suci, yang mulia dan besar. Nama Palangka Raya ini sesuai dengan cita-cita dilahirkannya Kalimantan Tengah yang dilahirkan dalam suasana suci Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Paskah, agar Palangka Raya

dapat tetap memelihara kesucian dan kemuliaan. Hari Raya Keagamaan Islam dan Kristen pada bulan Mei 1957 itu masing-masing jatuh pada 1 Mei 1957 Hari Raya Idul Fitri, dan 30 Mei 1957 Kenaikan Yesus Kristus.

Dua bulan kemudian, nama ibukota Provinsi Kalimantan Tengah diumumkan secara resmi oleh Gubernur R.T.A Milono, yakni bernama: Palangka Raya. Peresmian pemancangan tiang/peletakan batu pertama pembangunan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan oleh Presiden RI Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957.

Ketika pertama kali dibentuk, Provinsi Kalimantan Tengah hanya memiliki 3 Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Kabupaten tersebut dimekarkan menjadi:

1. Kabupaten Daerah Tingkat II Barito dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yakni:
  - a. Kabupaten Barito Utara, dengan ibukotanya Muara Teweh;
  - b. Kabupaten Barito Selatan, dengan ibukotanya Buntok.
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas tetap/ tidak mengalami perubahan.
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yakni:
  - a. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibukotanya Sampit;
  - b. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibukotanya Pangkalan Bun.

Undang-Undang Darurat ini kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tanggal 17 Juni 1958 tentang *Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Menjadi Undang-Undang.*

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1958 ini diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 2 Juli 1958. Pada Undang-undang tersebut juga ditetapkan ibukota Kalimantan Tengah adalah Palangka Raya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ditetapkan bahwa 4 Kabupaten dan 1 kota yang semula merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito, Kabupaten Kotawaringin dan Kota Palangka Raya.

Sekalipun ketika dibentuk, Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Otonom bukan Provinsi Administratif, Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki/belum dibentuk DPRD sebagaimana layaknya suatu Daerah Swatantra. Pelaksanaan pemilihan anggota DPRD Kalimantan Tengah baru dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota DPRD (Lembaran Negara Nomor 44 Tahun 1956). Hasil pemilihan Anggota DPRD Kalimantan Tengah Tahun 1958 adalah sebanyak 17 orang dan petantikannya dilakukan pada tanggal 2 April 1959.

Tanggal 22 Desember 1959 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.52/12/2-206 tentang pemindahan ibukota Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang ketika itu untuk sementara berkedudukan di Banjarmasin dipindahkan ke Palangka Raya setelah segala fasilitas untuk mendukung statusnya sebagai ibukota daerah Tingkat I telah selesai pembangunannya, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1960.

Untuk mendukung statusnya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah maka Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai Kotapraja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 terpisah dari Daerah Tingkat II Kapuas.

Pemekaran daerah otonom Kabupaten dan Kota terjadi dalam masa Provinsi Kalimantan Tengah menjadi daerah otonom pasca Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pada tahun 2002 terbit Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002, tanggal 10 April 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18) tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-undang ini maka jumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah menjadi 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 (satu) kota dan 13 (tiga belas) kabupaten, yaitu:

1. Kota Palangka Raya ibukota Palangka Raya yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kabupaten Murung Raya ibukota Puruk Cahu;
3. Kabupaten Barito Timur ibukota Tamiang Layang;
4. Kabupaten Barito Utara ibukota Muara Teweh;
5. Kabupaten Barito Selatan ibukota Buntok;
6. Kabupaten Pulang Pisau ibukota Pulang Pisau;
7. Kabupaten Katingan ibukota Kasongan;
8. Kabupaten Seruyan ibukota Kuala Pambuang;
9. Kabupaten Sukamara ibukota Sukamara;
10. Kabupaten Lamandau ibukota Nanga Butik;
11. Kabupaten Kapuas ibukota Kuala Kapuas;
12. Kabupaten Kotawaringin Timur ibukota Sampit;
13. Kabupaten Kotawaringin Barat ibukota Pangkalanbun
14. Kabupaten Gunung Mas ibukota Kuala Kurun.

Berdasarkan catatan sejarah, sejak Kalimantan Tengah dipersiapkan untuk menjadi Daerah Otonom pada tahun 1957 sampai dengan tahun 2008 ini, ada 12 orang terpilih baik sebagai gubernur maupun pejabat Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

**DAFTAR GUBERNUR DAN PEJABAT GUBERNUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
1957-2008**

NO.	NAMA		DARI	SAMPAI
1.	R.T.A. Milono	Gubernur	1 Januari 1957	30 Juni 1958
2.	Tjilik Riwut	Gubernur	30 Juni 1958	Februari 1967
3.	Reynold Sylvanus	Gubernur	Februari 1967	3 Oktober 1978
4.	W. A. Gara	Gubernur	3 Oktober 1978	7 Oktober 1983
5.	Eddy Sabara	Pejabat Gubernur	7 Oktober 1983	23 Januari 1984
6.	Gatot Amrih	Gubernur	23 Oktober 1984	21 Januari 1989
7.	Suparmanto	Gubernur	23 Januari 1989	22 Januari 1993
8.	Warsito Rasman	Gubernur	Januari 1993	Juli 1999
9.	Rappiudin Hamarung	Pejabat Gubernur	Juli 1999	8 Maret 2000
10.	Asmawi Agani	Gubernur	8 Maret 2000	23 Maret 2005
11.	Sodjuangan Situmorang	Pejabat Gubernur	23 Maret 2005	4 Agustus 2005
12.	Agustin Teras Narang	Gubernur	4 Agustus 2005	sekarang

**DAFTAR WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
1961-2008**

NO.	NAMA	PERIODE
1.	Ir. Reynold Sylvanus	1961-1967
2.	Victor Phaing	1986-1991
3.	H.J. Andries	1991-1996
4.	Drs.Siswanto Adi	1996-1999
5.	Ir. E. Gerson	1996-1999
6.	Drs. Nahson Taway	2000-2005
7.	Ir. H. Achmad Diran	2005-sekarang

## E. Kalimantan Tengah Dalam Khasanah Arsip

Materi arsip yang ditampilkan dalam Citra daerah Kalimantan Tengah diawali dengan menampilkan arsip peta yang dapat menggambarkan perkembangan wilayah Kalimantan Tengah secara geografis; antara lain *Eiland Borneo, Zuid en Oosterafdeeling, Zuid van Borneo*, Kalimantan Tengah, Wilayah-wilayah Kabupaten seperti; Kotawaringin, Sampit dan Tamiang Layang, bahkan gambaran aliran/muara sungai dan peta penyebaran Suku Dayak di Kalimantan Tengah yang merupakan kekhasan kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah.

Bidang politik dan pemerintahan menampilkan arsip yang merupakan komunikasi antara Kasultanan Kotawaringin dengan pemerintah Hindia Belanda, laporan-laporan dari Residen dan Komisariss Wilayah tentang keadaan wilayah Kalimantan Tengah, pembagian wilayah, serahterima jabatan Residen hingga pembentukan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bidang Perekonomian menampilkan arsip yang terkait dengan pertambangan batubara di Riam, Pertambangan minyak di daratan Teweh, industri perkayuan industri mebel, hasil bumi seperti rotan, kelapa sawit, karet dan kayu, pengembangan lahan gambut untuk pertanian dan suasana pasar dan pelabuhan.

Bidang pendidikan menampilkan antara lain arsip foto tentang perkembangan pendidikan di Kalimantan Tengah dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Guru Agama, Sekolah Kejuruan/Akademi, pendirian Universitas Negeri Palangka Raya, Universitas Kristen Palangka Raya dan permohonan *studireis* bagi putra-putri Kasultanan Kotawaringin.

Bidang Kesenian dan Kebudayaan menampilkan foto-foto tentang profil suku Dayak Katingan, suku Dayak Kayan, Suku Dayak Kasongan, alat musik dan tarian adat/daerah suku Dayak, rumah tinggal Sultan, rumah tinggal masyarakat Dayak, kantor *Controleur* (pengawas) yang merupakan jabatan pada tingkat *Onderafdeeling*. Suasana malam kesenian dalam menyambut kunjungan Presiden RI pertama Ir. Soekarno di Palangka Raya.

Bidang infrastruktur menampilkan arsip-arsip hasil penelitian aliran sungai Barito, sungai Katingan, pembangunan gedung dan rumah tinggal *Controleur*, transportasi air di sungai Samuda, Sampit, pembukaan lahan pemukiman, peletakan batu pertama kota Palangka Raya oleh Presiden RI Soekarno, pembangunan gedung-gedung perkantoran sebagai infrastruktur kegiatan pemerintahan, pembangunan jalan, stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya dan pembukaan hubungan udara jalur Banjarmasin-Palangka Raya.

Bidang Keagamaan merupakan penutup dalam penampilan Arsip Citra Daerah Kalimantan Tengah menampilkan foto-foto gereja, masjid, kehidupan masyarakat nasrani, alim ulama, pastur dan lain-lain. Bidang sosial.

Reproduksi arsip tersebut secara keseluruhan diserahkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy (CD ROM)* yang diharapkan dapat memberikan gambaran informasi yang terkandung di dalamnya.

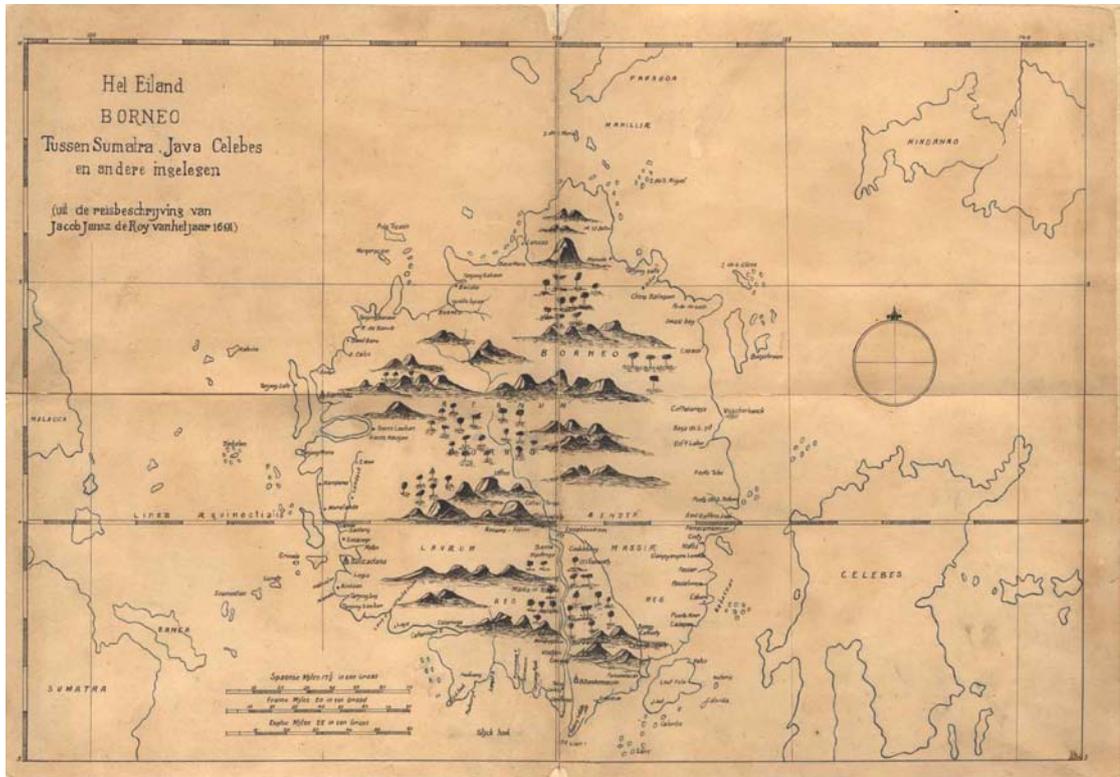
## DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional RI (1986), *Inventaris Arsip Borneo*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1979). *Sejarah Kebangkitan Nasional di Kalimantan Tengah*. Jakarta: Proyek Penelitian Sejarah dan Budaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984). *Sejarah Pergerakan Daerah Kalimantan Tengah*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Departemen Penerangan RI (1950), *Provinsi Kalimantan Tengah*, Jakarta: Departemen Penerangan
- Kartodirdjo, Sartono, (1975) *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Marsono, (2005), *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta.
- Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi ke-51 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 (2008). *Panduan Peringatan Hari Jadi ke-51 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008*, Palangka Raya.
- Ricklefs, M.C. (2005), *Sejarah Indonesia Modern*, Jakarta.
- Yayasan Bakti Wawasan Nusantara (1992). *Profil Provinsi Republik Indonesia : Kalimantan Tengah*. Jakarta.

[www.kalteng.go.id](http://www.kalteng.go.id)

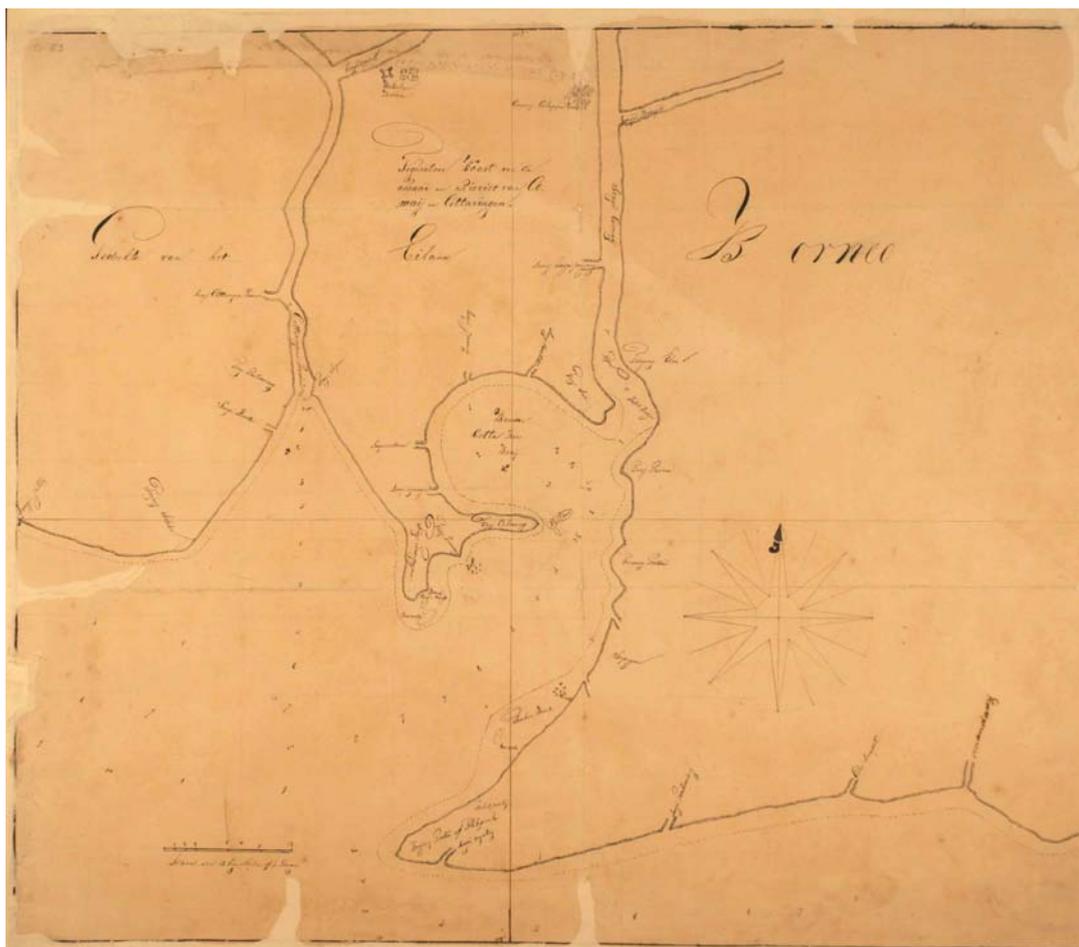
# CITRA KALIMANTAN TENGAH DALAM ARSIP

# Geografi



Peta wilayah Pulau Kalimantan (*Eiland Borneo*),  
1691.

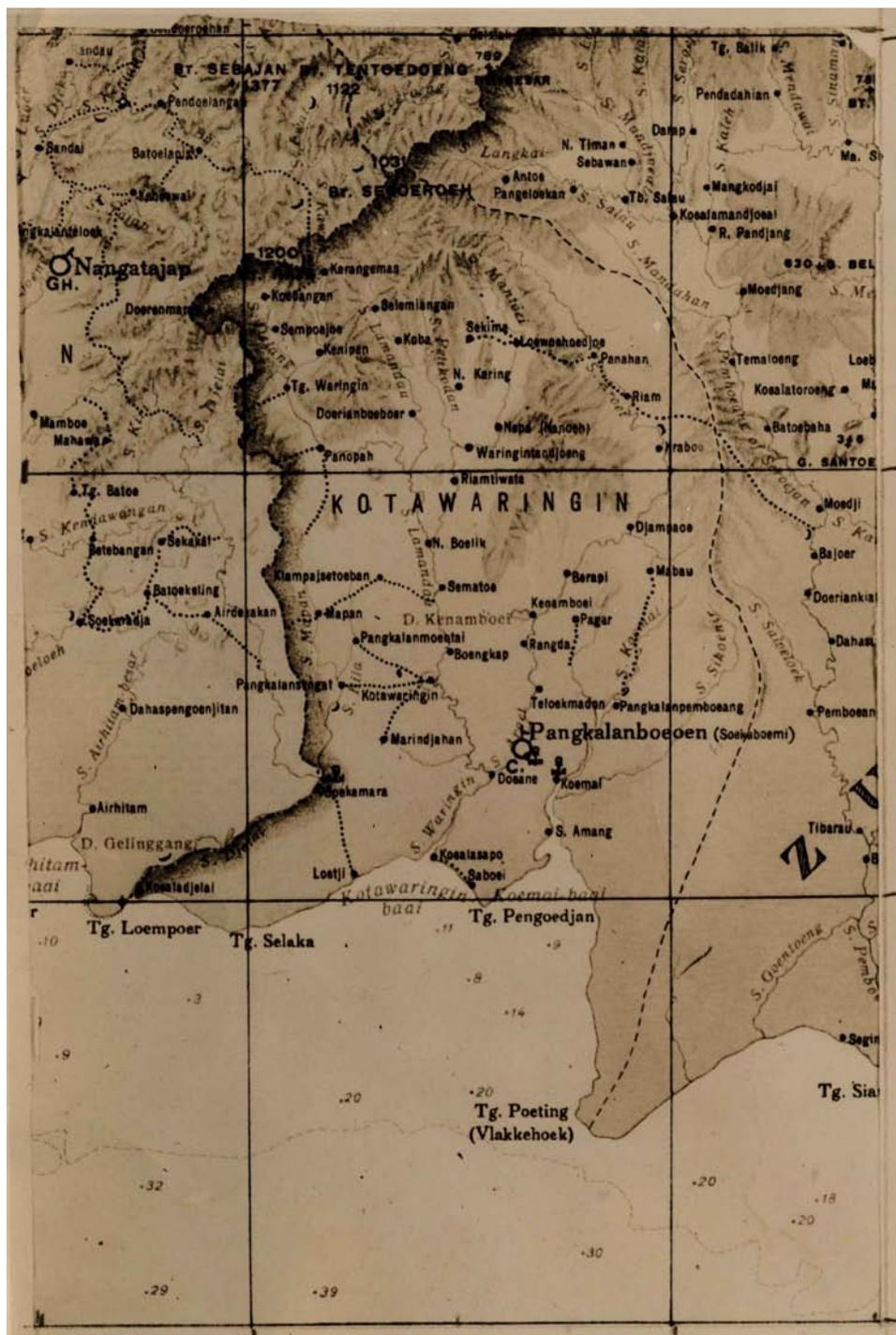
*ANRI: De Haan No. B116*



Peta Teluk dan Sungai *Comeij* dan *Cottaringen*,  
hingga Tanjung Putin, Kalimantan Tengah,  
Lampiran Resolusi 5 Agustus 1835 Nomor 2.  
5 Agustus 1835  
*ANRI: De Haan No. G 53*

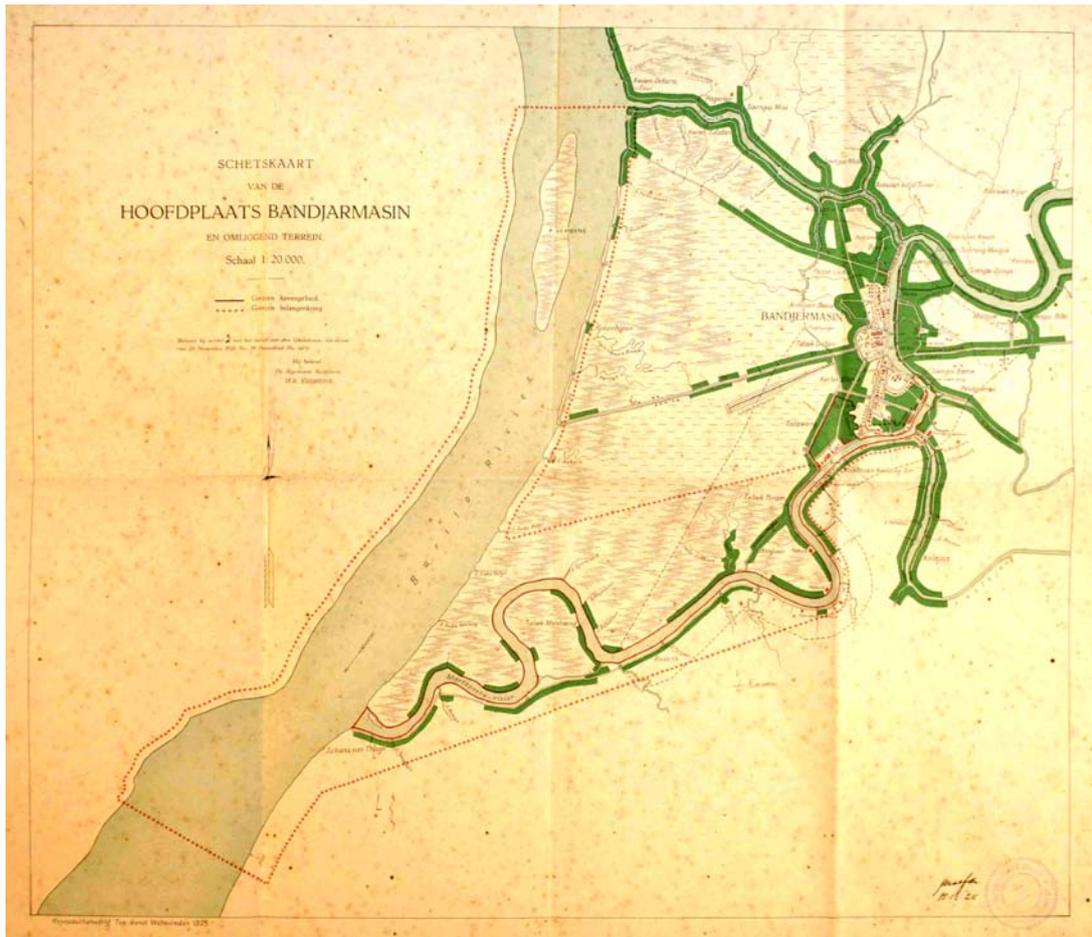
Peta penyebaran Suku Dayak di Kalimantan; Suku Dayak Ngaju  
merupakan Suku Dayak yang dominan berada di wilayah  
Kalimantan Tengah,  
1920

*ANRI: NEFIS: A 10200*



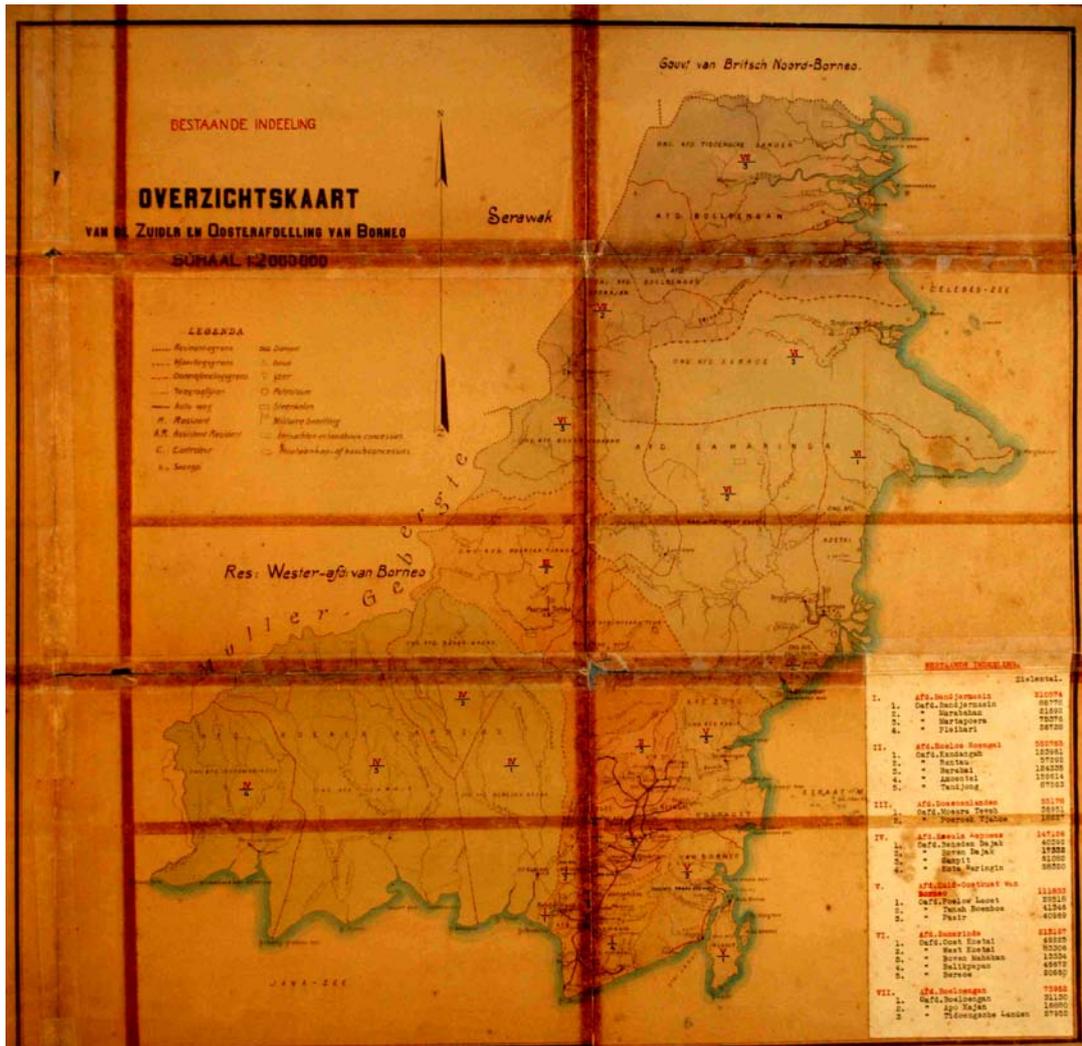
Peta wilayah Kotawaringin, Kalimantan Tengah,  
1920

*ANRI: KIT A 5120*



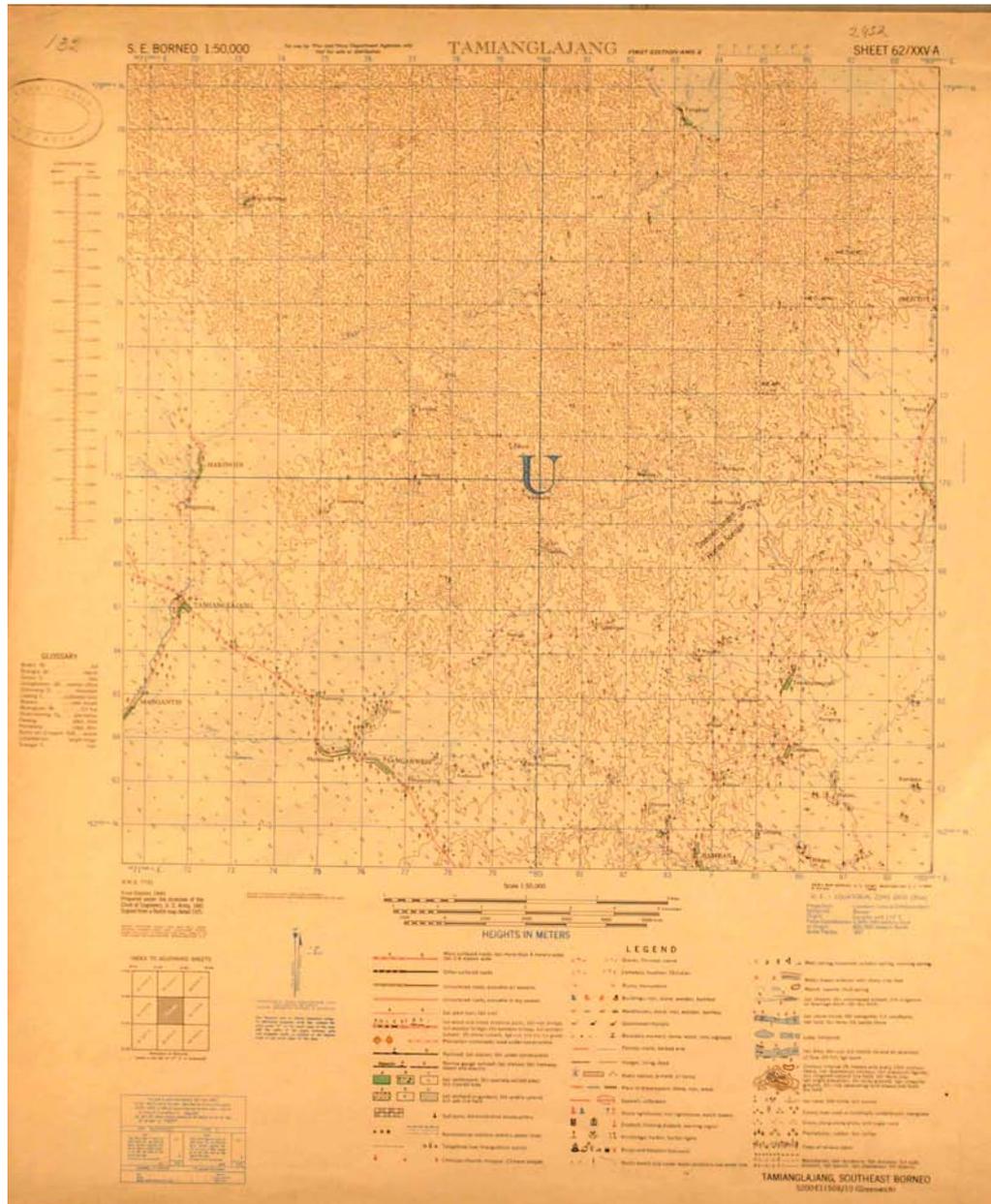
Peta Banjarmasin sebagai ibukota Kalimantan Selatan dan Timur yang meliputi wilayah pemerintahan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, Lampiran Besluit Gubernur Jenderal, 25 November 1925 Nomor 19.

*ANRI: Besluit 25 November 1925 no. 19*

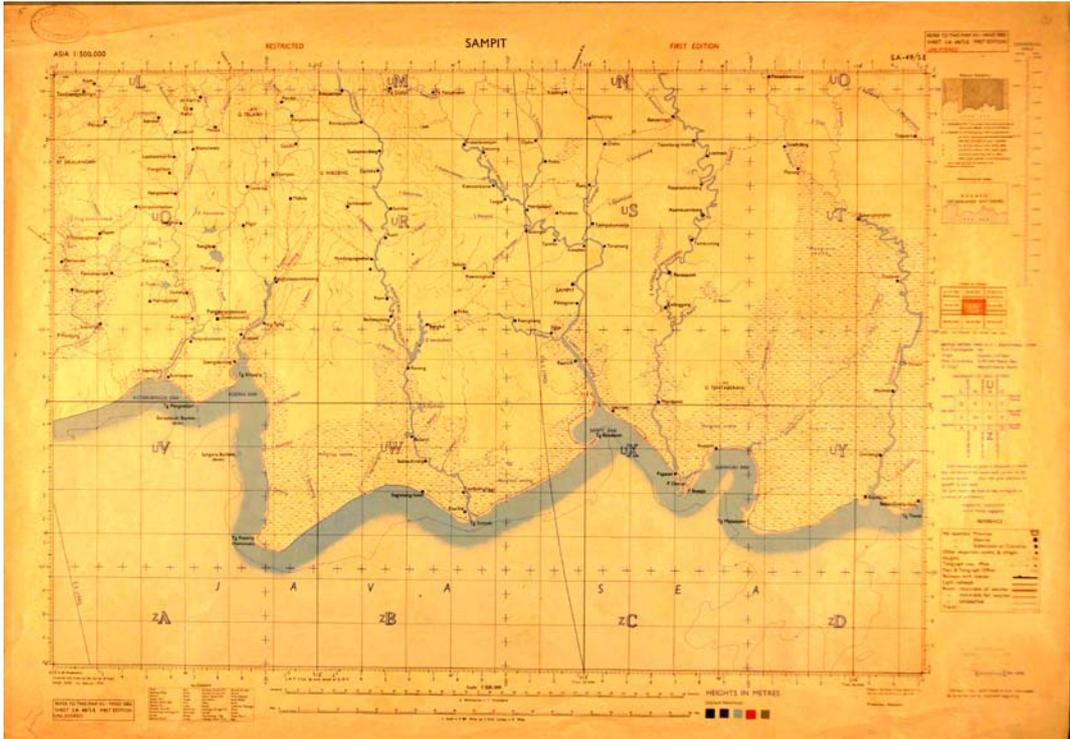


Peta Pulau Kalimantan bagian selatan,  
berikut pembagian wilayah dan jumlah penduduk.  
10 Februari 1934.

*ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 4538*

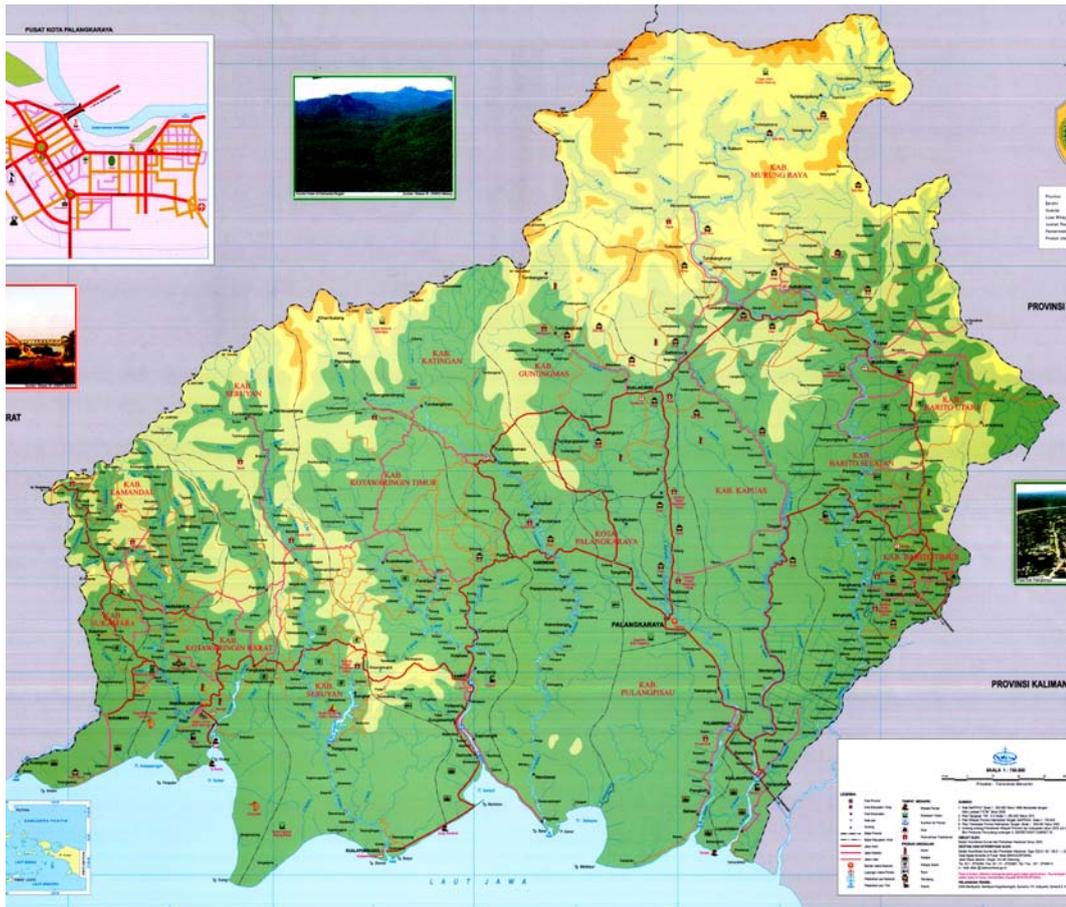


Peta wilayah Tamiang Layang, Kalimantan Tengah.  
1942  
*ANRI: Topografi No. 132/2452*



Peta wilayah Sampit, Kalimantan Tengah  
1945  
*ANRI: Topografi No. 59*





Peta Provinsi Kalimantan Selatan,  
2005

*ANRI: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional*

# Politik dan Pemerintahan

Aan de Ratoe Anioem Koesoemo  
 Yoedo di Kotawaringin

De Gouverneur Generaal van  
 Nederland en Indië Johannes  
 Siberg Schepf der Hoop van  
 Vredeliefchap en Genegenheid aan  
 zijn vriend de Ratoe Anioem de  
 Soema Soeda di Kotawaringin  
 verzekerde de Wensende alles wat  
 dat hem aanginaem en gebat-  
 tigt maken kan

Wyders heeft den Gouverneur  
 generaal wel ontvangen de brief  
 van Ratoe Anioem Koesoemo  
 da alhier aangebragt den des-  
 zels Bending Suragan Dood,  
 aan Wien al de hulp en bystand  
 is bereezen, die onderdanen van  
 Vorsten welke met de Compagnie  
 in vriendschap zijn alhier genieten.

Op de gegeven informatie dat  
 het vaartuig tot welkers onkop  
 door Wylten den Heer Javos Gou-  
 verneur van Peebu tot de Partikel  
 de benodigde Contanten zijn voorge-  
 schoten aan zijn Hoogheids Zonde-  
 Schap, van den Ratoe  
 Anioem ten eersten te worden ge-  
 restitueerd, niet op Kotawaringin

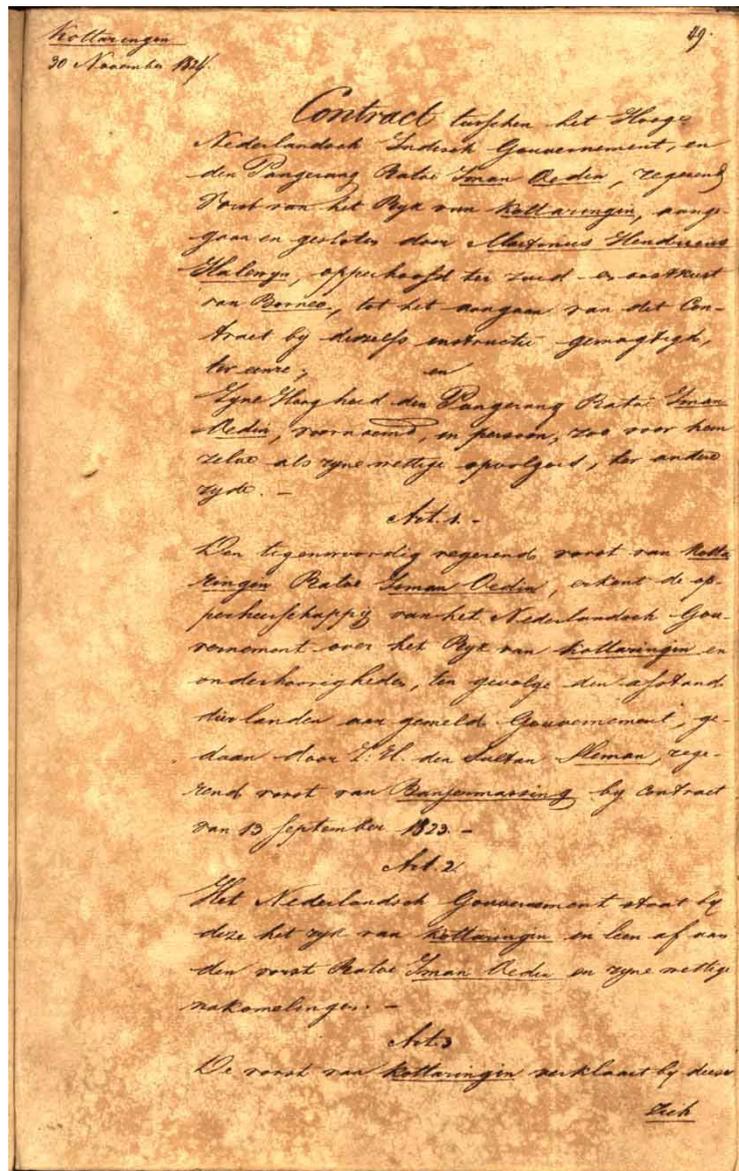
(Handwritten signature)

Surat dari Gubernur Jenderal Johannes Siberg kepada Ratoe Anioem Koesoemo Yoedo di Kotawaringin tentang kunjungan persahabatan ke Kasultanan Kotawaringin.

29 November 1803.

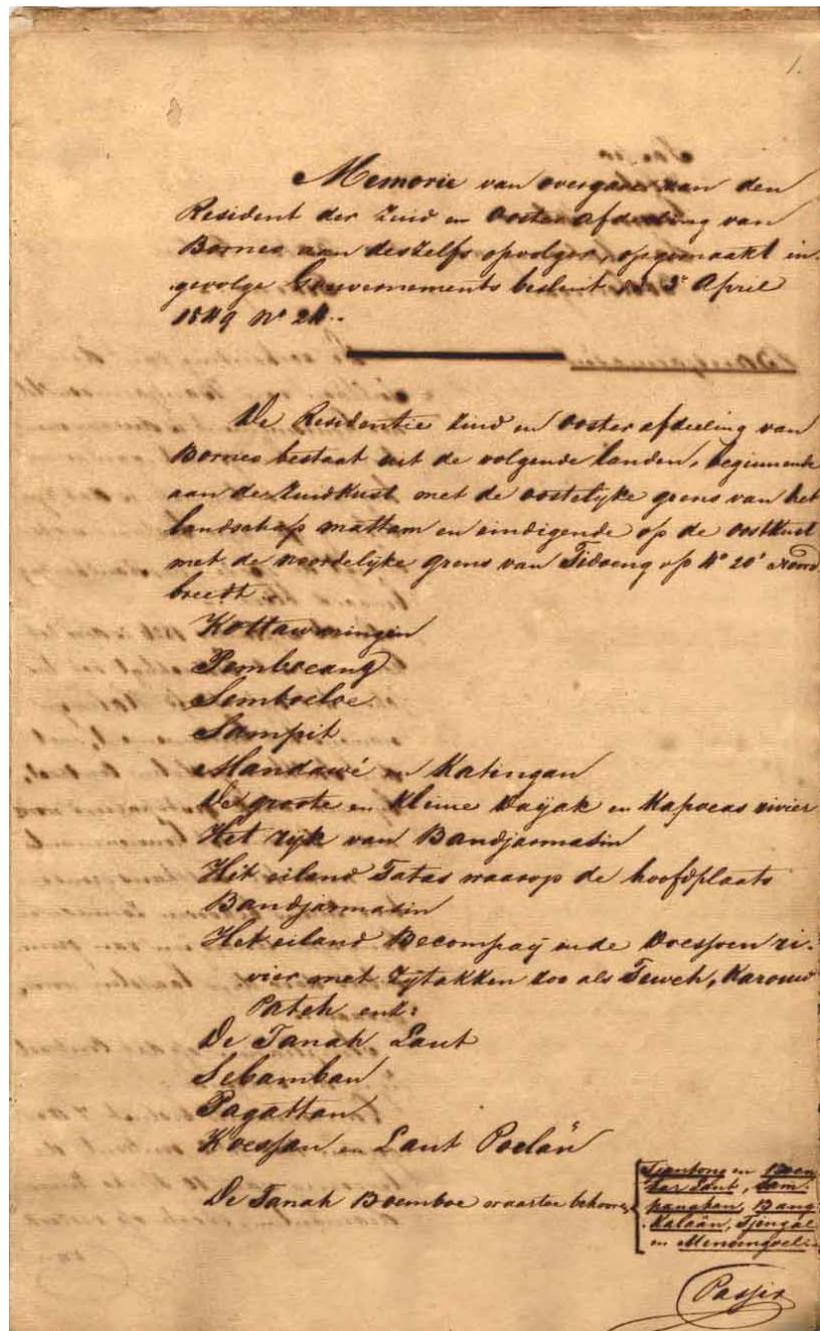
ANRI: BZO No. 138/1



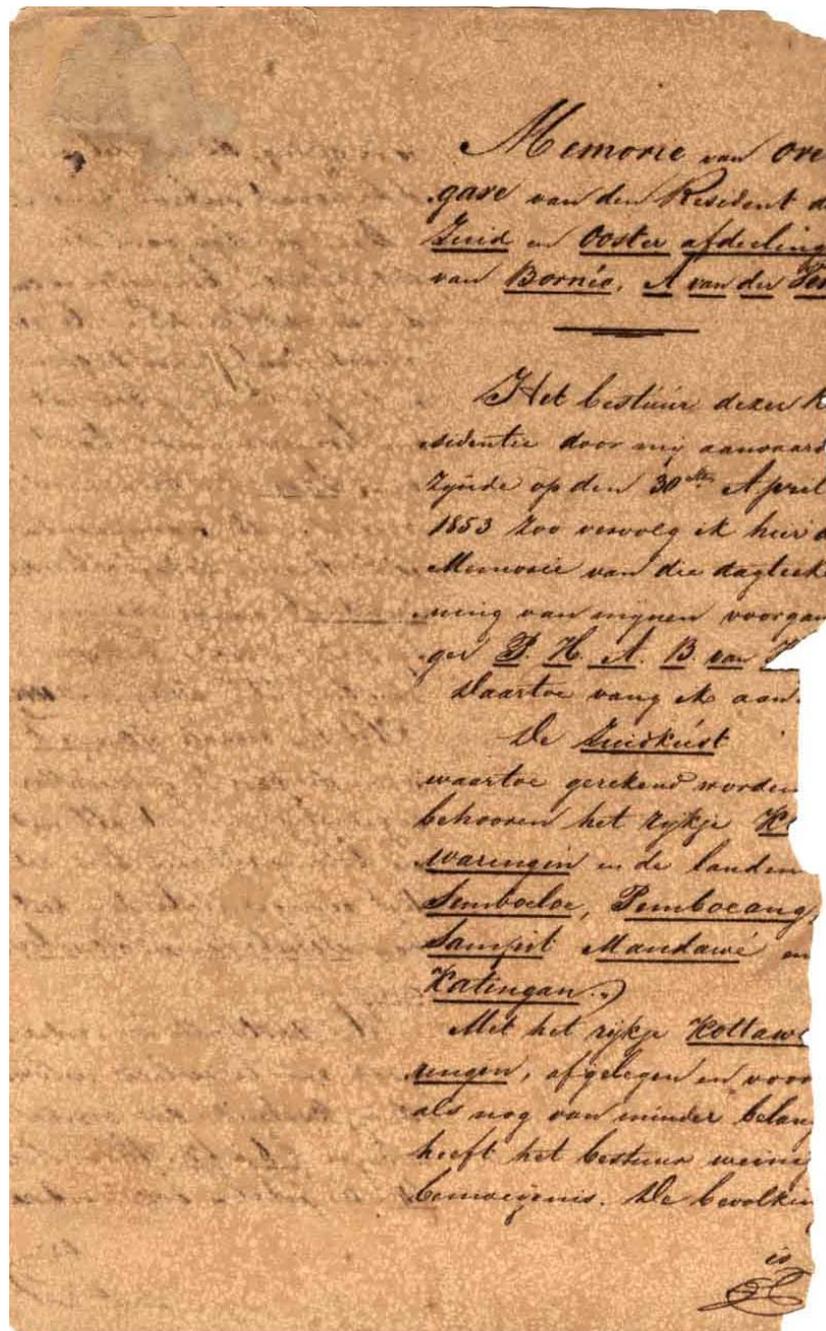


Bagian awal dari Kontrak Perjanjian Kerjasama antara Gubernur  
Jenderal Hindia Belanda dengan Sultan Kotawaringin  
Ratoe Isman Oedin.  
30 November 1834.

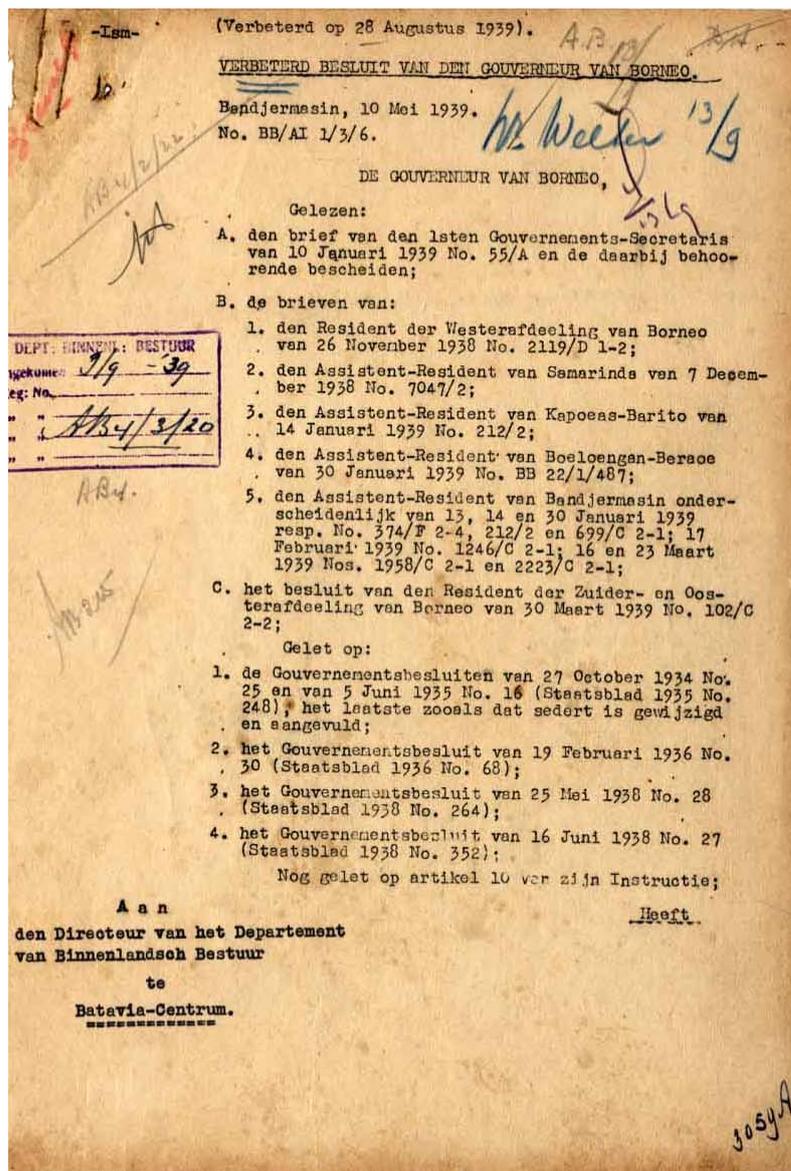
*ANRI: Kontrak Borneo No. 56*



Bagian awal dari Memori Serah Terima Jabatan Residen Kalimantan Bagian Selatan dan Timur, J.G.H. Gallois antara lain tentang pembagian wilayah Kalimantan bagian selatan, 2 April 1851  
 ANRI: BZO No. 136/1

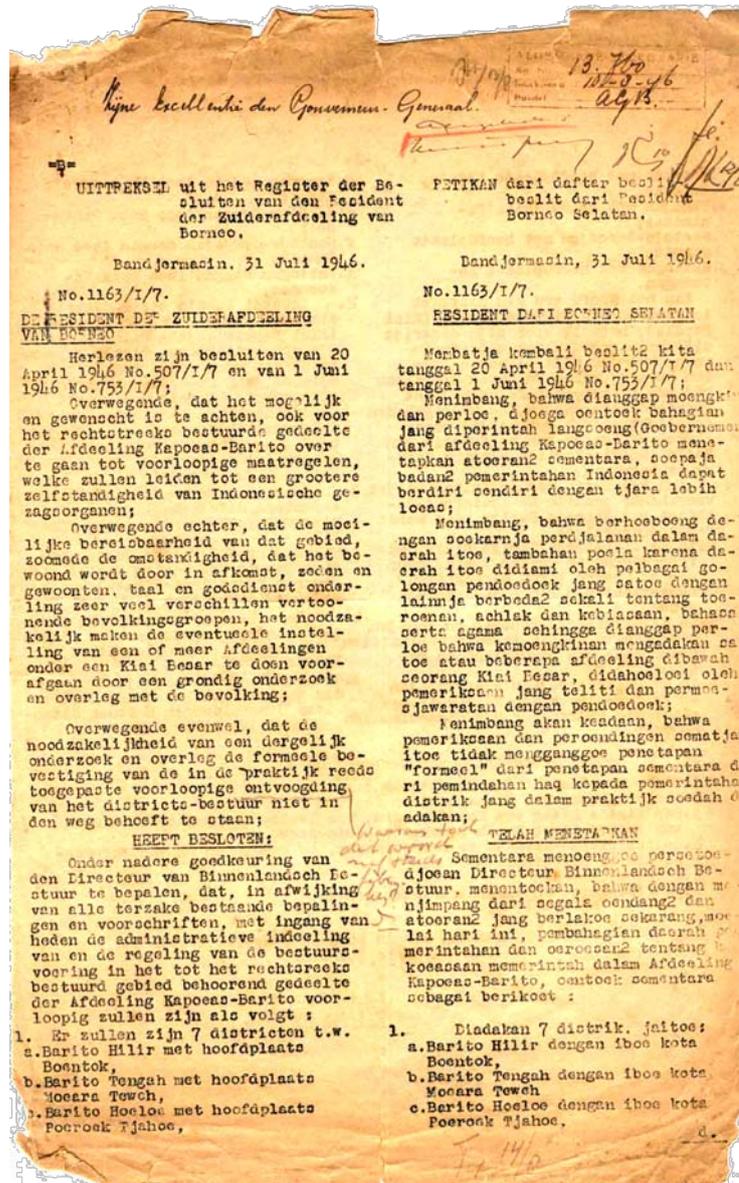


Bagian awal dari Memori Serah Terima Jabatan Residen Kalimantan Bagian Selatan dan Timur A. van den Venn antara lain tentang wilayah Kesultanan Kotawaringin termasuk dalam wilayah Kalimantan Bagian Selatan, yang terdiri dari wilayah Sembulu, Pambuang, Sampit, Mandawe dan Katingan, 30 April 1853  
*ANRI: BZO 136/11*



Bagian awal dari Keputusan Gubernur Borneo No.BB/AI/1/3/6 tentang pembagian wilayah Karesidenan Kalimantan Timur dan Selatan menjadi 4 *afdeeling* (bagian), yaitu: Banjarmasin, Hulu Sungai, Kapuas Barito dan Samarinda. Kalimantan Tengah termasuk dalam *afdeeling* Kapuas Barito yang terbagi dalam 6 *onderafdelingen*, yaitu *Beneden Dayak* (Dayak Bawah), *Boven Dayak* (Dayak Atas), Sampit, Kotawaringin, Muara Teweh dan Puruk Cahu,  
10 Mei 1939

*ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 4538*



Bagian awal dari Petikan Surat Keputusan Residen Borneo Selatan No. 1163/5/7 tentang pembagian *afdeeling* Kapuas Barito menjadi 7 distrik yakni Barito Hilir, Barito Tengah, Barito Hulu, Kapuas, Kahayan, Seruyan dan Katingan.

31 Juli 1946

*ANRI: Algemeene Secretarie No. 1308*

Pemerintah Kesoeltanan Kota Waringin.

Mengingat pasal 1 sub a dari beslit Goebornemen tanggal 9 April 1946 No. 3 (Staatsblad 1946 No.27);  
Menimbang, bahwa dikalangan orang2 pendoeoek lanschap terkan-  
doeng hadjat akan hak toeroet berbitjara terhadap penetapan oendang2  
dan pemerintahan;  
Berkehendak memenoehi hadjat ini dengan djalan pembentoeakan  
dari seboeah Dewan perwakilan jang toeroet berhak menetapkan oendang2

TELAH MEMOETOESKAN :

Menetapkan peratoeran jang berikoet:

Pasal 1.

Oentoek lanschap Kota Waringin dibentoeak seboeah Dewan jang mempoenjai hak toeroet menetapkan oendang2, seperti dimaksoed dalam ketentoeaan pada I sub a dari beslit Goebornemen tanggal 9 April 1946 No. 3 (Staatsblad No. 27). Dewan ini memakai nama Dewan Kota Waringin serta didalam peratoeran ini lebih djaceh diseboetkan sebagai Dewan.

Pasal 2.

Anggauta Dewan moengkin hanja orang2 ra'jat Keradjaan Belanda jang menoeroet taksiran telah menjapai oesia 25 tahoen, mempoenjai tempat kediamannja jang sebenarnja didalam lanschap Kota Waringin, pandai menoeelis dengan hoeroef2 Latin, mempoenjai sepenoehnja tenaga2 pikirannja, serta tida dirampas kemerdekaannja menoeroet hoekoem oendang2, atau poen tida diketjoewalikan dari hak pemilihan berdasar atas kepoetoesan kehakiman jang tida moengkin dibatalkan lagi.

Pasal 3.

Dewan itoe disoesoen atas 12 anggauta, diantaranya 10 orang dipilih dengan memperhatikan ketentoeaan dalam pasal 4, serta 2 orang diangkat oleh Pemerintah Kesoeltanan, agar soepaja terdjamin soeatoe perwakilan jang pantas didalam Dewan bagi golongan2 pendoeoek, kepentinan2 dan aliran2 didalam lanschap jang tida atau koerang tjoeoep memperoleh perwakilan dengan djalan pemilihan.

Pasal 4.

- (1) Oentoek perlaksanaan pemilihan, lanschap dibahagi atas sepoe-loeh lingkoengan pemilihan jang dengan memperhatikan pertalian2 adat dan daerah, seberapa moengkin mempoenjai sedjoemlah pemilih2 jang bersamaan.
- (2) Dalam tiap2 lingkoengan pemilihan dipilih seorang anggauta Dewan oleh kepala2 pemilih jang - terketjoewali karena ketentoeaan dalam ajat 3 - lebih dahoeloe telah dipilih oleh pemilih2.
- (3) Dalam kampoeng2 Dajak jang tertentoe jang ditoendjoekkan oleh Pemerintah Kesoeltanan sesoewai dengan Mantir Poeloehan, kepala2 pemilih itoe sambil memperhatikan kebiasaan2 setempat2, ditoendjoekkan oleh pemerintah kampoeng dan tetoes2 kampoeng.
- (4) Sjarat2 jang haroes dipenoehi oleh kepala2 pemilih dan pemilih2 serta atoeran lebih djaceh tentang pemilihan, ditentoeakan dengan beslit Pemerintah Kesoeltanan.

Pasal 5.

Bagian awal dari Salinan Keputusan Pemerintah Kasultanan Kotawaringin tentang Pembentukan Dewan Kotawaringin yang mempunyai hak turut serta menetapkan undang-undang.

14 Januari 1948

*ANRI: Algemeene Secretarie No. 1330/1*

Nota

Dioorsembahkan:

Menghadap S. P. J. M. Meelia P. R. K. A. alim Sjah Sultan yang memiliki wilayah didalam selatun kerajaan Kotawaringin, bersemajam di keraton kesing, Bukit Indra Gencana - Pangkalan Bun.

Reserta S. P. Iwan Besar Resident Serawak Selatan, yang bersemajam dengan sedjahteranya diketa:

Samjarnasin

Dengan segala Herat dan Hident.

Kami Insr bertanda tangan dibawah ini, jaites: Peetra-petra Sarasman dan kamsia-kapala kampung suri keteb-  
retea kampung, cheasecenja, rakjat Kerajaan Kotawaringin Gemeemja. Mengambil hati keberuanian, mengateerkan ini Re'est sebagai ganti diri kami sekalian, datang menghadap S. P. J. M. Meelia, Mengateerkan Herat" sebagai terhampar dibawah ini:

bahwa kami sekalian teoret bergembira dengan adanya pembentukan Dewan Kotawaringin, sehingga berdasar undang-undang kerajaan pemerintah kerajaan 1938 jang mana, tertera didalam pasal 8, alinia 2 dan 3, djuga pasal 4 alinia 2: soringat titah jang seetji meemi alih Seri Baginda Maharaja Ratae Koderlam dibecat di Djakarta tanggal 13 Februari 1948. Hal ini sangatlah di-pehankan karena sesesuai segala makseodnja dengan hekeem adat-istiadat Kerajaan Kotawaringin, tambahan peela mense-  
reel hekeem s-jara' agama Islam, wadjiblah dan harees-  
lah Radja itee bekodja, dengan beberapa erang Besar, (wasirnja) jang sebarang masih belesen diadakan.  
Oleh sebab itee, di pehankan, agar jang kaha Meelia, me-  
angkat segala anggotanja.

Demikianlah herce kami sekalian mengharepan Lajah dar kerria jang kaha Meelia serta pemerintah Kerajaan Koderlam, seadi hampertonanjan:

Atas kalimahan dan keernianja Seri Pedeeka Jang kaha Meelia terahebet diatas, terlebih dahesele dan sesesodnja kami seet jagan, "Diperbantjak Terima Kasih!"  
Pengkalin Beem den 3 Februari 1948.  
Herat dari kami jang kesenen:

St. Alabeel-Jahin.		H. Dja'at.	Said A. I. I.
Pengeran Mala ja.	H. M. Saad.	Abecbekar.	I. Aasin.
Badan pandji.	Oedan.	Polman.	Ali.
St. A. Asra.	Kardan.	A. Saad.	B. Saad.
St. Muhameda.	H. M. Saie.	H. M. Saie.	Osman.
St. Abdees Jaheer.	Arsan.	H. Alwi.	Abdeekarin.
St. Teekoei.	Mastarin.	H. M. Taib.	H. Hoeldi.
St. Dja'par.	Jeerjid.	H. Heesin.	Osman.
St. Said.	Je'an.	Gamarali.	H. Hadari.
St. Saroesi.	H. Ammil.	St. Taib.	Sa'ad.
Said-Ali.			
St. M. de. Hasan			
Del. Obek			
St. A. Saad			
St. M. Saad			

Lajahan dikirim dan disteerkan kepada:

1. Sri Pedeeka J. M. I. Jang Dipertecekan Besar-  
Luitenant Gubernour General jang bersemajam  
diistana Djakarta:

2. Jang terhmat tecean Derectur Secara salimantan  
di Samjarnasin, sepeja distarkan.

Surat dari Putra-putra bangsawan dan Kepala-kepala kampung mewakili rakyat Kesultanan Kotawaringin di Keraton Kuning Bukit Indra Gencana, Pangkalan Bun tentang Pembentukan Dewan Kotawaringin.

3 Februari 1948

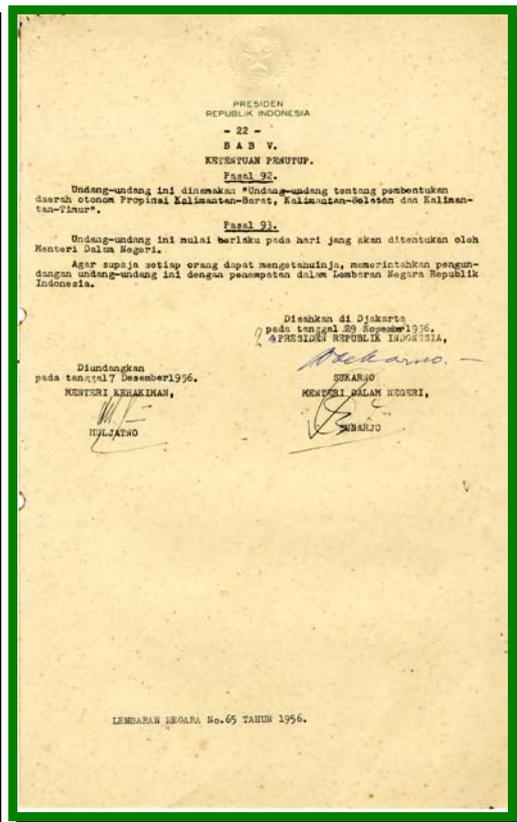
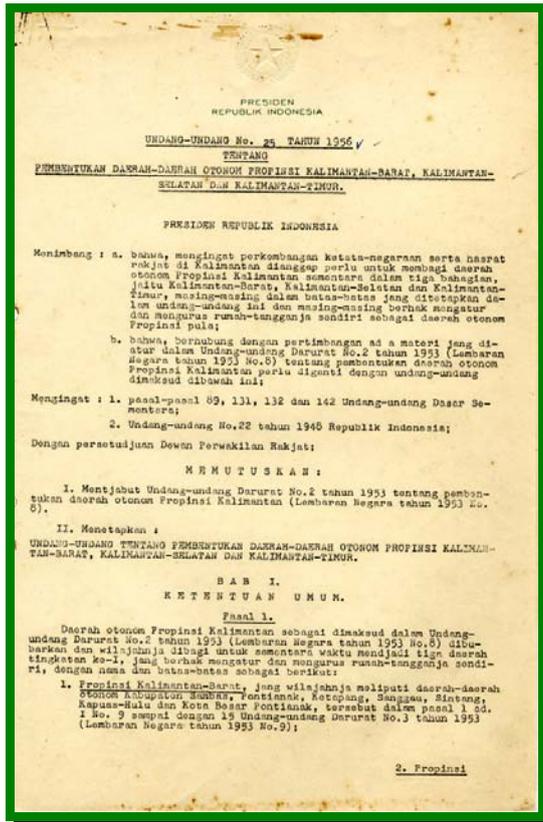
ANRI: Algemeene Secretarie No. 1330

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS)  
Kabupaten Kotawaringin berfoto bersama sesudah mengadakan  
rapat paripurna tahun 1951.

*ANRI: Kempen 1951*

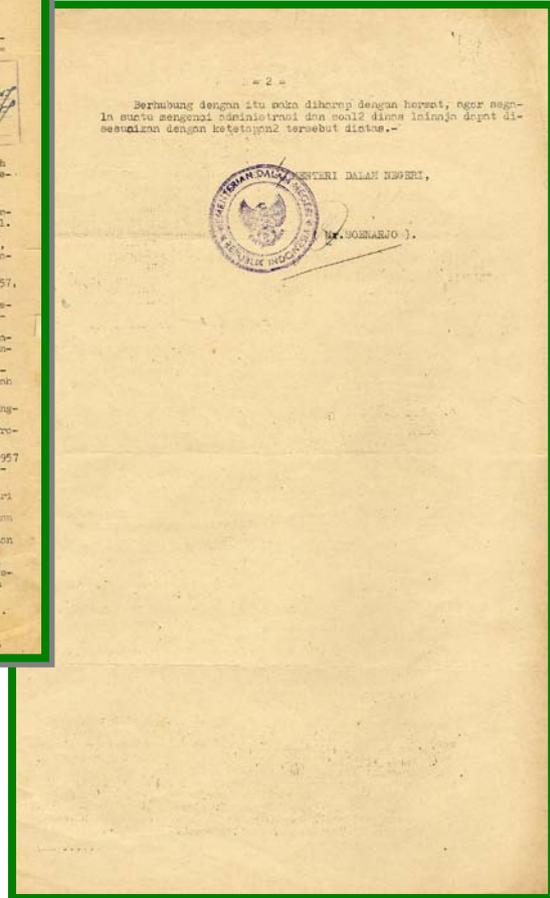
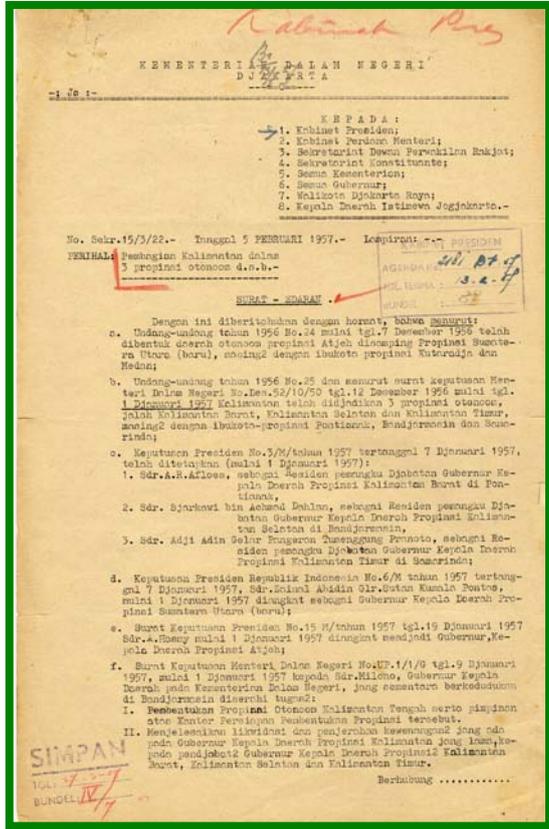
Peserta Konferensi Pamong Praja dan Inter Jawatan seluruh Kabupaten Barito, berfoto bersama di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito di Muara Teweh, Kalimantan Tengah, Maret 1953.

*ANRI: Kempen 1953 - 03*

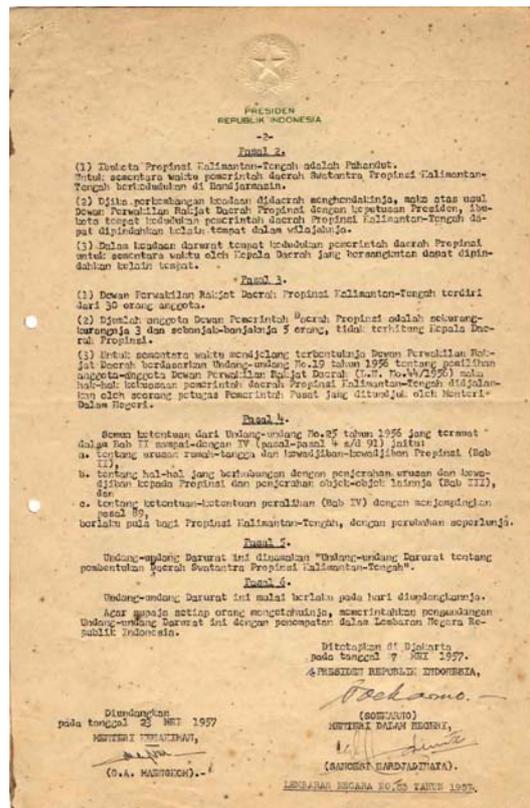
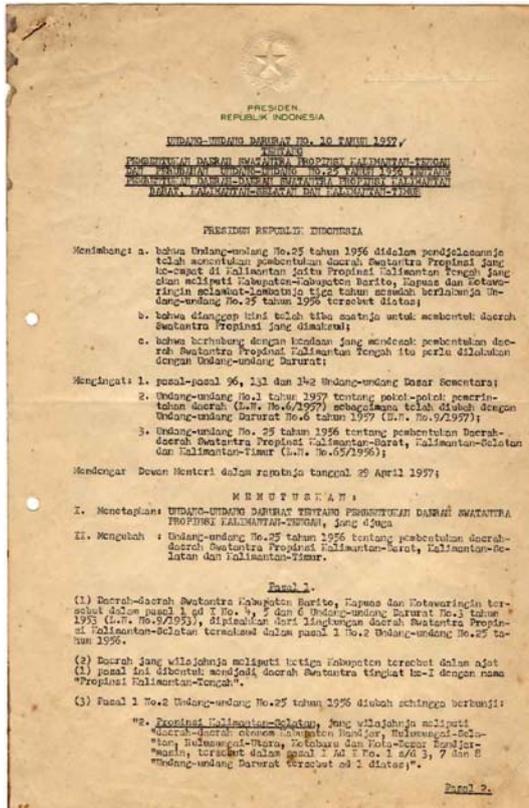


Bagian awal dan akhir dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kalimantan Tengah pada saat itu merupakan bagian dari Kalimantan Selatan.  
29 November 1956

*ANRI: Sekretaris Kabinet UU 1950-1960 No. 199*



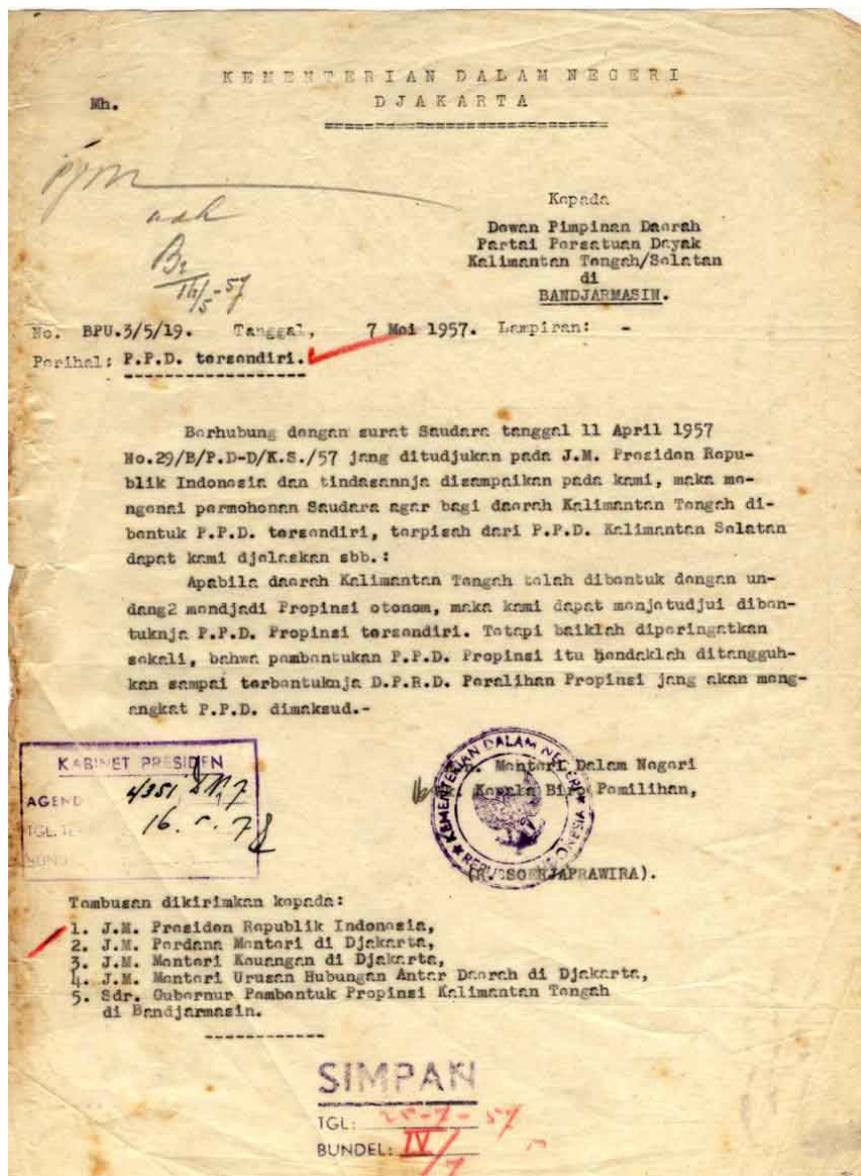
Surat dari Menteri Dalam Negeri, Mr. Soenarjo kepada Kabinet Presiden tentang pembagian Kalimantan dalam 3 provinsi otonom dan persiapan pembentukan Provinsi Otonom Kalimantan Tengah  
5 Februari 1957  
*ANRI: Kabinet Presiden No. 901*



Bagian awal dan akhir Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 mengenai Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

7 Mei 1957.

*ANRI: Sekretaris Kabinet, Undang-Undang Darurat No. 145*



Surat dari Kepala Biro Pemilihan Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Dayak Kalimantan Tengah tentang permohonan agar Kalimantan Tengah mempunyai Partai Persatuan Dayak sendiri terpisah dari Partai Persatuan Dayak Kalimantan Selatan.

16 Mei 1957.

*ANRI: Kabinet Presiden 817*



Presiden Soekarno berpidato pada rapat raksasa dalam rangka kunjungan Presiden di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 15 Juli 1957

*ANRI: Kempen 570715 LL 1-1*

Masyarakat menyambut kedatangan Presiden Soekarno, dalam rangka peletakan batu pertama ibukota Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

17 Juli 1957

*ANRI: Kempen: 570717 LL 2 – 2*

Pemancangan kayu oleh Presiden Soekarno sebagai tanda peresmian pembangunan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

17 Juli 1957

*ANRI: Kempen 570717 LL 2 – 8*



Presiden Soekarno memberikan bingkisan kepada wakil masyarakat di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.  
15 Juli 1957

*ANRI: Kempen 570717 LL 7*



Presiden Soekarno mencoba pesawat helikopter  
dalam perjalanan ke Kalimantan di Palangka Raya,  
17 Juli 1957

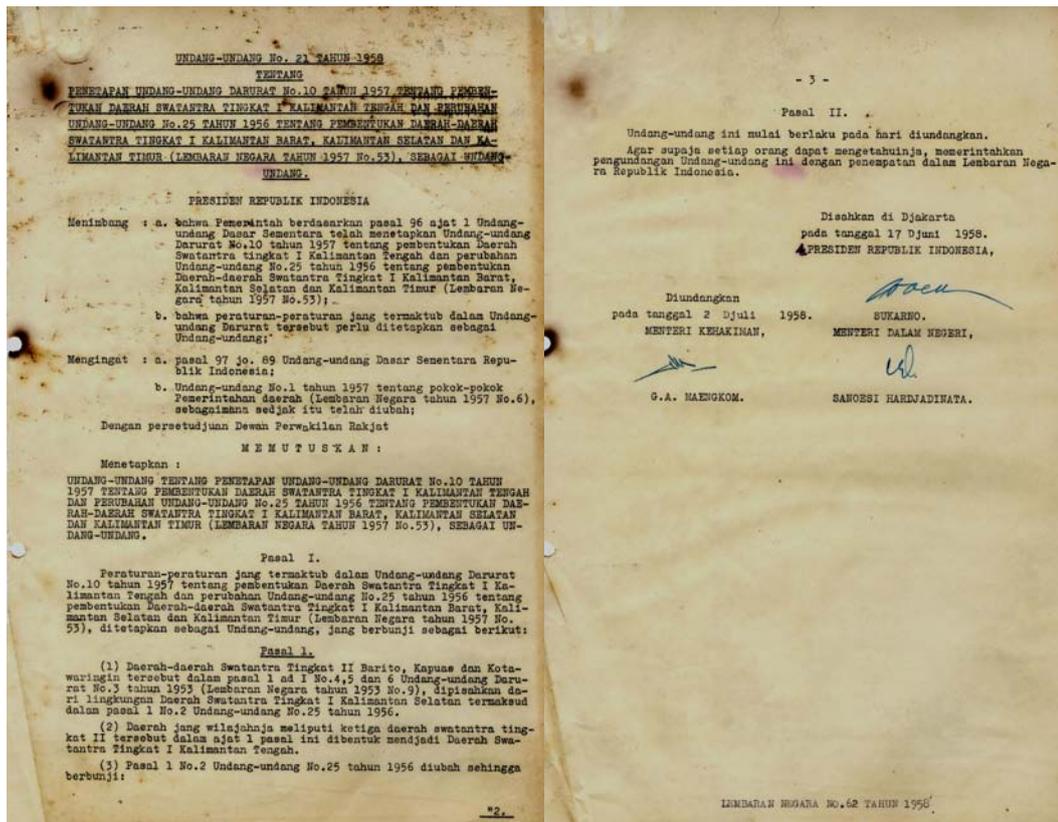
*ANRI: Kempen 570717 LL 3-1*



Rapat raksasa aksi masyarakat Kotawaringin di Sampit, Kabupaten Kotawaringin mendukung pembebasan Irian Barat dari Pemerintahan Belanda.

25 November 1957.

*ANRI: Kempen 571125*



Bagian awal dan akhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah, menjadi Undang-Undang.

17 Juni 1958

*ANRI: Sekretaris Kabinet, Undang-Undang No. 226*



Peletakan rangkaian bunga sebagai tanda penghormatan kepada pahlawan dalam rangka peringatan Kemerdekaan RI ke-13 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

17 Agustus 1958

*ANRI: Kempen 15 / 7*



Penyerahan bendera merah putih oleh inspektur upacara kepada petugas pengibar bendera dalam upacara peringatan Kemerdekaan RI ke-13 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.  
17 Agustus 1958

*ANRI: Kempen 16 / 7*



Pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-13 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

17 Agustus 1958

*ANRI: Kempen 11 / 7*



Jenderal Mustopo berpidato mengajak rakyat di Kuala Kapuas,  
Kalimantan Tengah untuk terus mengobarkan semangat  
merebut kembali Irian Barat dari Kolonial Belanda.

31 Januari 1959

*ANRI: Kempen 590131 LL 1 – 4*



Gubernur Kalimantan Tengah, Tjilik Riwut di Palangka Raya,  
9 Juni 1959

*ANRI: Kempen 590609 LL 14*



Gubernur Kalimantan Tengah Tjilik Riwut  
dan Ibu Tjilik Riwut di Palangka Raya,  
9 Juni 1959

*ANRI: Kempen 590609 LL 13*



Presiden Soekarno menerima cinderamata dari Ibu Tjilik Riwut,  
pada acara kunjungan kenegaraan Presiden  
di Kalimantan Tengah,  
8 September 1959  
*ANRI: Kempen 590908 LL 2-13*



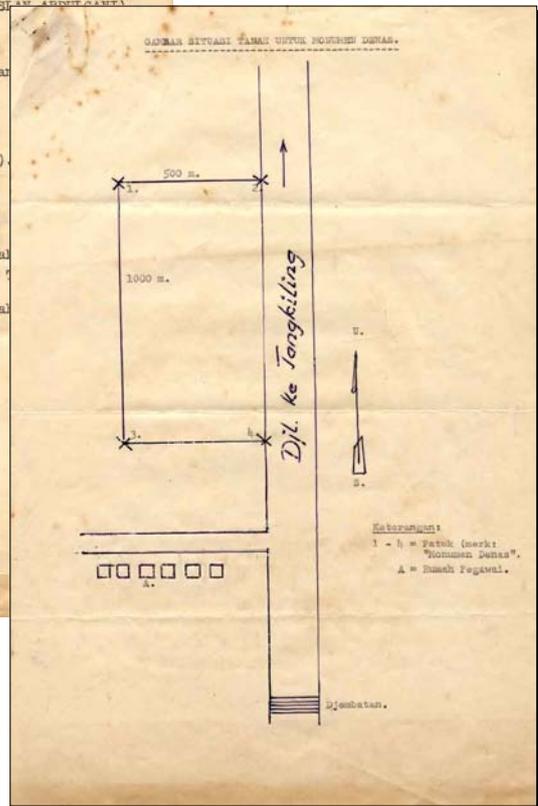
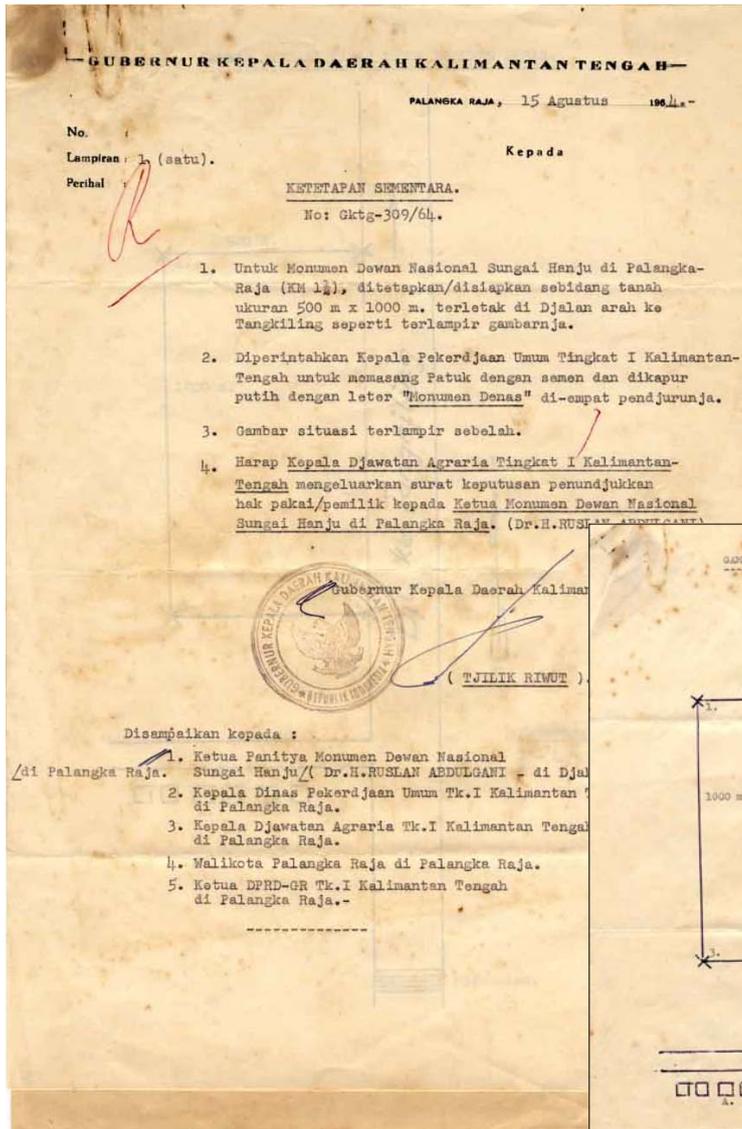
Kunjungan Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani  
ke Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah,  
1963

*ANRI: Kempen 63 – 2623*



Kunjungan Menteri Dalam Negeri, Ipik Gandamana  
ke Kalimantan Tengah dalam rangka menyerahkan  
pemerintahan umum pusat kepada daerah-daerah tingkat I,  
1964

*ANRI: Kempen 64 – 4691*



Ketetapan Sementara Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah No.GKtg-309/64 tentang rencana pembangunan "Monumen Dewan Nasional" Sungai Hanju, di Palangka Raya.

15 Agustus 1964,

*ANRI: Ruslan Abdulgani No.040*



Gubernur Kalimantan Tengah Tjilik Riwut dan Mayor Jendral  
Panggabean di Palangka Raya.

14 September 1965.

*ANRI: Kempen 65 – 12644*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 118 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Djuli 1967 No.Femda. 7/3/30.  
b. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Djuni 1967 No. 005-2-DEPD-GR-67, yang menetapkan Sdr. IR.REINOUT SYLVANUS sebagai tjalon tunggal untuk mendjadi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Membatja kembali : a. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 - Agustus - 1961 No. 317/M tahun 1961 tentang pengangkatan Sdr. IR. REINOUT SYLVANUS tersebut, sebagai Wakil Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;  
b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Nopember 1966 No. U.P. 12/5/1-1546 tentang pengangkatan Sdr.IR. REINOUT SYLVANUS sebagai Pejabat Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pemerintahan dipandang perlu segera mengangkat seorang Kepala Daerah yang difinitif untuk Propinsi Kalimantan Tengah ;  
b. bahwa IR. REINOUT SYLVANUS, sekarang Pejabat Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, memenuhi sjarat-2 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I, sehingga yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Mengingat : a. Undang-2 No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83) ;  
b. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286) ;  
c. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63) ;

MEMTUSKAN : .....

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1967  
tentang Penunjukan Ir. Reinout Sylvanus sebagai Pejabat Kepala  
Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah.

7 Agustus 1967

*ANRI: Sekab, Keppres No. 118*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN,  
KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG  
MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, DAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya serta Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan sebagai pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau sebagai pemekaran Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau sebagai pemekaran Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya sebagai pemekaran Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Barito Timur sebagai pemekaran Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

Bagian awal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002  
tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,  
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung  
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan  
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.  
Berdasarkan Undang-Undang ini maka Provinsi Kalimantan  
Tengah terdiri dari 1 Kota dan 13 Kabupaten.

10 April 2002

*ANRI: BPHN UU 5/2002*

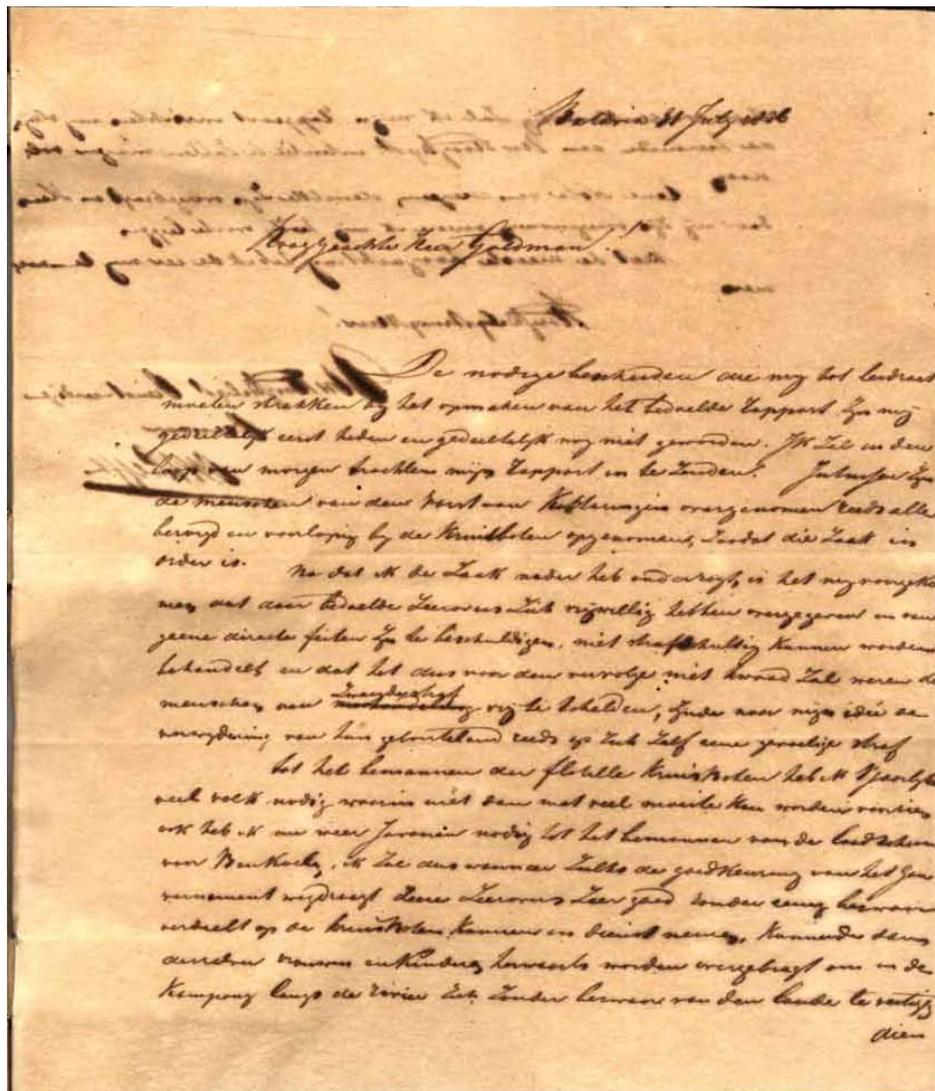


Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  
bersama Ibu Ani Yudhoyono ke Kalimantan Tengah.  
31 Agustus 2006

*ANRI: Buku Indonesia Tanah Airku*

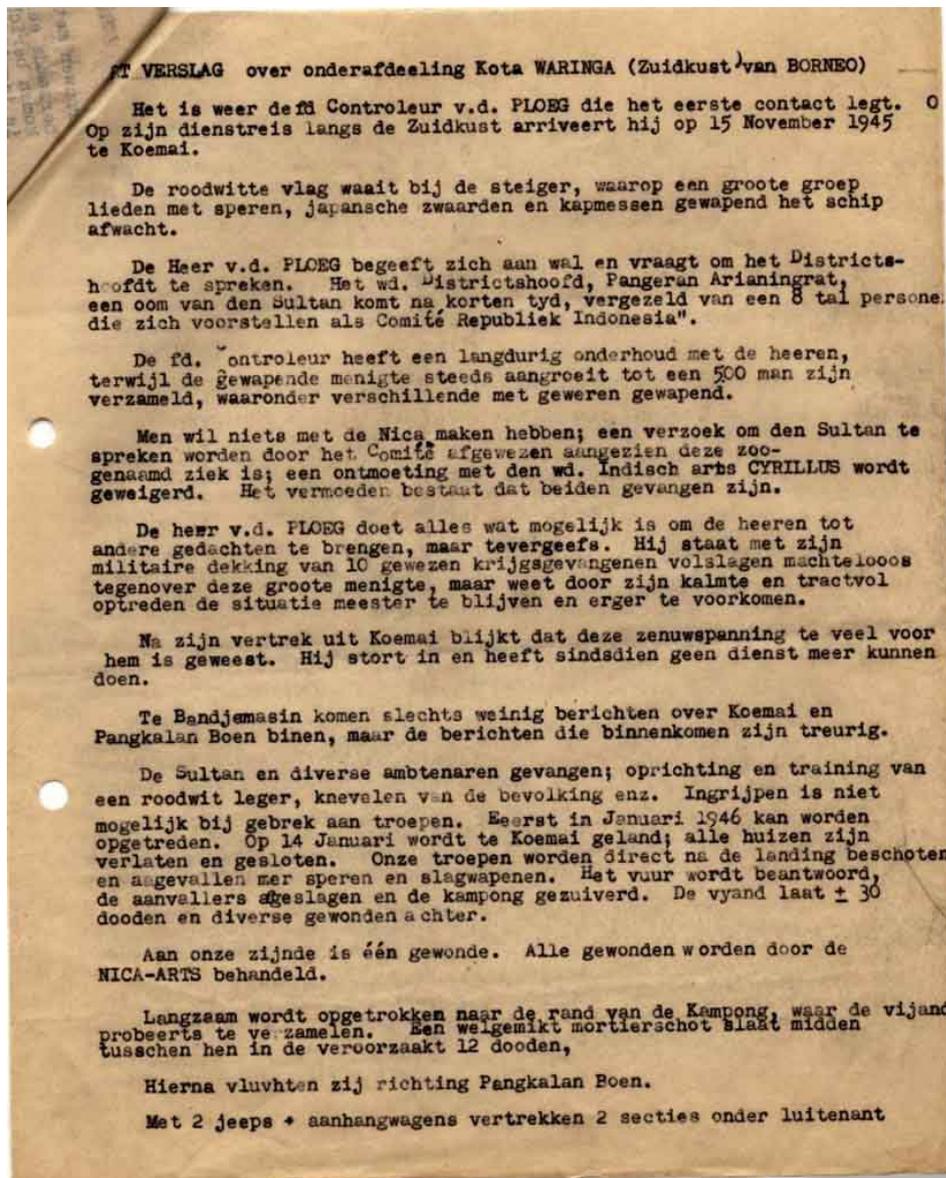
# Pertahanan dan Keamanan





Bagian awal dari laporan perjalanan Sultan Kotawaringin, Pangeran Ratoe bersama Asisten Komisararis Bloem di Sambas antara lain tentang adanya gangguan keamanan laut di wilayah kekuasaan Kesultanan Kotawaringin, 31 Juli 1836.

*ANRI: BZO No. 100/4*



Laporan dari Asisten Residen Kapuas Barito tentang peristiwa aksi militer yang terjadi di Sampit dan Kotawaringin.  
27 Januari 1946.

*ANRI: Algemeene Secretarie No. 1308*

MARKAS DIVISI IV  
ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

Bahagian  S. O. I

0/18-566.

No \_\_\_\_\_  
Hal \_\_\_\_\_  
Pembentukan gerakan rahsia M.P.A. IV di-Koeala Pamboeang.

Keterangan: sdr. Achmad Samoed, ketoes dari gerakan tsb.  
Lamp. \_\_\_\_\_

Pada bl. Januari 1947 waktos saja berada di-Banjermasin saja diserahin soerat kosasa oleh sdr. Abd. Sidik ontok membentok pasook an rahsia A. L. R. I. Pertahanan Kalimantan di-daerah Kw. Pamboeang. Soerat kosasa itoe saja terima dengan soetji hati dan sajapoen berdjandji kepadanja akan merdjondjoeang tinggi segala perintah dari pemimpin saja Letnan Kolonel Djakaria, Divisi IV ALRI di-Toeban.

Pada tanggal 12 Januari 1947 saja poen berangkat kembali ke-Kw. Pamboeang menumpang perahoe Sitti Noer-Sijeh. Saja datang di-Kw. Pamboeang pd. tanggal 25/1-1947 dan pada hari itoe djoega merendjingkan soal instruksi tarasboet dengan kawat2 saja jang soerdjoeangan dan dihadiri 7 orang jang saja taoe betoes pendiriannya. Kesimpoeian dari peroesingan tsb. terbentok anggata2 pengoeroes dari gerakan tsb. anggata2 pengoeroes adalah sbb:-

1. Achmad Samoedi.....ketoes oemoem.
2. Achmad Hartani.....sidi. dan pingsunda
3. Mochammad Arsjad.....Pemimpin tentera.
4. Poerdi.....Ketoes penghoeboeng.
5. Md. Irman.....Ketoes penjelidik.
6. Abd. Radjak.....Pansesahat oemoem.
7. Md. Iko.....Ketoes perlangjapan (T.O.).

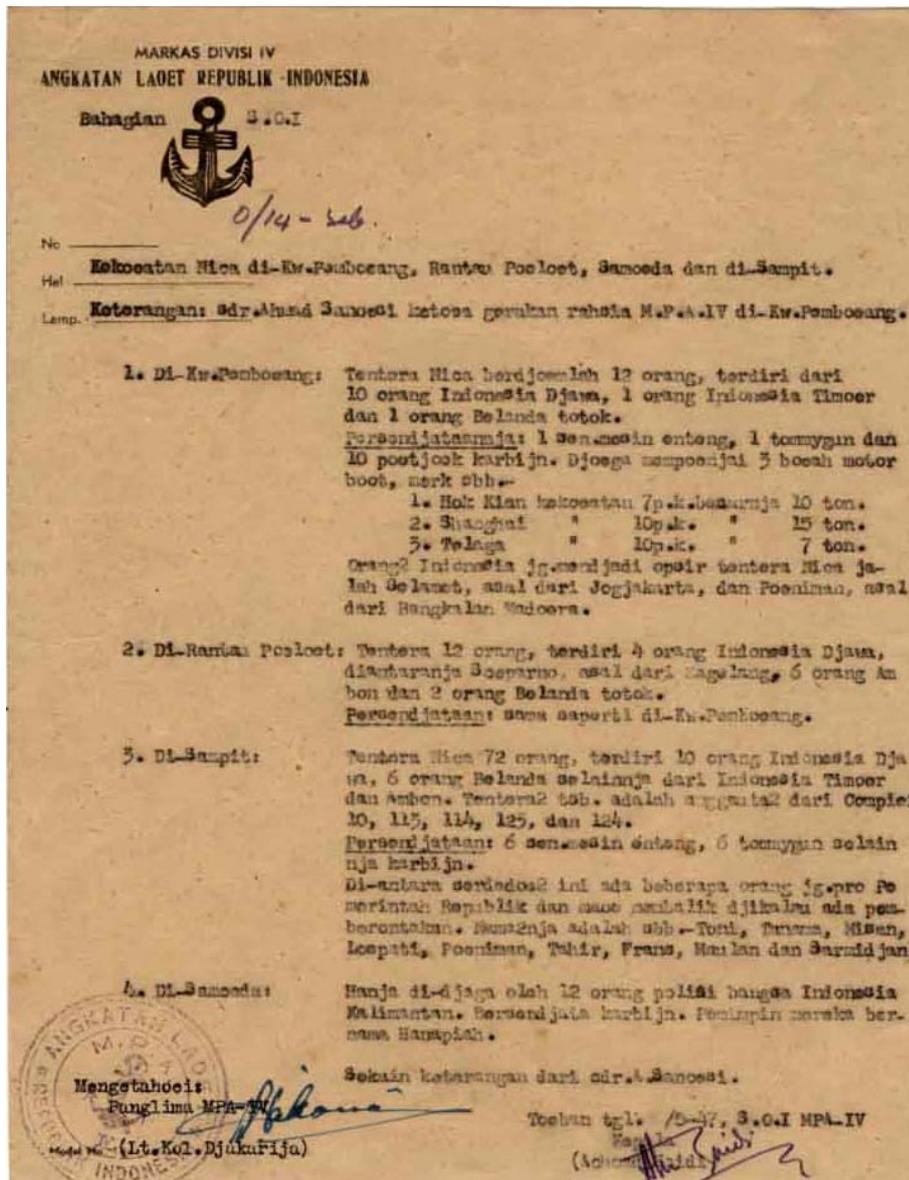
Setelah selesai pemilihan anggata2 pengoeroes ini, maka saja adakan oempah kesetiaan dan pengorbanan. Pada aore harinja saja menberi keterangan soal keswadjiban masing2. Djoega diberi peringatan, ka lau menerima anggata2 baroes, hendaknja di-perhati betoes, djangan sempoi ada palmaan atau boedjoeskan. Hendaknja dengan soeka rela. Pd. tgl. 2/2-47 saja tolae menerima tjabatatan anggata2 dari kepala penghoeboeng. Pd. tgl. 12/2-47 terima lagi segala tjabatatan tentera. Dalam boelan itoe pd. tgl. 16/2-47 terima lagi segala tjabatatan tentera. Dalam boelan itoe djoega persiapan tentera dan muna2 anggata ditangan saja dan pd. tgl. 23/2-47 saja berangkat ke-Samoeda ontok menemoi sdr. A. Sidik, tetapi dia tidak ada. Diwaktos saja menerima soerat kosasa sdr. Abd. Sidik berdjandji selambatnja dalam bl. 5 moesti berangkat borsema2 dengan dia ontok menemoi Panglima MPA-IV di-Toeban. Saja poen kembali ke-Kw. Pamboeang dan pd. tgl. 17-3-47 saja pergi lagi ke-Samoeda ontok berangkat tetapi sdr. tsb. soedah pergi ke-Banjermasin. Dari itoe saja poen mengambil kepoetoesan, berangkat sendiri ke-Toeban.

Mengetahoeti:  
Panglima MPA-IV  
(Lt. Kol. Djakaria)

Toeban tgl. 27/3-47, S. O. I MPA-IV  
(Achmad Samoedi)

Surat dari markas Divisi IV Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) tentang pembentukan organisasi rahasia Markas Pertahanan ALRI ke IV di Pagatan, Sampit, Samoeda dan Koeala Pamboeang.  
10 April 1947.

ANRI: Kementerian Pertahanan No. 794



Laporan Markas Divisi IV Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) tentang kekuatan *Nederlands Indie Civil Administration* (NICA) di kawasan Pembuang, Rantau Pulut, Samuda dan Sampit, Kalimantan Tengah yang seluruhnya berjumlah 108 orang lengkap dengan perseniataannya.  
 Mei 1947.

*ANRI: Kementerian Pertahanan No. 1281*

- 2 -

Saja yakin, bahwa Kodam XI/TB dapat menunaikan tugasnya seperti telah saja kemukakan tadi, demi kepentingan kita bersama dan demi tertjapainya tjita-tjita kita bersama, jaitu masyarakat jang adil dan makmur, berdasarkan PANTJASILA sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sebagai penutup, saja mengutjapkan selamat dan bahagia kepada segenap warga Kodam XI/Tambun Bungai berhubung dengan ulang Tahunnja jang ke-3 ini.

Sekian.

DJAKARTA, 1 DJ  
PEJABAT PRESIDEN RA  
ttd  
DJUAN

ns. 948/61.  
AMANAT TERTULIS PJM PD. PRESIDEN DJUANDA PADA PERINGATAN  
ULANG TAHUN KE-3 KODAM XI/TAMBUN BUNGAI (KALIMANTAN TENGAH).

Para Perwira, Bintara, Tamtama dan seluruh warga KODAM XI/TB.

Saja merasa gembira dapat memenuhi permintaan Pangdam XI/TB untuk menjampaikan sambutan berhubung dengan Ulang Tahun ke-3 Kodam XI/TB.

Djika kita sedjenak menoleh kebelakang, 3 tahun jang lalu, maka pada waktu itu kita ada dalam keadaan jang serba kritis. Kita semua pada saat itu dihadapkan pada bahaya perpetjahan, berhubung dengan melstuanja peristiwa pemberontakan apa jang dinamakan PRRI/Permesta. Dalam rangka usaha mempertahankan keutuhan kedaulatan dan wilayah Nusa dan Bangsa kita jang meliputi daerah dari Sabang, sampai ke Merauke, antara lain telah dibentuk Komando Daerah Militer XI/TB.

Kodam XI/Tambunan Bungai inilah sekarang telah mentjapai usianja 3 tahun.

Sedjak waktu pembentukannja, keadaan keamanan diwilajah Republik Indonesia umumnja dan wilajah Kalimantan Tengah khususnya jang mandjadi daerah tanggung-djawab Kodam XI/Tambun Bungai tersebut, nampak maju dengan pesat.

Daerah Kalimantan Tengah kini nampak sedang mentjurahkan perhatian sepenuhnya pada usaha membangun daerahnja, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dengan rentjana pembangunan semesta, berdasarkan Manipol/Uedek dan Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara. Dalam hubungan ini Kodam XI/TB dapat menjumbangkan dharma baktinja, tidak saja sebagai kesatuan TNI jang bertugas pokok dibidang pertahanan/keamanan, tetapi djuga sebagai golongan karya jang harus ikut serta bergotong-rojong dengan segala lapisan masyarakat, dan ikut bertanggung-djawab pula atas pelaksanaan rentjana pembangunan semesta kita, menudju ke tertjapainja masyarakat sosialis Indonesia, masyarakat jang adil dan makmur.

Pada hakekatnja, unsur pembangunan dan unsur pertahanan/keamanan tidak dapat dipisah-pisahkan satu dari lainnja.

Karena letak geografis daerah Kalimantan Tengah, maka dalam menghadapi masalah pembangunan setempat djuga perlu dihadapi faktor pertahanan/keamanan, jang meminta perhatian dari Angkatan Perang umumnja dan dari Kodam XI/TB khususnya. Sistim pertahanan Nasional kita, mengandung 2 unsur, jaitu unsur pasukan dan unsur wilajah dengan isinja.

Adalah tugas Kodam XI/TB untuk mengusahakan agar 2 unsur tersebut terwujud dalam keadaan dan kesiapan jang dapat memenuhi syarat sistim pertahanan nasional kita.

Saja yakin.

Amanat tertulis Pejabat Presiden Djuanda pada peringatan Ulang Tahun ke-3 Komando Daerah Militer (Kodam) XI/ Tambun Bungai Kalimantan Tengah agar mencurahkan perhatian sepenuhnya pada usaha membangun daerahnya sesuai kebijaksanaan pemerintah dengan rencana Pembangunan Semesta berdasarkan Manifestasi Politik.

1 Juli 1961

*ANRI: Pidato Presiden No. 313*

R A H A S I A

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET DWIKORA

REPUBLIK INDONESIA

No. 55/C/Instr./1965.

PRESIDIUM KABINET DWIKORA R.I.

- Menimbang** : bahwa perlu diketahui persediaan barang yang ada didalam gudang baik milik Negara maupun milik Swasta yang berada didaerah kekuasaan Penguasa Pelabuhan, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan perekoncian dan keuangan lebih lanjut.
- Mengingat** : Undang-undang No. 11 tahun 1965;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 109/MDN/SK/1965;

M E M U T U S K A N :

MENGINSTRUKSIAN:

- Portam** : Kepada Penguasa Pelabuhan di seluruh Indonesia untuk dengan serentah mengadakan penelitian keadaan persediaan barang yang ada digudang baik milik negara maupun milik Swasta yang berada didaerah kekuasaan Penguasa Pelabuhan setempat.
- Kehus** : Melaporkan hasil penelitian punt Portam kepada Presidium Kabinet Dwikora R.I. selambat-lambatnya pada tanggal 4 Desember 1965;
- Ketip** : Instruksi supaya dilaksanakan.

SALINAN instruksi ini disampaikan kepada :

1. J.M. Wakil Perdana Menteri I,
2. J.M. Wakil Perdana Menteri III,
3. J.M. Menko Kompartemen Distribusi,
4. J.M. Menko Kompartemen Macitin,
5. J.M. Menteri Panglima Angkatan Laut,
6. J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/  
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri,
7. J.M. Menteri Dalam Negeri,
8. J.M. Menteri/Sekretaris Negara.

Djakarta, 23 Nopember 1965.

J.M. PRESIDIUM KABINET DWIKORA R.I.  
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan II,

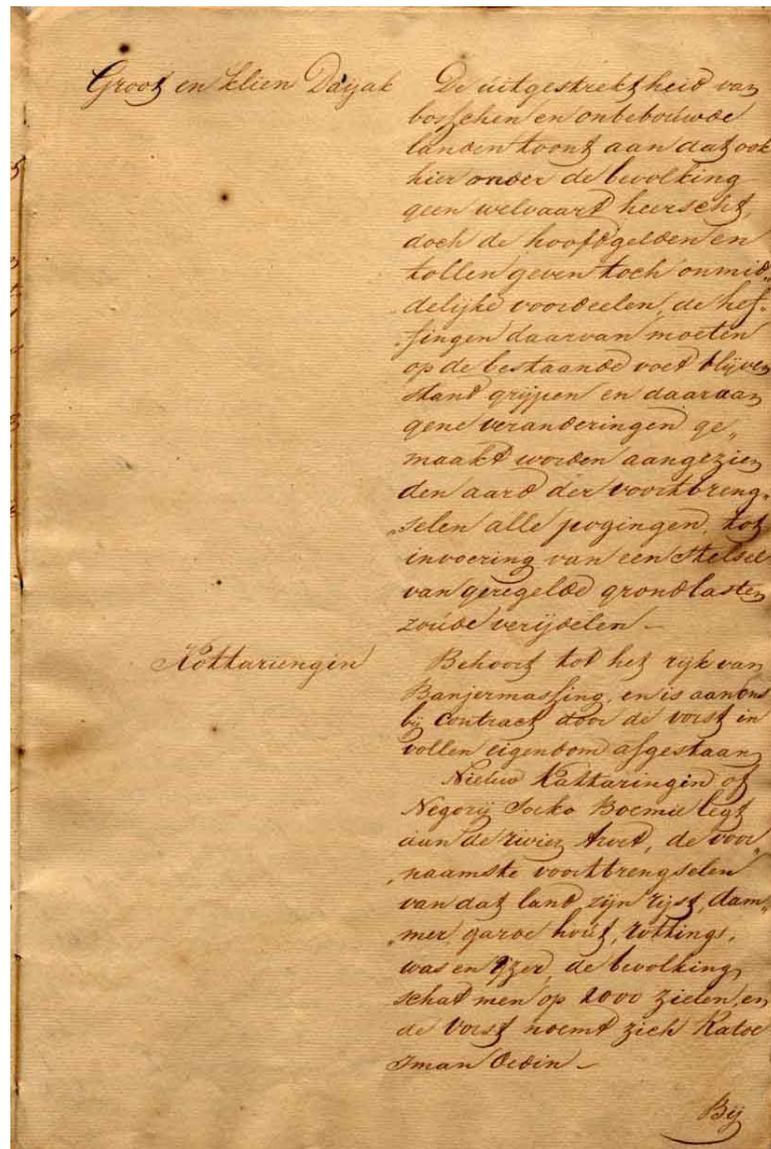


Instruksi Presidium Kabinet Dwikora kepada Penguasa Pelabuhan seluruh Indonesia untuk melakukan peneltian persediaan barang di gudang baik milik negara maupun swasta yang berada di bawah pengawasan Penguasa Pelabuhan.

23 November 1965.

*ANRI: Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan No. 480*

# Perekonomian



Catatan dari *Opperhoofd Zuid en Oostkust van Borneo*, yang menjelaskan tentang wilayah Kotawaringin yang terletak di Hulu Sungai Aroet dengan sebutan Negeri Soeka Boemi memiliki hasil bumi terpenting seperti beras, damar, kayu, rotan, pohon garu dan besi; dengan jumlah penduduk 2.000 orang dengan raja bernama Ratoe Iman Oedin, 1845.

*ANRI: BZO No. 136/18*



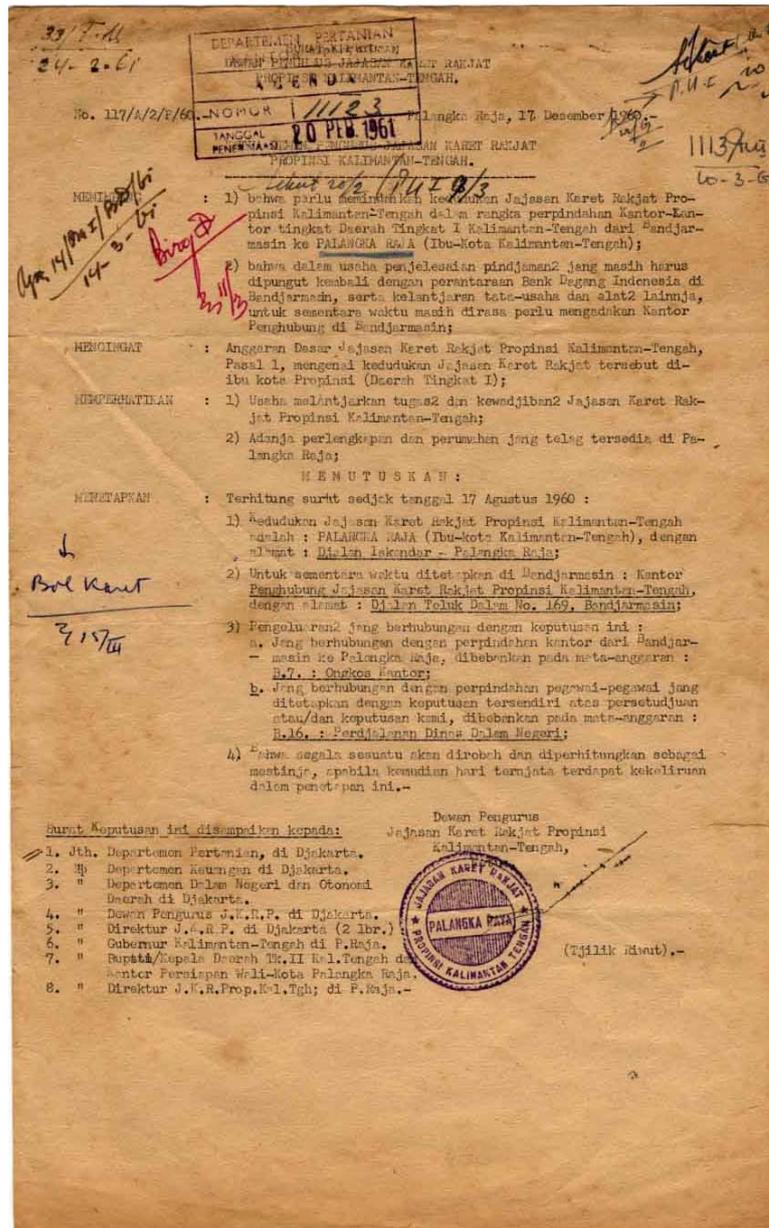
Suasana pasar terapung di sungai Barito.  
1920  
*ANRI: KIT 372 /74*



Pengangkutan hasil bumi rotan ke kapal di pelabuhan Sampit,  
Kalimantan Tengah.

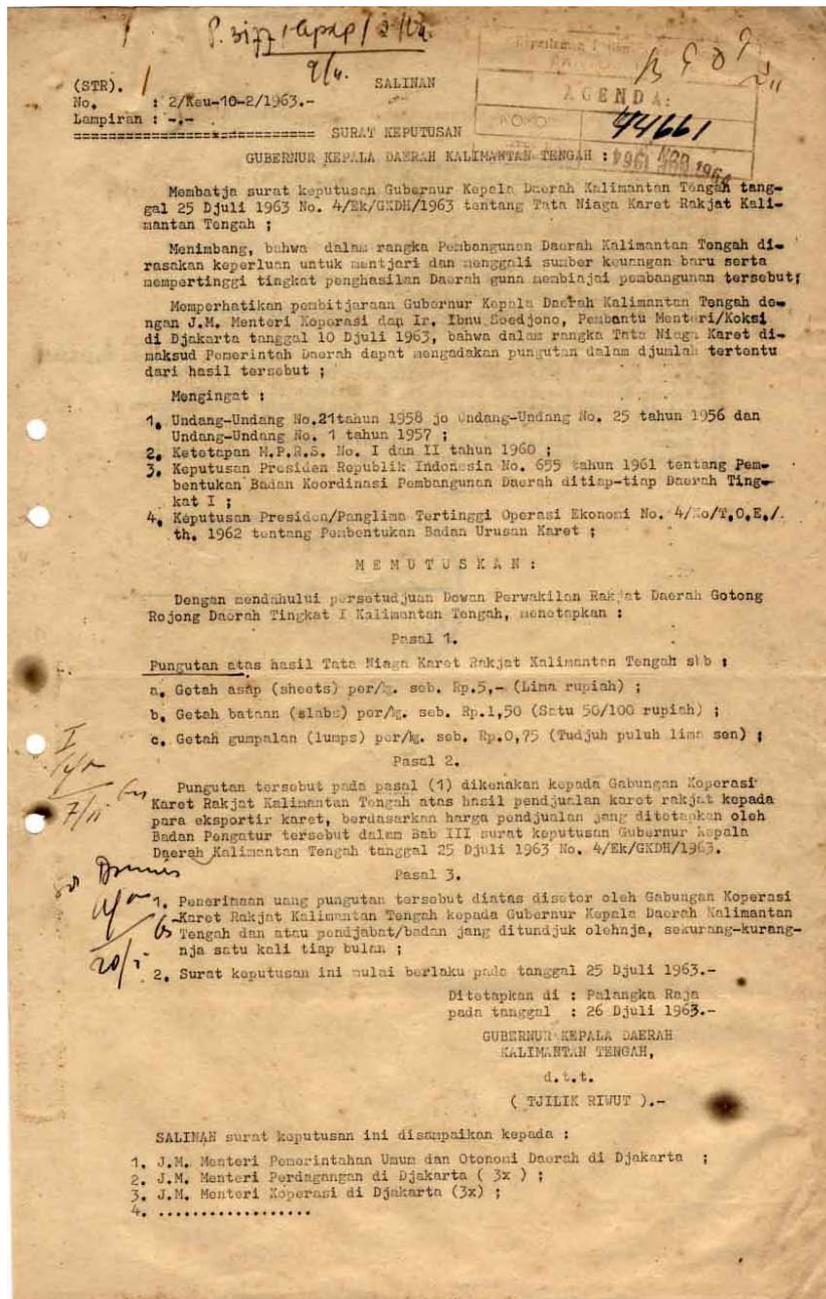
15 Maret 1949

*ANRI: Kempen 90315 LL 3 – 1*



Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Karet Rakyat  
 Propinsi Kalimantan Tengah No. 117/A/2/P/60 tentang  
 Kedudukan Yayasan Karet Rakyat Propinsi Kalimantan Tengah  
 di Palangka Raya  
 17 Desember 1960

*ANRI: Kementerian Pertanian No. 18*



Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah  
No. 4/EK/GKDH/1963 tentang tata niaga karet rakyat di  
Kalimantan Tengah.

26 Juli 1963.

*ANRI: Kementerian Pertanian No.71*

Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani meninjau pasar ikan  
di Palangka Raya.

1963

*ANRI: Kempen 63 – 2009*



Suasana pasar ikan di Palangka Raya.  
1964

*ANRI: Kempen 64 – 12742*

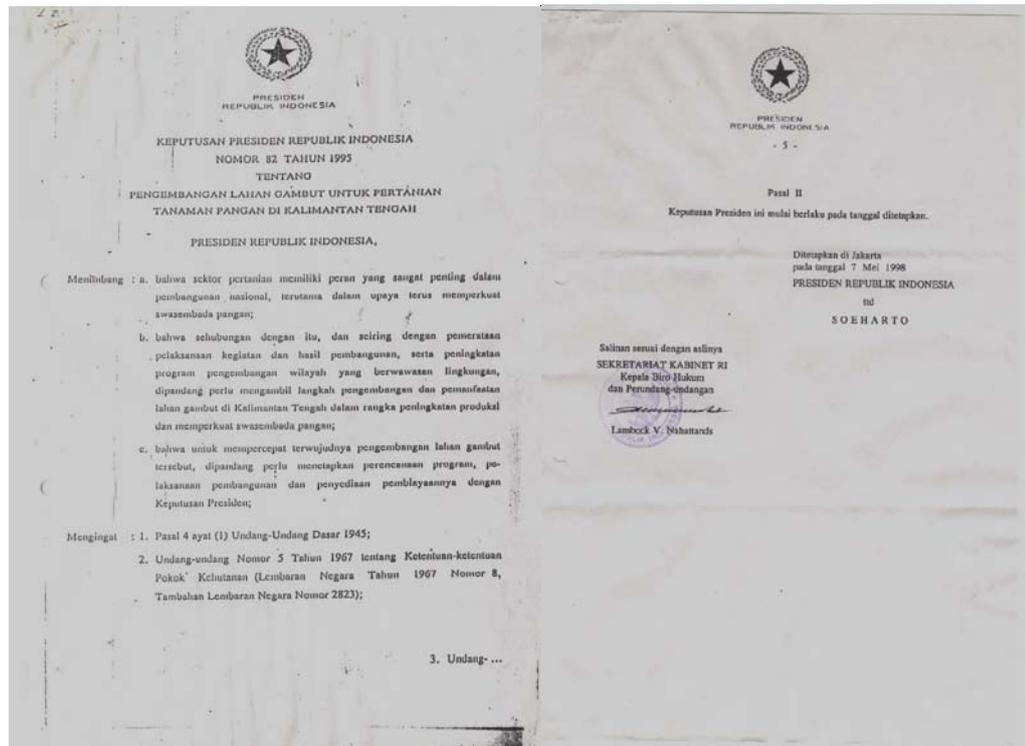
Ikan sungai hasil tangkapan seorang penduduk di Palangka  
Raya.  
1965

*ANRI: Kempen 65 – 12744*



Suasana jual beli di pasar Palangka Raya.  
1965

*ANRI: Kempen 65 – 12745*



Bagian awal dan akhir dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.

26 Desember 1995

*ANRI: Badan Pertanahan Nasional No.109*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 1 Mei 1969.

Nomor : B. - 35 /PRES/5/1969  
Sifat : Segera.  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Yuling Timber  
Company Limited jg. bekerdja  
sama dg. PT. Bina Harapan  
Company.

Kepada Jth. ;  
Sdr. Menteri Pertanian  
di  
DJAKARTA.

Selubungan dengan permohonan dari Yuling Timber Company Limited jang bekerdja sama dengan PT. Bina Harapan Company untuk berusaha dalam bidang kehutanan/perkajuan di Kalimantan Tengah, maka setelah mendengar saran/pertimbangan dari Panitia Tehnis Penanaman Modal dengan suratnya No. B-278/PTPM/IV/69 tanggal 24 - April - 1969, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan tersebut, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal Asing.

Adapun mengenai pelaksanaan selandjunja, agar Saudara mengikuti dan memberikan petunjuk-petunjuk jang diperlukan guna kelanjutan usaha tersebut.

Demikian untuk diketahui dan guna bahan seperlunja.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
DJENDERAL TNI

Tembusan :  
1. Menteri Dalam Negeri  
2. Ketua Panitia Tehnis Penanaman Modal  
3. Dir.,Djen. Kehutanan Dep. Pertanian  
4. Gub./KDH Kalimantan Tengah.

Surat Persetujuan Penanaman Modal No. 208/Kpts/Um/6/1969  
tentang Izin Investasi di bidang kehutanan kepada P.T. Bina  
Harapan Company dan Yuling Timber Company Limited.

13 Juni 1969

*ANRI: Asmin/Setneg No. 257*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Juli 1996

Nomor : B- 465/Pres/ 7/1996  
Sifat : Segera  
Lampiran : —  
Perihal : Persetujuan penanaman modal  
asing

Kepada Yth.  
Sdr. Menteri Negara Penggerak Dana  
Investasi/Ketua BKPM  
di - J a k a r t a

Setelah membaca surat Saudara Menteri Nomor: 533/A.1/1996 tanggal 5 Juni 1996 perihal di atas, dengan ini kami menyetujui permohonan penanaman modal asing antara PT Salawati Makmur dan PT Rimba Harapan Sakti - Indonesia bekerja sama dengan Kerry Holdings (Indonesia) Limited - British Virgin Islands yang akan berusaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah (harus sesuai dengan RUTR/RDTR daerah setempat), dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya Kantor Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/BKPM bersama Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Pertanian supaya memberi petunjuk-petunjuk yang diperlukan guna kelancaran usaha tersebut dan mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *Soeharto*  
*Soeharto*  
SOEHARTO

Tembusan Yth. ;

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan.
8. Direktur Jenderal Perkebunan.

Surat persetujuan penanaman modal antara PT Salawati Makmur dan PT Rimba Harapan Sakti bekerja sama dengan Kerry Holding di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya menjadi minyak sawit di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

2 Juli 1996,

*ANRI: Asmin/Setneg No. 5133*

# Pendidikan



Guru dan murid Sekolah Dasar untuk pribumi di Deyah,  
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

1920

*ANRI: KIT 320 / 46*

Sekolah pendidikan guru agama di Baguh, Seruyan,  
Kalimantan Tengah.  
1920  
*ANRI: KIT 319/56*





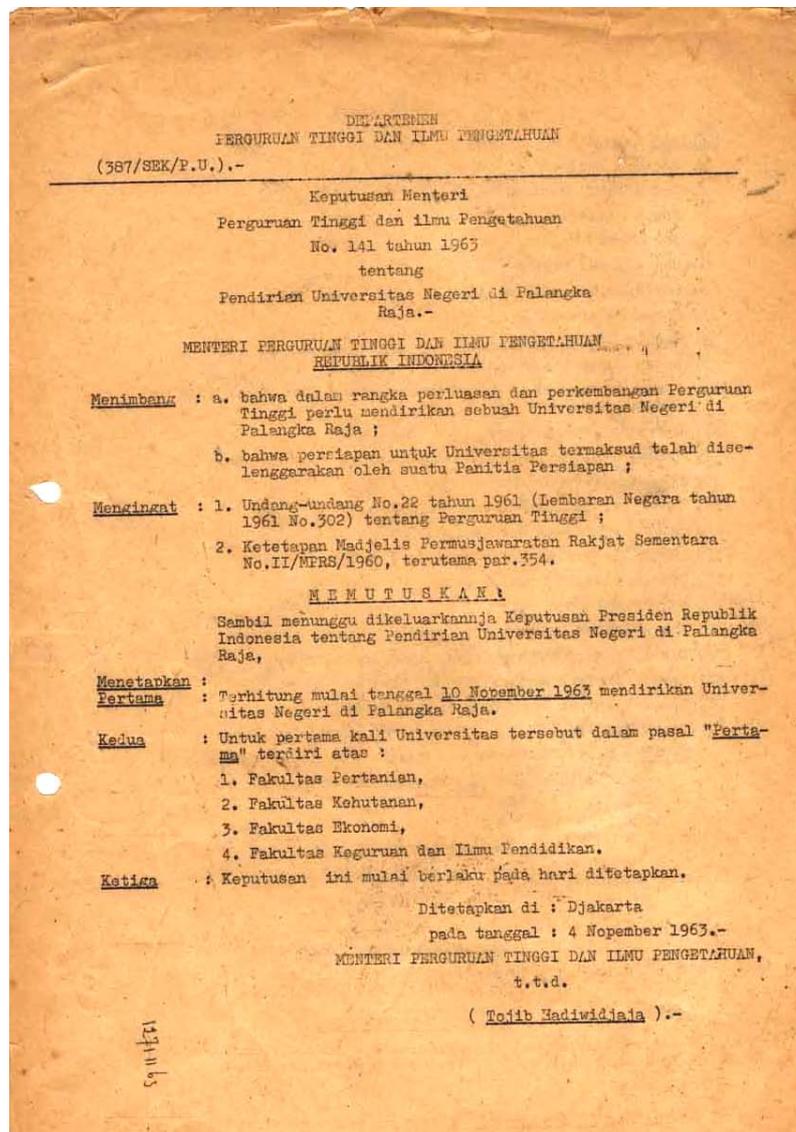
Gedung SMP Negeri Mangkusari di Muara Teweh,  
Kalimantan Tengah.  
Juni 1958.

*ANRI: Kempen 441 / B*

Peletakan batu pertama pembangunan Kantor Pendidikan,  
Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) di Kota Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah.

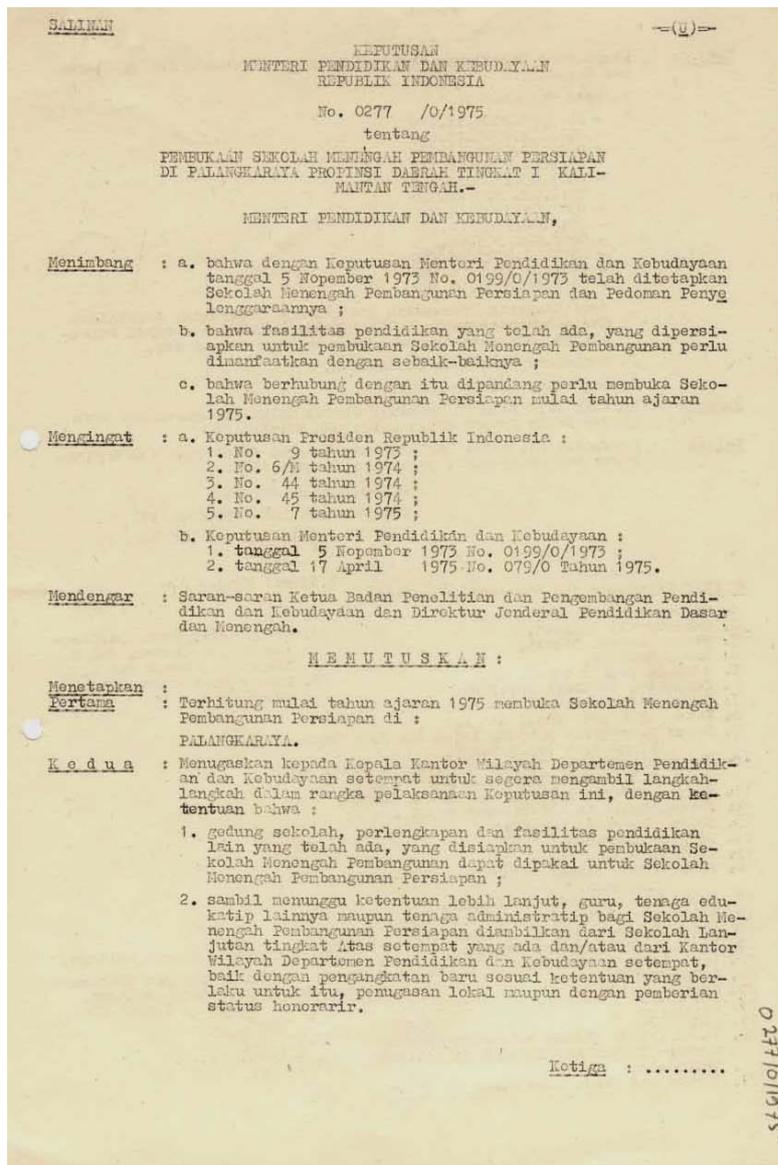
17 Agustus 1958

*ANRI: Kempen 12 / 9*



Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan  
Nomor 141 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri  
di Palangka Raya.  
4 Nopember 1963

*ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1963*



Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0277/0/1975 tentang Pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di Palangka Raya, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

27 Nopember 1975

*ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1975*

-SALINAN-

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 0630/0/1977

-(sms)-

tentang  
Pembukaan SMA Negeri Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur/  
Kod. Administratif Katingan Propinsi Daerah Tingkat I Kali-  
mantan Tengah.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menbaca** : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No.112/L/I/1977, Hal : Pembukaan 07 Sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegerian 50 Sekolah Swasta/Fonda.
- Menimbang** : a. bahwa dengan DIP tahun 1976/1977 telah dibangun 1 unit gedung yang diperuntukkan bagi SMA Negeri Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur/  
Kod. Administratif Katingan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;  
b. bahwa adanya anjino yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya,  
sehingga calon-calon yang masuk sekolah tersebut cukup banyak ;  
c. bahwa syarat untuk pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi ;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu membuka SMA Negeri Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur/Kod. Adminis-  
tratif Katingan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Meningat** : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
1. No. 73/N tahun 1972 ;  
2. No. 9 tahun 1973 ;  
3. No. 6/H tahun 1974 ;  
4. No. 44 tahun 1974 ;  
5. No. 45 tahun 1974 ;  
6. No. 12 tahun 1977 ;  
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;  
2. tanggal 9 Juli 1977 No.0255/0/1977.
- Meningat pula** : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No.504/I/MENPAN/4/77 dan tanggal 29 Oktober 1977 No.B.1278/I/MENPAN/10/77.

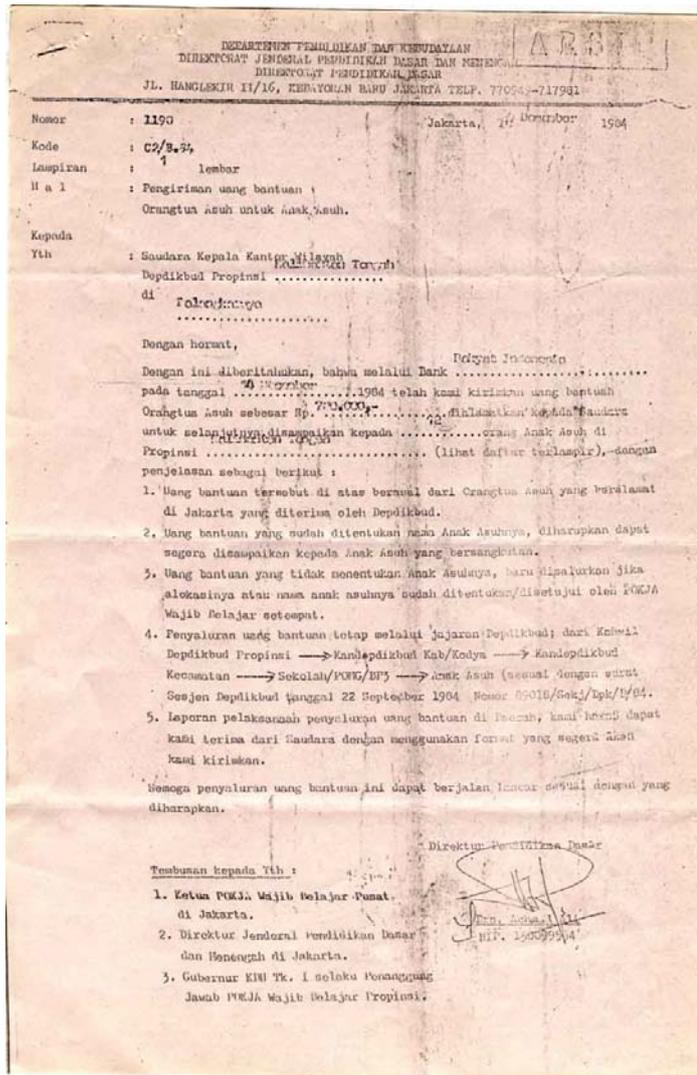
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membuka :  
SMA Negeri Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur/Kod. Administratif  
Katingan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Kedua** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebu-  
dayaan Propinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pembukaan sekolah  
tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.
- Ketiga** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata  
anggaran :
- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 09.1.2.02.1038.23.01.14.110 | 09.1.2.02.1038.23.01.14.232  |
| 09.1.2.02.1038.23.01.14.120 | 09.1.2.02.1038.23.01.14.233  |
| 09.1.2.02.1038.23.01.14.140 | 09.1.2.02.1038.23.01.14.250  |
| 09.1.2.02.1038.23.01.14.210 | 09.1.2.02.1038.23.01.14.340  |
| 09.1.2.02.1038.23.01.14.220 | 09.1.2.02.1038.23.01.14.360, |
| 09.1.2.02.1038.23.01.14.231 |                              |
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang  
selaras dengan itu.

Kesat : ...

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  
Indonesia No. 0630/0/1977 tentang pembukaan SMA Negeri  
Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur/Kodya Administratif  
Katingan Propinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah.  
29 Desember 1977

*ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1977*



Surat dari Direktur Pendidikan Dasar kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah tentang pengiriman uang bantuan orang tua asuh untuk anak asuh.

Desember 1984

*ANRI: Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah 429*

**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN SOSIAL  
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

JL. D.I. PANJAITAN TELP. 21582 PALANGKA RAYA

Nomor : 1105/NKS.1/12/86.  
Lampiran : 1(satu) berkas.  
Perihal : Data Anak Asuh dan Tanda  
Bukti Penerimaan Bantuan  
dari Keluarga Bapak Umar  
Wirahadikusumah tahun  
1986/1987.

Dengan hormat,  
Bersama ini terlampir kepada Bapak Dirjen, perihal kami laporkan kepada Bapak ini dari Keluarga Bapak Asuh sejumlah 20 (dua puluh) Palangka Raya.  
Data Anak Asuh dan rana Pendidikan ini terlampir foto anak masih kurang lengkap menyusul.  
Demikian laporan yang mohon petunjuk lebih lanjut.

DAFTAR NAMA ANAK ASUH DALAM RANGKA WAJIB BELAJAR  
YANG TELAH DIBERI BANTUAN DI DAERAH  
KOTAMADYA PALANGKA RAYA.

NO.	FOTO	NAMA TGL LAHIR/No. IKKOD	ALAMAT	SEKOLAH /KELAS	ORANG TUA ANAK	PEMBERI BANTUAN (ORANG TUA ASUH)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.		Siswati 19.10-1972 1/3AA/3BS	Kelurahan Tbg.Tehai	ISDI Tbg.Tehai 1/Kls VI	Jumat	Kel.Bapak Umar Wirahadikusumah oleh Kan- hadikusumah Jl.Mer-ivil Depaco Prop.Kal- No.6 Jakarta itang pada tanggal 25 12peperber 1986.	
1.2.		Suwaris 19-7-1974 2/3AA/3BS		ISDI Tbg.Tehai 1/Kls VI	Sukirman	-ada-	-ada-
1.3.		Masituti 22-7-1972 3/3AA/3BS		ISDI Tbg.Tehai 1/Kls VI	Sihel	-ada-	-ada-
1.4.		Muliati 5-1-1973 4/3AA/3BS		ISDI Tbg.Tehai 1/Kls VI	Sidion	-ada-	-ada-

Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial  
Propinsi Kalimantan Tengah,  
*(Signature)*  
\* **Arifin Sindilingsa, SH.** \*  
NIP. 170004916.

Tembusan disampaikan kepada:  
Yth.1.Bapak Umar Wirahadikusumah Jl.Merdeka Selatan  
No.6 di = **JAKARTA**  
2)Bapak Gubernur Kepala Daerah Tkt.I Propinsi Kalimantan  
Tengah di = **PALANGKA RAYA**  
3. A r s i p.

Surat dari Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Kalimantan Tengah, kepada Direktur Jenderal Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial RI tentang data anak asuh dan tanda bukti penerimaan bantuan dari keluarga bapak Umar Wirahadikusumah tahun 1986-1987.

15 Desember 1986

*ANRI: Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah 492*

- 2 -

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya dengan surat tanggal 17 Oktober 1987 No. 3934/Kep. VII/O.1987 ;

2. Hasil Rapat Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 30 - 31 Oktober 1987 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 pertama : Mengubah bentuk dan nama Akademi Manajemen Perusahaan Sampit di Sampit yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kotawaringin Timur di Sampit menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit.

K e d u a : Meratakan bahwa Akademi Manajemen Perusahaan Sampit di Sampit ditutup.



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 087 / O / 1988  
tentang  
PERUBAHAN BENTUK DAN NAMA AKADEMI MANAJEMEN PERUSAHAAN SAMPIT DI SAMPIT  
MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SAMPIT  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Nopember 1987 No. 985/DA/T/1987, Perihal : Mohon persetujuan dan penerbitan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang status perguruan tinggi swasta.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyuntunan, dipandang perlu merubah bentuk dan nama Akademi Manajemen Perusahaan Sampit di Sampit yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kotawaringin Sampit di Sampit menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit ;

b. bahwa perubahan bentuk dan nama tersebut pada sub a di atas, merupakan penyelesaian/penyempurnaan antara nama, bidang ilmu, kurikulum dan silabus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit di Sampit.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;

2. Peraturan Pemerintah :  
 a. No. 23 Tahun 1959 ;  
 b. No. 14 Tahun 1965 ;  
 c. No. 5 Tahun 1980 ;  
 d. No. 27 Tahun 1981 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
 a. No. 44 Tahun 1974 ;  
 b. No. 45/M Tahun 1983 ;  
 c. No. 15 Tahun 1984 ;  
 d. No. 138/M Tahun 1985 ;  
 e. No. 226/M Tahun 1986 ;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966 ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
 a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;  
 b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/O/1980 ;  
 c. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/O/1981 ;  
 d. tanggal 19 Februari 1982 No. 052/O/1982 ;  
 e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/O/1982 ;  
 f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/O/1982 ;  
 g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/O/1982 ;  
 h. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;  
 i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/O/1983 ;  
 j. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984 ;  
 k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/O/1984 ;  
 l. tanggal 27 April 1985 No. 0200/P/1985 ;  
 m. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;

6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967.

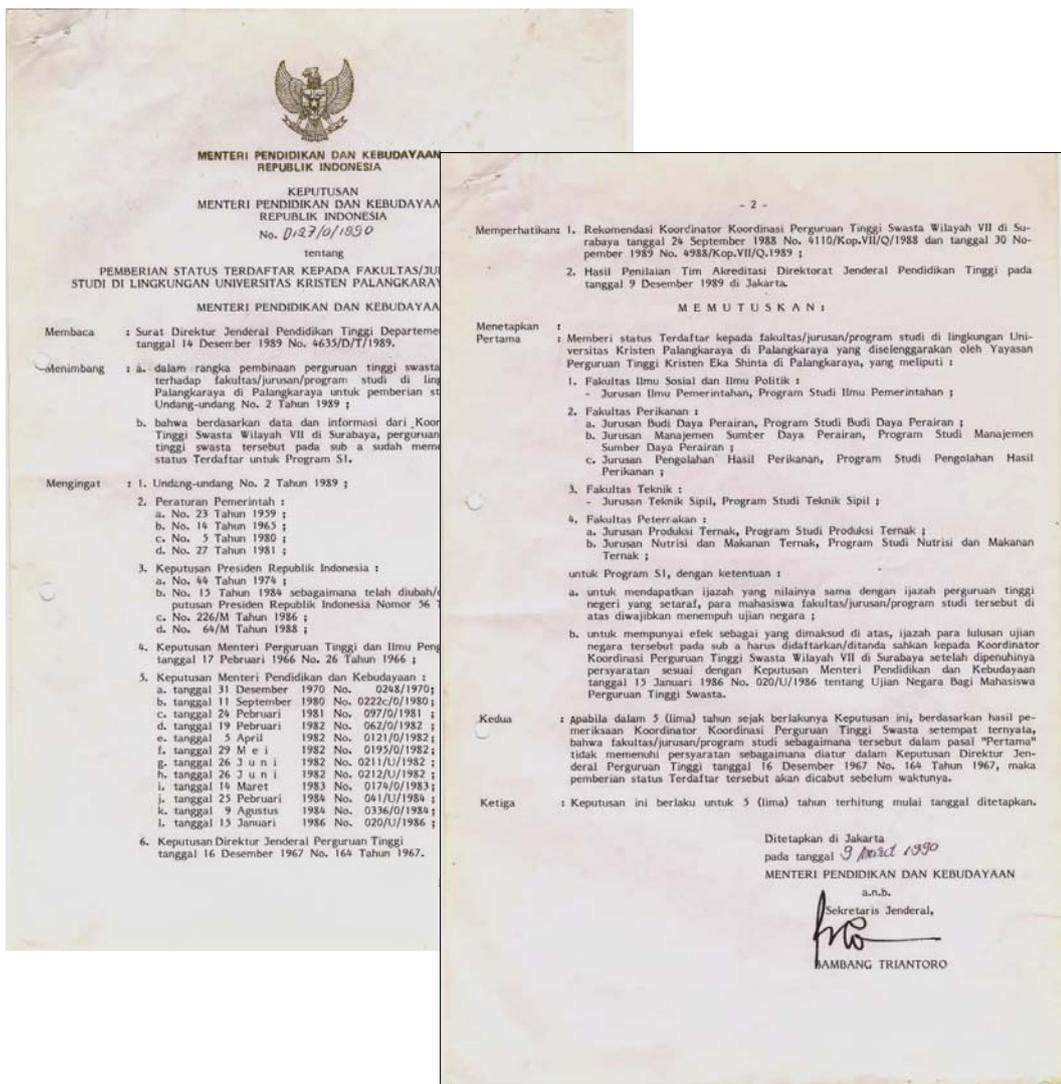
Memperhatikan : .....

diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

ku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 FEBRUARI 1988  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
a.n.b.  
Sekretaris Jenderal,  
  
BAMBANG TRIANDONO

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 087/0/1988 tentang Perubahan Bentuk dan Nama Akademi Manajemen Perusahaan Sampit menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit.  
15 Februari 1988  
*ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1988*



Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0127/0/1990 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Kristen Palangka Raya.

9 Maret 1990

*ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1990*

# Kesenian dan Kebudayaan



Tiga orang suku Dayak dari Hulu Sungai Katingan,  
Kalimantan Tengah,  
1920  
*ANRI: KIT 336 / 64*

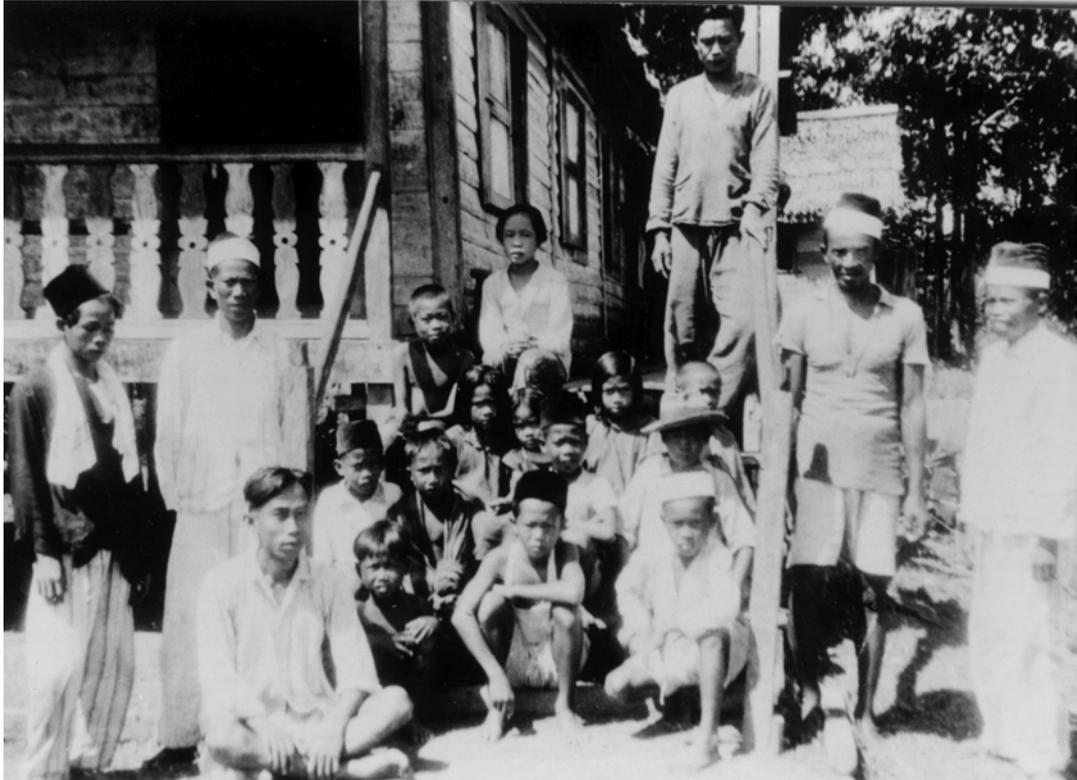
Keranjang gendong untuk anak  
yang digunakan oleh Suku Dayak di Kalimantan Tengah.  
1920  
*ANRI: KIT 442 /12*

Profil Perempuan Dayak Kayan dengan peralatan pertanian  
di Kalimantan Tengah.

1920

*ANRI: KIT 442 / 66*

Profil istri kepala Suku Dayak di Kalimantan Tengah.  
1920  
*ANRI: KIT 443 / 28*



Rumah tinggal keluarga Sultan Kotawaringin di Kotawaringin,  
Kalimantan Tengah,  
1920

*ANRI: KIT 445 / 80*



Rumah Kepala Suku Dayak Kayan Kwin Irang,  
Kalimantan Tengah.

1920

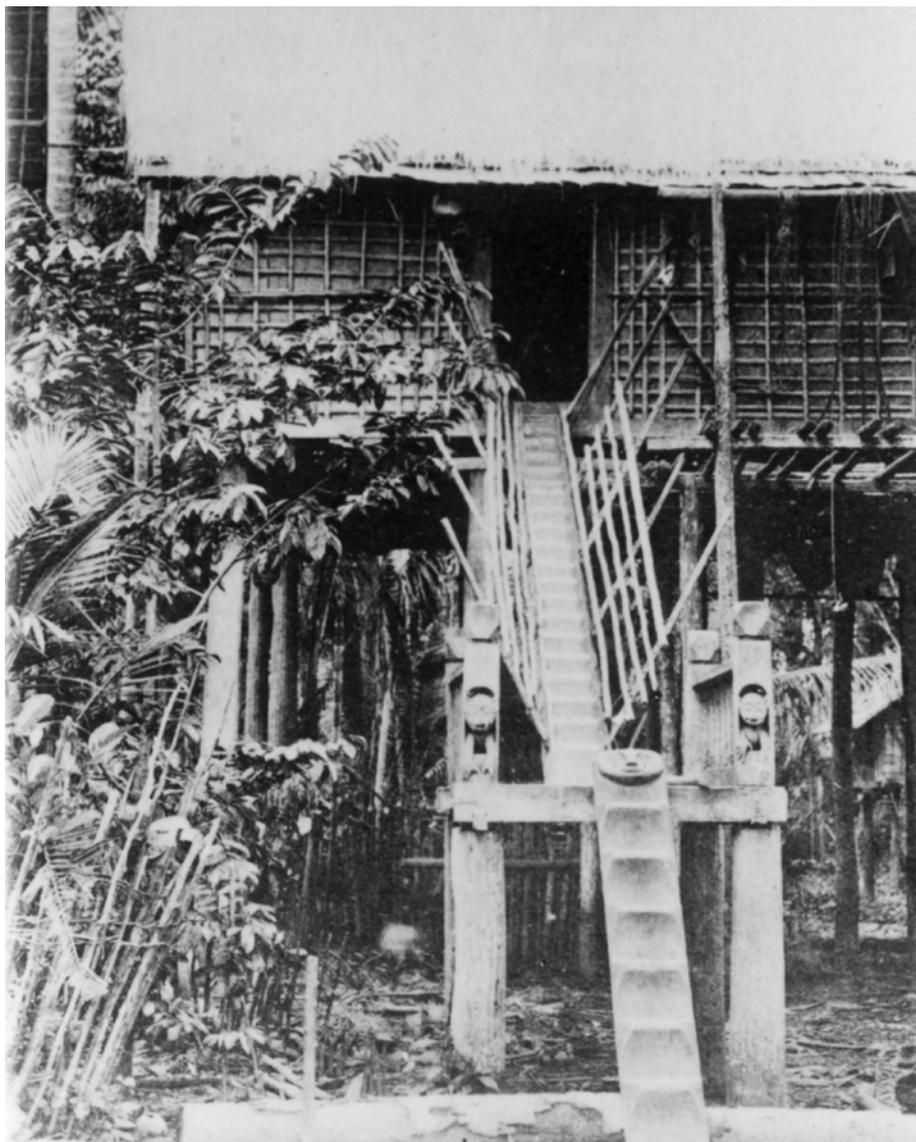
*ANRI: KIT 778 / 69*



Kantor *controleurs* (pengawas) di Kuala Kapuas,  
Kalimantan Tengah.

1920

*ANRI: KIT 778 / 4*



Rumah penduduk Suku Dayak di Kasongan,  
Kalimantan Tengah.

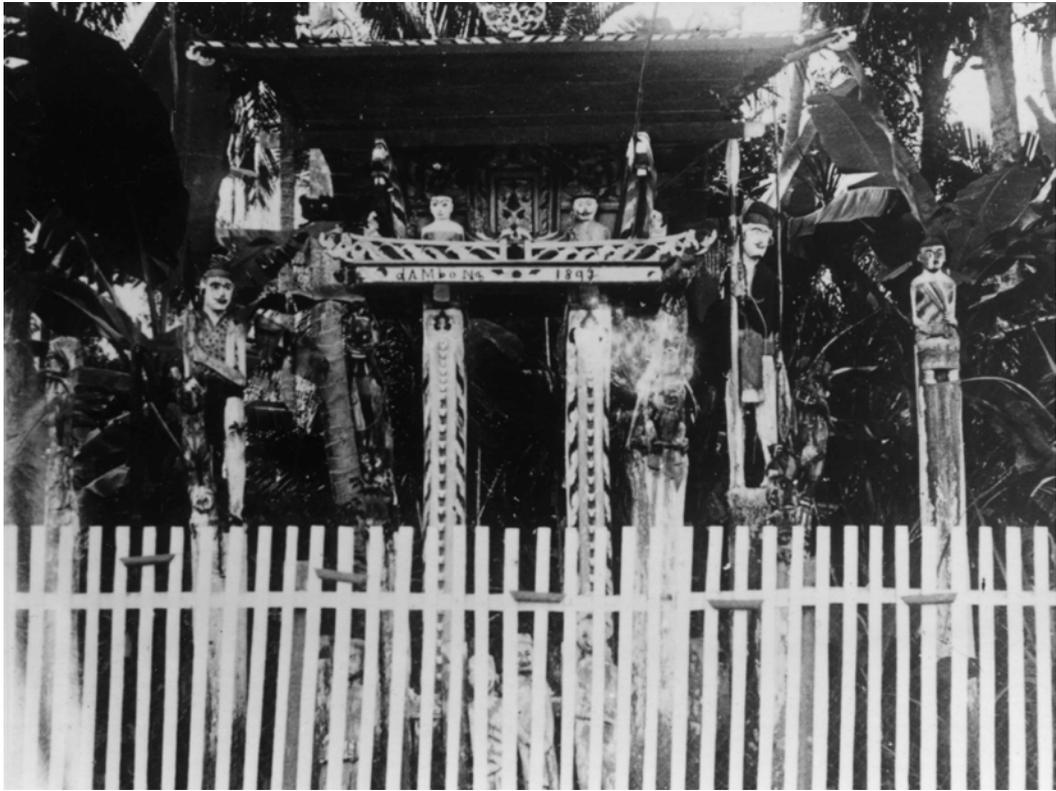
1920

*ANRI: KIT 829 / 84*

Rumah tinggal masyarakat Suku Dayak di Muara Teweh.  
Kalimantan Tengah.

1920

*ANRI: KIT 1091 / 76*



Rumah jenazah berhias patung-patung kayu di Muara Teweh,  
Kalimantan Tengah.

1920

*ANRI: KIT 1091 / 34*

Prosesi adat dalam keluarga Suku Dayak di Kayan,  
Kalimantan Tengah,  
1920  
*ANRI: KIT 442 / 4*



Tarian adat suku Dayak, Kalimantan Tengah.  
1920

*ANRI: KIT 411 /30*



Perahu yang digunakan untuk menyambut kedatangan Presiden Soekarno secara adat di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah.

15 Juli 1957

*ANRI: Kempen 570715 LL 2*



Upacara penyambutan kedatangan kapal yang membawa  
rombongan Presiden Soekarno di Kalimantan Tengah,  
15 Juli 1957

*ANRI: Kempen 570716 LL 5*

Tarian daerah menyambut kunjungan Presiden Soekarno  
di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah.  
15 Juli 1957  
*ANRI: Kempen 570715 LL 2 - 10*



Tarian daerah menyambut kunjungan Presiden Soekarno  
di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah.

15 Juli 1957

*ANRI: Kempen 570715 LL 2 – 13*

Tarian daerah menyambut kunjungan Presiden Soekarno  
di Palangka Raya, Kalimantan Tengah,  
15 Juli 1957

*ANRI: Kempen 570717 LL 4 – 6*



Presiden Soekarno menari pada acara malam kesenian dalam rangka kunjungan Presiden di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

17 Juli 1957

*ANRI: Kempen 570717 LL 6*



Tarian adat yang dilakukan oleh perempuan Dayak,  
Kalimantan Tengah.

19 Juli 1957

*ANRI: Kempen 570719 LL 2 – 9*

Tarian adat yang disajikan dalam rangka memperingati  
Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-13 di Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah,  
17 Agustus 1958  
*ANRI: Kempen 6 / 8*



Tari Payung yang dibawakan oleh anak-anak dalam rangka memperingati Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-13 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

17 Agustus 1958

*ANRI: Kempen 7 / 8*

Tari Menuga yang disajikan dalam acara kunjungan Ketua II  
Front Nasional Pembebasan Irian Barat, Brigjen Mustopo  
di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah,  
30 Januari 1959

*ANRI: Kempen 590130 LL 1 – 1*

Tari daerah yang dilakukan oleh anak-anak di Kuala Kapuas,  
Kalimantan Tengah.  
30 Januari 1959.

*ANRI: Kempen: 590130 LL 1 – 6*

Duta Besar Amerika, Malaya, dan Yugoslavia menghadiri malam kesenian dalam rangka kunjungan presiden Soekarno di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

8 September 1959

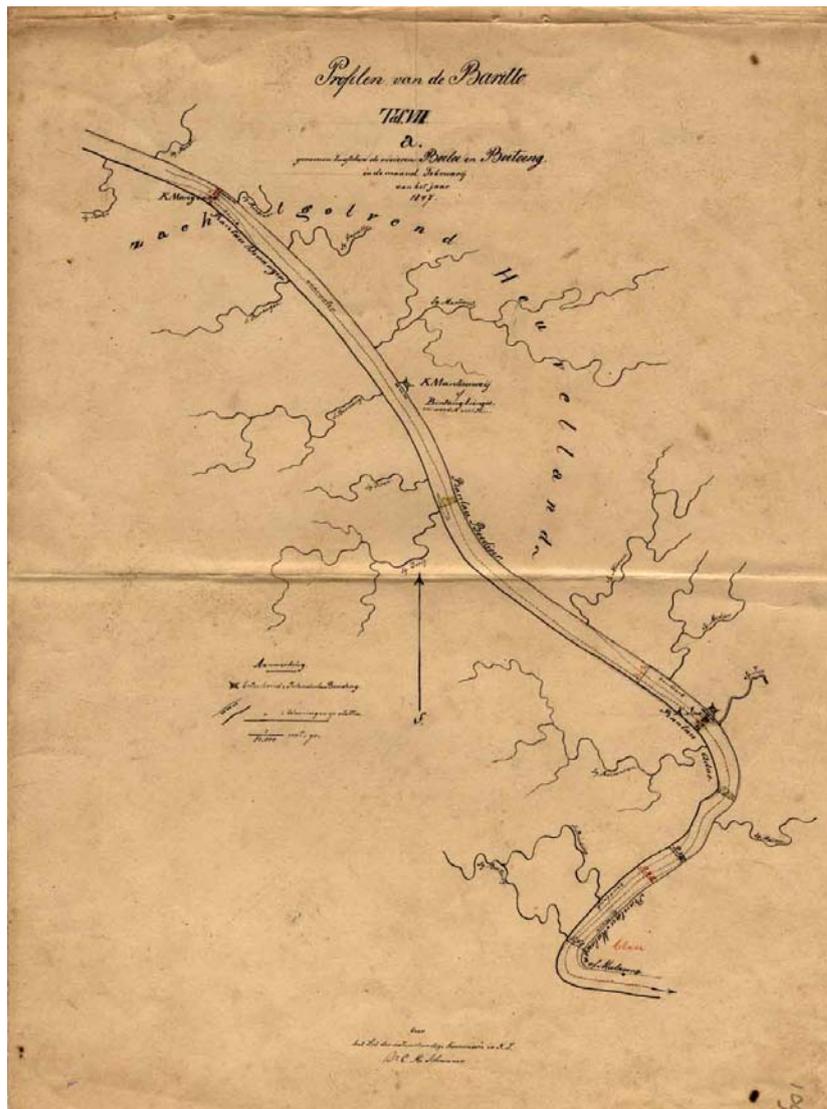
*ANRI: Kempen 590908 LL 2 - 7*

Presiden Soekarno dan rombongan menari bersama pada acara malam kesenian di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

8 September 1959

*ANRI: Kempen 590908 LL 2 – 8*

# Infrastruktur



Peta hasil penelitian dan pemetaan dari Komisi Lingkungan Alam (*Natuurkundige Commissie*) yang menyatakan bahwa aliran Sungai Barito dapat dilalui kapal-kapal besar, 1847.

*ANRI: BZO No. 122*





Rumah Sakit di Semblimbingan, Lamandau, Kalimantan Tengah,  
1920.

*ANRI: KIT 348/24*

mbq. = *8/200* 96

**ZUIDER- EN OOSTERAFD. VAN BORNEO**

INGENIEUR EERSTAAANWEZEND WATERSTAATSAMBTENAAR

No. *2423/A* BANDJERMASIN, DEN 5 Maart 1938.

BIJLAGEN: *begroeting van kosten met bijlagen in duplo*

ONDERWERP:  
Herstellingen aan het Landsgebouw lino. D 39 te Koeala Kapoeas, waarin het Controleurs-, Landraad-, hulppost- en rubberdistributiekantoor zijn ondergebracht.

*Opz. Water* 3

*Brief A 60/56/13* Abs

*10/3-38*

Met verwijzing naar Uw schrijven van 27 November 1937 no. 60/56/13 heb ik de eer UHOOGEDIGTE-  
strange in bijlagen dezes de nieuwe ontwerpstukken betreffende het in hoofde dezes genoemde werk ter autorisatie beleefd aan te bieden.

In de nieuwe begrooting sluitend met een eindcijfer van f. 1.100,-- is tevens gerekend op de naderhand noodig gebleken vernieuwing van de vermolde plafondplanken.

De kosten zullen naar verhouding van de oppervlakte als volgt kunnen worden onderverdeeld:

Verkeer en Waterstaat (P.T.T.)	f. 196,--
Justitie (Djaksa + Inl. personeel)	" 476,--
Binnenlandsch Bestuur (Districtshoofd)	" 280,--
Binnenlandsch Bestuur (Rubberdistributiekantoor)	" 148,--

In het uitvoeringsplan U aangeboden bij dzz. schrijven van 7 December 1937 no. 13455/A werden de kosten geraamd op totaal f. 1000,--

Ten slotte moge worden aangeteekend dat het bij besluit van den Dir. B.B. ddo. 14 October 1937 no. ER 6/32/13 voor de herstelling van dat gedeelte van het onderwerpeijk gebouw waarin het rubberdistributiekantoor is ondergebracht, vrijgegeven bedrag ad f. 368,-- zal moeten worden verhoogd tot f. 1.448,--

*Opz. Water*  
*Wilt dit geheel afhandelen*  
*2/3*

De Resident der Z u i d e r- en O o s t e r a f d e e l i n g v a n B o r n e o.,

*B. H. Hooge*  
*3e Storing*

AAN  
den Directeur van Verkeer en Waterstaat te BANDOENG =

*intercommissie opdat dit als project wordt opgenomen in het budget van 1938 en dat de kosten van dit werk niet meer dan f. 1000,- bedragen*  
*9/15/38*

GENORMALISEERD. 5000-27

Surat dari Residen Kalimantan Selatan dan Timur kepada Direktur *Verkeer en Waterstaat* tentang pembangunan gedung dan rumah tinggal pengawas (*controleur*) di Kuala Kapuas, 5 Maret 1938  
*ANRI: BOW No. BV 14*



Transportasi sungai di Samuda, Sampit, Kalimantan Tengah,  
15 Maret 1949

*ANRI: Kempen 90315 LL 26*

Pembukaan lahan untuk pemukiman di Kalimantan Tengah  
22 Mei 1949  
*ANRI: Kempen 90522 LL 11*



Sarana transportasi sungai yang membawa rombongan wartawan dalam rangka kunjungan Presiden Soekarno di Kalimantan Tengah.

16 Juli 1957

*ANRI: Kempen: 570716 LL 2 -1*

Peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor  
Penerangan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

17 Agustus 1958

*ANRI: Kempen 2 / 5*



Peletakan batu pertama pembangunan Kantor Kehewan  
dan Perikanan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

17 Agustus 1958

*ANRI: Kempen 5 / 9*



Percobaan hubungan udara dari Banjarmasin ke Palangka Raya dengan menggunakan Pesawat Twin Otter dari Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI).

9 Juni 1959

*ANRI: Kempen 590609 LL 47*



Gedung Kantor Gubernur/Kepala Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya,  
1964

*ANRI: Kempen: 64 - 4714*

Gedung Jawatan Penerangan Propinsi Kalimantan Tengah.

21 Mei 1964.

*ANRI: Kempen: 64 – 4768*

Pembangunan jalan raya di Kalimantan Tengah,  
September 1965  
*ANRI: Kempen 65 – 12675*

Studio Radio Republik Indonesia di Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah.  
September 1965  
*ANRI: Kempen 65 – 12706*

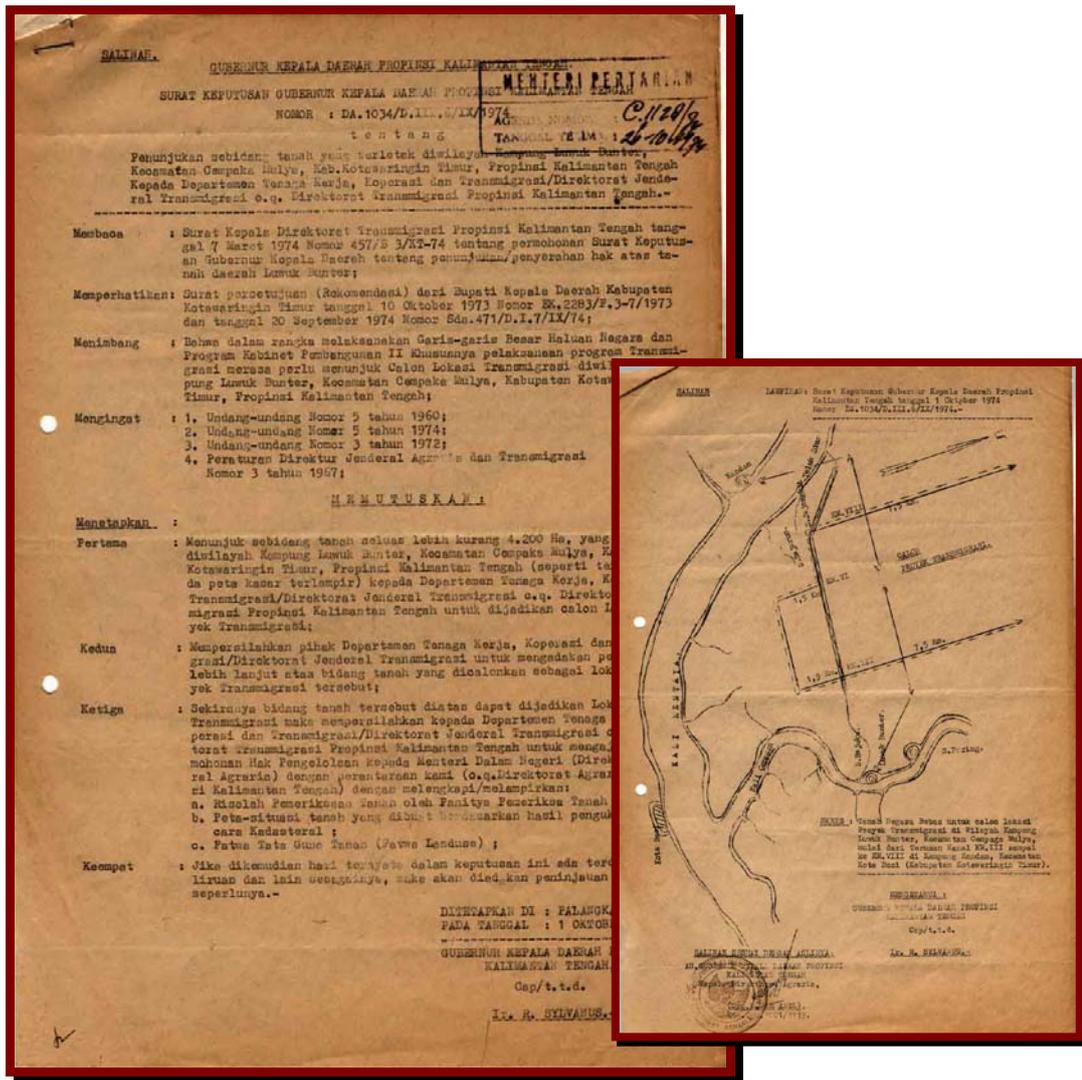
Penyiar Radio Republik Indonesia di Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah.  
September 1965  
*ANRI: Kempen 65 – 12708*



Survei dan pemetaan yang dilakukan dalam rangka pembukaan lahan pemukiman di Palangka Raya.

1965

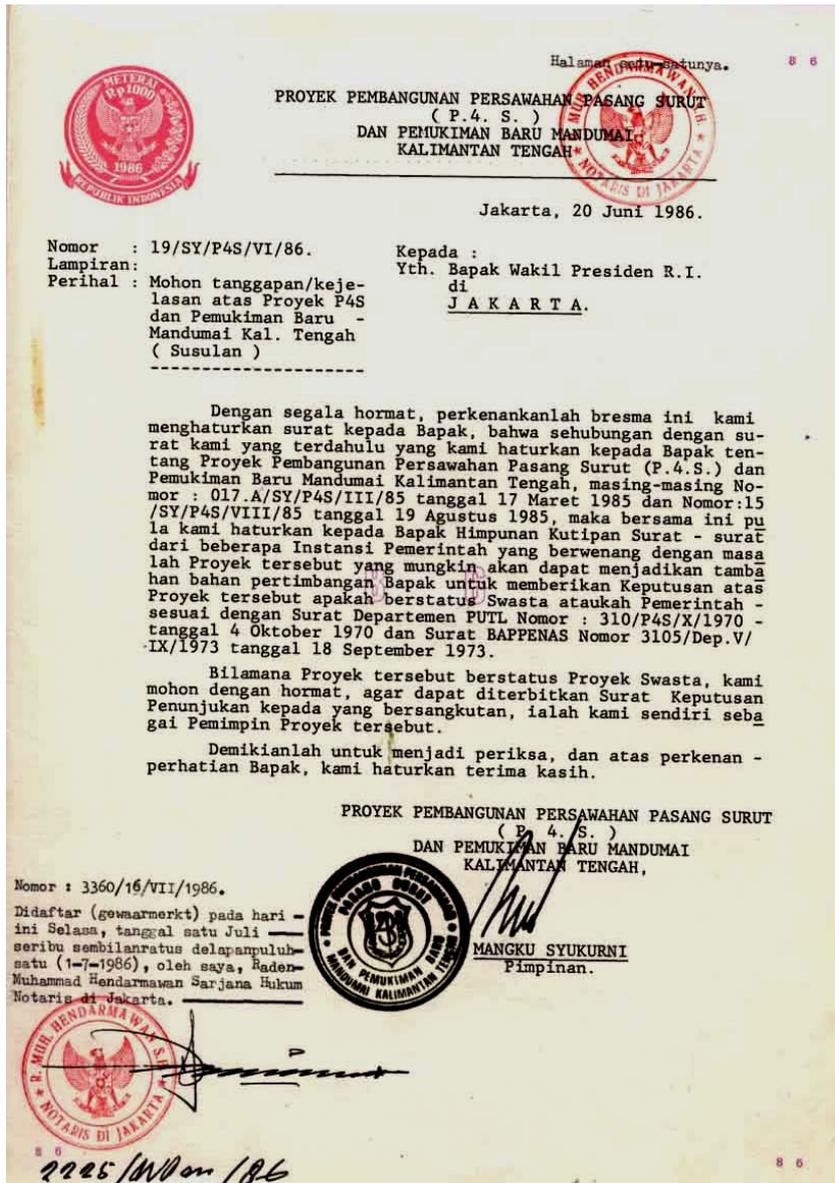
*ANRI: Kempen 65 – 12726*



Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. DA.1034/D.III.6/IX/1974 tentang penunjukkan sebidang tanah yang terletak di wilayah Kampung Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaka Mulya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, untuk dijadikan pemukiman transmigrasi.

1 Oktober 1974

*ANRI: Kementerian Pertanian No. 142*



Surat dari Pimpinan Proyek Pembangunan Persawahan Pasang Surut (P4S) dan Pemukiman Baru Mandumai Kalimantan Tengah kepada Wakil Presiden RI tentang Permohonan tanggapan atas proyek pembangunan persawahan Pasang Surut (P4S) dan Pemukiman Baru Mandumai Kalimantan Tengah.

20 Juni 1986

*ANRI: Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah 374*

# Keagamaan

Gereja di tepi sungai Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah.  
1920  
*ANRI: KIT 302/30*



Gereja di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah,  
1920

*ANRI: KIT: 302/32*

Rumah seorang Pastur Katholik  
di Kuala Kapuas, 1920.  
*ANRI: KIT: 302 / 34*

Penduduk yang menganut agama Kristen di Pangkoh,  
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

1920

*ANRI: KIT 302/42*

Seorang pastur dan keluarga berfoto di halaman rumahnya  
di Kuala Kapuas,  
1920  
*ANRI: KIT 302 / 58*

Masjid dengan kubah kerucut di Mantargai, Kuala Kapuas,  
Kalimantan Tengah. 1920  
*ANRI: KIT 803/03*



Masjid di daerah Tanjung, Kotawaringin Barat,  
Kalimantan Tengah.

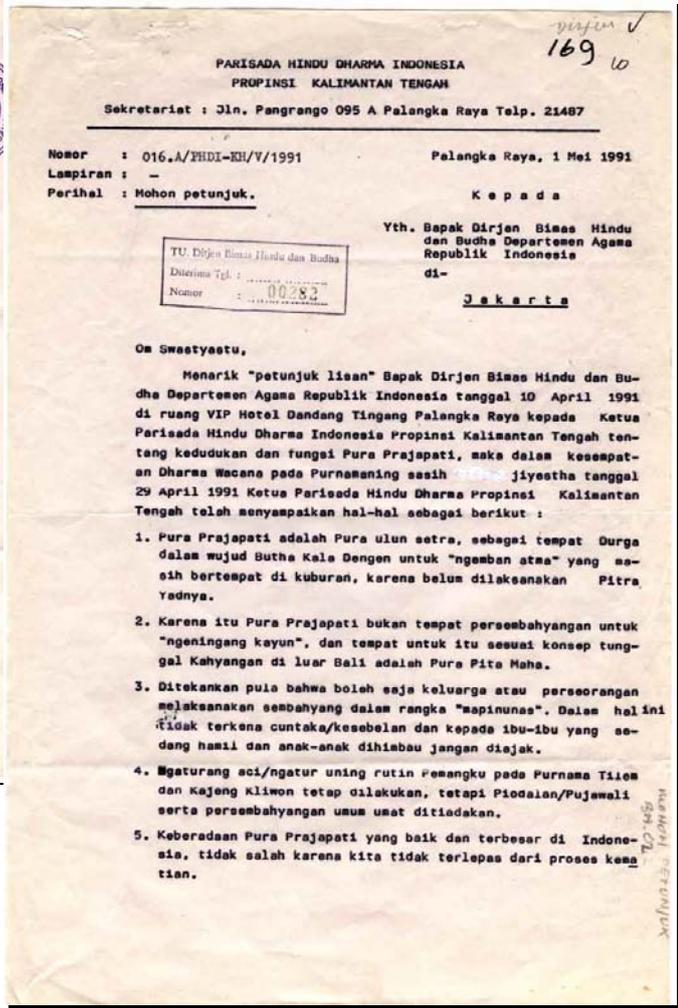
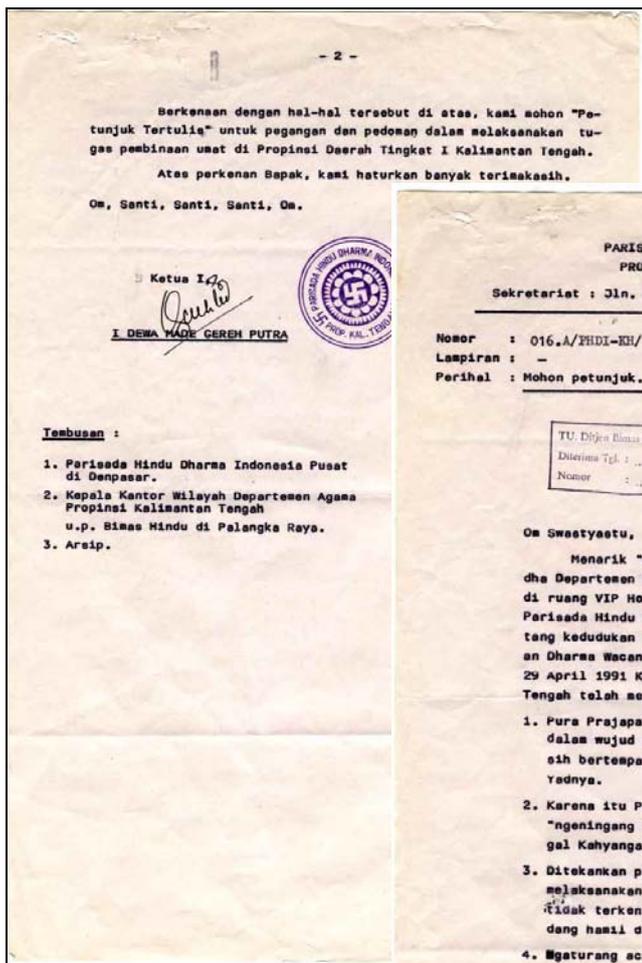
1920

*ANRI: KIT 807/37*

Kunjungan Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani dalam  
pembukaan Kursus dan Latihan bagi alim ulama  
se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya,  
15 Maret 1963.

*ANRI: Kempen 63 – 2707*

Para jemaat menuju Gereja di Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah.  
24 September 1965.  
*ANRI: Kempen 65-12741*



Surat dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Propinsi Kalimantan Tengah kepada Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama tentang permohonan petunjuk tertulis sebagai pegangan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pembinaan umat di Propinsi Daerah Tk I Kalimantan Tengah. 1 Mei 1991

*ANRI: Departemen Agama II No. 148*

# Daftar Arsip

## DAFTAR ARSIP CITRA KALIMANTAN TENGAH DALAM ARSIP

### A. GEOGRAFI

1. Peta wilayah Pulau Kalimantan (*Eiland Borneo*), 1691.  
*ANRI: De Haan No. B116*  
Halaman: 32
2. Peta Teluk dan Sungai *Comeij* dan *Cottaringen*, hingga Tanjung Putin, Kalimantan Tengah, lampiran Resolusi 5 Agustus 1835 Nomor 2, 5 Agustus 1835  
*ANRI: De Haan No. G 53*  
Halaman: 33
3. Peta penyebaran Suku Dayak di Kalimantan; Suku Dayak Ngaju merupakan Suku Dayak yang dominan berada di wilayah Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: NEFIS: A 10200*  
Halaman: 34
4. Peta wilayah Kotawaringin, Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT A 5120*  
Halaman: 35
5. Peta Banjarmasin sebagai ibukota Sulawesi Selatan dan Timur yang meliputi wilayah pemerintahan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, lampiran Besluit Gubernur Jenderal, 25 November 1925 Nomor 19.  
*ANRI: Besluit 25 November 1925 no. 19*  
Halaman: 36
6. Peta Pulau Kalimantan bagian selatan, berikut pembagian wilayah dan jumlah penduduk. 10 Februari 1934.  
*ANRI: Binnenlandsch Bestuur No.4538*  
Halaman: 37

7. Peta wilayah Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. 1942  
*ANRI: Topografi No. 132/2452*  
Halaman: 38
8. Peta wilayah Sampit, Kalimantan Tengah, 1945  
*ANRI: Topografi No. 59*  
Halaman: 39
9. Muara Sungai Pawon di Sampit, Kalimantan Tengah,  
*ANRI: De Haan No. H. 14*  
Halaman: 40
10. Peta Provinsi Kalimantan Tengah, 2005  
*ANRI: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional*  
Halaman: 41

## **B. POLITIK DAN PEMERINTAHAN**

11. Surat dari Gubernur Jenderal Johannes Siberg kepada Ratoe Anoem Koesoemo Yoedo di Kotawaringin tentang kunjungan persahabatan ke Kasultanan Kotawaringin. 29 November 1803.  
*ANRI: BZO No. 138/1*  
Halaman: 43
12. Bagian dari laporan *Opperhoofd ter Zuid en Oostkust van Borneo* kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengenai keadaan di wilayah Kotawaringin (*Kotta ringin*). 26 Januari 1825.  
*ANRI: BZO No. 112/13*  
Halaman: 44
13. Bagian awal dari Kontrak perjanjian kerjasama antara Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan Sultan Kotawaringin Ratoe Isman Oedin, 30 November 1834.  
*ANRI: Kontrak Borneo No. 56*  
Halaman: 45

14. Bagian awal dari Memori Serah Terima Jabatan Residen Kalimantan Bagian Selatan dan Timur, J.G.H. Gallois antara lain tentang pembagian wilayah Kalimantan bagian selatan, 2 April 1851  
*ANRI: BZO No. 136/1*  
Halaman: 46
15. Bagian awal dari Memori Serah Terima Jabatan Residen Kalimantan Bagian Selatan dan Timur A. van den Venn antara lain tentang wilayah Kesultanan Kotawaringin termasuk dalam wilayah Kalimantan Bagian Selatan, yang terdiri dari wilayah Semboeloe, Pamboeang, Sampit, Mandawe dan Katingan, 30 April 1853  
*ANRI: BZO 136/11*  
Halaman: 47
16. Bagian awal dari Keputusan Gubernur Borneo No.BB/AI/I/3/6 tentang pembagian wilayah Karesidenan Kalimantan Timur dan Selatan menjadi 4 *afdeeling* (bagian), yaitu: Banjarmasin, Hoeloe Sungai, Kapuas Barito dan Samarinda. Kalimantan Tengah termasuk dalam *afdeeling* Kapuas Barito yang terbagi dalam 6 *onderafdelingen*, yaitu *Beneden* Dayak (Dayak Bawah), *Boven* Dayak (Dayak Atas), Sampit, Kota Waringin, Moeara Teweh dan Poeroek Tjahu, 10 Mei 1939.  
*ANRI: Binnenland Bestuur No. 4538*  
Halaman: 48
17. Bagian awal dari Petikan Surat Keputusan Residen Borneo Selatan No. 1163/5/7 tentang pembagian *afdeeling* Kapuas Barito menjadi 7 distrik yakni Barito Hilir, Barito Tengah, Barito Hulu, Kapuas, Kahayan, Seruyan dan Katingan. 31 Juli 1946  
*ANRI: Algemeene Secretarie No. 1308*  
Halaman: 49

18. Bagian awal dari Salinan Keputusan Pemerintah Kasultanan Kotawaringin tentang Pembentukan Dewan Kotawaringin yang mempunyai hak turut serta menetapkan undang-undang, 14 Januari 1948  
*ANRI: Algemeene Secretarie No. 1330/1*  
Halaman: 50
19. Surat dari Putra-putra bangsawan dan Kepala-kepala kampung mewakili rakyat Kesultanan Kotawaringin di Keraton Kuning Bukit Indra Gencana, Pangkalan Boen tentang Pembentukan Dewan Kotawaringin.  
3 Februari 1948  
*ANRI: Algemeene Secretarie No. 1330*  
Halaman: 51
20. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Kabupaten Kotawaringin berfoto bersama sesudah mengadakan rapat paripurna tahun 1951.  
*ANRI: Kempen 1951*  
Halaman: 52
21. Peserta Konferensi Pamong Praja dan Inter Jawatan seluruh Kabupaten Barito, berfoto bersama di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito di Muara Teweh, Kalimantan Tengah, Maret 1953.  
*ANRI: Kempen 1953 - 03*  
Halaman: 53
22. Bagian awal dan akhir dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, 29 November 1956  
*ANRI: Sekretaris Kabinet UU 1950-1960 No. 199*  
Halaman: 54

23. Surat dari Menteri Dalam Negeri, Mr. Soenarjo kepada Kabinet Presiden tentang pembagian Kalimantan dalam 3 provinsi otonom dan persiapan pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Tengah, 5 Februari 1957  
*ANRI: Kabinet Presiden No. 901*  
Halaman: 55
24. Bagian awal dan akhir Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 mengenai Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. 7 Mei 1957.  
*ANRI: Sekretaris Kabinet, Undang-Undang Darurat 145*  
Halaman: 56
25. Surat dari Kepala Biro Pemilihan Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Dayak Kalimantan Tengah tentang permohonan agar Kalimantan Tengah mempunyai Partai Persatuan Dayak sendiri terpisah dari Partai Persatuan Dayak Kalimantan Selatan. 16 Mei 1957.  
*ANRI: Kabinet Presiden 817*  
Halaman: 57
26. Presiden Soekarno berpidato pada rapat raksasa dalam rangka kunjungan Presiden di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 15 Juli 1957  
*ANRI: Kempen 570715 LL 1-1*  
Halaman: 58
27. Masyarakat menyambut kedatangan Presiden Soekarno, dalam rangka peletakan batu pertama ibukota Kalimantan Tengah di Palangka Raya, 17 Juli 1957  
*ANRI: Kempen: 570717 LL 2 – 2*  
Halaman: 59

28. Pemancangan kayu oleh Presiden Soekarno sebagai tanda peresmian ibukota Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, 17 Juli 1957  
*ANRI: Kempen 570717 LL 2 – 8*  
Halaman: 60
29. Presiden Soekarno memberikan bingkisan kepada wakil masyarakat di Palangka Raya. Kalimantan Tengah.  
17 Juli 1957  
*ANRI: Kempen 570717 LL 7*  
Halaman: 61
30. Presiden Soekarno mencoba pesawat helikopter dalam perjalanan ke Kalimantan di Palangka Raya,  
17 Juli 1957  
*ANRI: Kempen 570717 LL 3-1*  
Halaman: 62
31. Rapat raksasa aksi masyarakat Kotawaringin di Sampit, Kabupaten Kotawaringin mendukung pembebasan Irian Barat dari Pemerintahan Belanda, 25 November 1957.  
*ANRI: Kempen 571125*  
Halaman: 63
32. Bagian awal dan akhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah, menjadi Undang-Undang.  
17 Juni 1958  
*ANRI: Sekretaris Kabinet, Undang-Undang No. 226*  
Halaman: 64
33. Peletakan rangkaian bunga sebagai tanda penghormatan kepada pahlawan dalam rangka peringatan Kemerdekaan RI ke-13 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.  
17 Agustus 1958  
*ANRI: Kempen 15 / 7*  
Halaman: 65

34. Penyerahan bendera merah putih oleh inspektur upacara kepada petugas pengibar bendera dalam upacara peringatan Kemerdekaan RI ke-13 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 17 Agustus 1958  
*ANRI: Kempen 16 / 7*  
Halaman: 66
35. Pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-13 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 17 Agustus 1958  
*ANRI: Kempen 11 / 7*  
Halaman: 67
36. Jendral Mustopo berpidato mengajak rakyat di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah untuk terus mengobarkan semangat merebut kembali Irian Barat dari Kolonial Belanda, 31 Januari 1959  
*ANRI: Kempen 590131 LL 1 – 4*  
Halaman: 68
37. Gubernur Kalimantan Tengah Tjilik Riwut dan istri di Palangka Raya, 9 Juni 1959  
*ANRI: Kempen 590609 LL 13*  
Halaman: 69
38. Gubernur Kalimantan Tengah, Tjilik Riwut di Palangka Raya, 9 Juni 1959  
*ANRI: Kempen 590609 LL 14*  
Halaman: 70
39. Presiden Soekarno menerima cinderamata dari Ibu Tjilik Riwut, pada acara kunjungan kenegaraan Presiden di Kalimantan Tengah, 8 September 1959  
*ANRI: Kempen 590908 LL 2-13*  
Halaman: 71

40. Kunjungan Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani ke Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 1963  
*ANRI: Kempen 63 – 2623*  
Halaman: 72
41. Kunjungan Menteri Dalam Negeri, Ipik Gandamana ke Kalimantan Tengah dalam rangka penyerahan pemerintahan umum pusat kepada daerah-daerah tingkat I, 1964  
*ANRI: Kempen 64 – 4691*  
Halaman: 73
42. Ketetapan Sementara Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah No.GKtg-309/64 tentang rencana pembangunan "Monumen Dewan Nasional" Sungai Hanju, di Palangka Raya, 15 Agustus 1964,  
*ANRI: Ruslan Abdulgani No.040*  
Halaman: 74
43. Gubernur Kalimantan Tengah Tjilik Riwut dan Mayor Jendral Panggabean di Palangka Raya, 14 September 1965.  
*ANRI: Kempen 65 – 12644*  
Halaman: 75
44. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1967 tentang Penunjukan Ir. Reinout Sylvanus sebagai Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah, 7 Agustus 1967  
*ANRI: Sekab, Keppres No. 118*  
Halaman: 76
45. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1967 tentang Penunjukan Ir. Reinout Sylvanus sebagai Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah, 7 Agustus 1967  
*ANRI: Sekab, Keppres No. 118*  
Halaman: 77

46. Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Ani Yudhoyono ke Kalimantan Tengah.  
31 Agustus 2006  
*ANRI: Buku Indonesia Tanah Airku*  
Halaman: 78

### C. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

47. Bagian dari catatan harian *Opperhoofd Zuid en Oosterafdeeling van Borneo* tentang kedatangan suku Dayak Katingan selama 16 hari ke wilayah militer di Martapura, 18 Februari 1827  
*ANRI: BZO 112/19*  
Halaman: 80
48. Bagian awal dari laporan perjalanan Sultan Kotawaringin, Pangeran Ratoe bersama Asisten Komisariss Bloem di Sambas antara lain tentang adanya gangguan keamanan laut di wilayah kekuasaan Kesultanan Kotawaringin, 31 Juli 1836.  
*ANRI: BZO No. 100/4*  
Halaman: 81
49. Laporan dari Asisten Residen Kapuas Barito tentang peristiwa aksi militer yang terjadi di Sampit dan Kotawaringin, 27 Januari 1946.  
*ANRI: Algemeene Secretarie No. 1308*  
Halaman: 82
50. Surat dari markas Divisi IV Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) tentang pembentukan organisasi rahasia Markas Pertahanan ALRI ke IV di Pagatan, Sampit, Samoeda dan Koeala Pamboeang, 10 April 1947.  
*ANRI: Kementerian Pertahanan No. 794*  
Halaman: 83

51. Laporan Markas Divisi IV Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) tentang kekuatan *Nederlands Indie Civil Administration* (NICA) di kawasan Pembuang, Rantau Pulut, Samuda dan Sampit, Kalimantan Tengah yang seluruhnya berjumlah 108 orang lengkap dengan persenjataannya. Mei 1947.  
*ANRI: Kementerian Pertahanan No.1281*  
Halaman: 84
52. Amanat tertulis Pejabat Presiden Djuanda pada peringatan Ulang Tahun ke-3 Komando Daerah Militer (Kodam) XI/ Tambun Bungai Kalimantan Tengah agar mencurahkan perhatian sepenuhnya pada usaha membangun daerahnya sesuai kebijaksanaan pemerintah dengan rencana Pembangunan Semesta berdasarkan Manifestasi Politik.  
1 Juli 1961  
*ANRI: Pidato Presiden No. 313*  
Halaman: 85
53. Instruksi Presidium Kabinet Dwikora kepada Penguasa Pelabuhan seluruh Indonesia untuk melakukan penelitian persediaan barang di gudang baik milik negara maupun swasta yang berada di bawah pengawasan Penguasa Pelabuhan, 23 November 1965.  
*ANRI: Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan No. 480*  
Halaman: 86

#### **D. PEREKONOMIAN**

54. Catatan dari *Opperhoofd Zuid en Oostkust van Borneo*, yang menjelaskan tentang wilayah Kotawarigin yang terletak di Hulu Sungai Aroet dengan sebutan Negeri Soeka Boemi memiliki hasil bumi terpenting seperti beras, damar, kayu, rotan, pohon garu dan besi; dengan jumlah penduduk 2.000 orang dengan raja bernama Ratoe Iman Oedin, 1845.  
*ANRI: BZO No. 136/18*  
Halaman: 88

55. Suasana pasar terapung di sungai Barito, 1920  
*ANRI: KIT 372 /74*  
Halaman: 89
56. Pengangkutan hasil bumi rotan ke kapal di pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah, 15 Maret 1949  
*ANRI: Kempen 90315 LL 3 – 1*  
Halaman: 90
57. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Karet Rakyat Propinsi Kalimantan Tengah No. 117/A/2/P/60 tentang Kedudukan Yayasan Karet Rakyat Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, 17 Desember 1960  
*ANRI: Kementerian Pertanian No.18*  
Halaman: 91
58. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah No. 4/EK/GKDH/1963 tentang tata niaga karet rakyat di Kalimantan Tengah, 26 Juli 1963.  
*ANRI: Kementerian Pertanian No.71*  
Halaman: 92
59. Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani meninjau pasar ikan di Palangka Raya, 1963  
*ANRI: Kempen 63 – 2009*  
Halaman: 93
60. Suasana pasar ikan di Palangka Raya, 1964  
*ANRI: Kempen 64 – 12742*  
Halaman: 94
61. Ikan sungai hasil tangkapan seorang penduduk di Palangka Raya, 1965  
*ANRI: Kempen 65 – 12744*  
Halaman: 95

62. Suasana jual beli di pasar Palangka Raya, 1965  
*ANRI: Kempen 65 – 12745*  
Halaman: 96
63. Surat Persetujuan Penanaman Modal No. 208/Kpts/Um/6/1969 tentang Izin Investasi di bidang kehutanan kepada P.T. Bina Harapan Company dan Yuling Timber Company Limited, 13 Juni 1969  
*ANRI: Asmin/Setneg No. 257*  
Halaman: 97
64. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah. 26 Desember 1995  
*ANRI: Badan Pertanahan Nasional No. 109*  
Halaman: 98
65. Surat persetujuan penanaman modal antara PT Salawati Makmur dan PT Rimba Harapan Sakti bekerja sama dengan Kerry Holding di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya menjadi minyak sawit di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, 2 Juli 1996,  
*ANRI: Asmin/Setneg No. 5133*  
Halaman: 99

## **E. PENDIDIKAN**

66. Guru dan murid Sekolah Dasar untuk pribumi di Deyah, Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 320 / 46*  
Halaman: 101
67. Sekolah pendidikan guru agama di Baguh, Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 319/56*  
Halaman: 102

68. Surat dari Sultan Kotawaringin XIV kepada Residen Borneo Selatan tentang permohonan untuk mengikuti pendidikan (*studiereis*) bagi Pangeran-pangeran di Kasultanan Kotawaringin. 20 Juli 1948.  
*ANRI: Algemeene Secretarie No. 1330*  
Halaman: 103
69. Gedung SMP Negeri Mangkusari di Muara Teweh, Kalimantan Tengah, Juni 1958.  
*ANRI: Kempen 441 / B*  
Halaman: 104
70. Peletakan batu pertama pembangunan Kantor Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 17 Agustus 1958  
*ANRI: Kempen 12 / 9*  
Halaman: 105
71. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 141 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Palangka Raya. 4 Nopember 1963  
*ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1963*  
Halaman: 106
72. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0277/0/1975 tentang Pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di Palangka Raya Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.  
27 Nopember 1975  
*ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1975*  
Halaman: 107
73. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0630/0/1977 tentang pembukaan SMA Negeri Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur/Kodya Administratif Katingan Propinsi DaerahTingkat I, Kalimantan Tengah, 29 Desember 1977  
*ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1977*  
Halaman: 108

74. Surat dari Direktur Pendidikan Dasar kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah tentang pengiriman uang bantuan orang tua asuh untuk anak asuh, Desember 1984  
*ANRI: Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah 429*  
Halaman: 109
75. Surat dari Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Kalimantan Tengah, kepada Direktur Jenderal Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial RI tentang data anak asuh dan tanda bukti penerimaan bantuan dari keluarga bapak Umar Wirahadikusumah tahun 1986-1987.  
15 Desember 1986  
*ANRI: Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah 492*  
Halaman: 110
76. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 087/0/1988 tentang Perubahan Bentuk dan Nama Akademi Manajemen Perusahaan Sampit menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit, 15 Februari 1988  
*ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1988*  
Halaman: 111
77. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0127/0/1990 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program di Lingkungan Universitas Kristen Palangka Raya, 9 Maret 1990  
*ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1990*  
Halaman: 112

## **F. Kesenian dan Kebudayaan**

78. Tiga orang suku Dayak dari Hulu Sungai Katingan, Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 336 / 64*  
Halaman: 114

79. Keranjang gendong untuk anak yang digunakan oleh Suku Dayak di Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 442 / 12*  
Halaman: 115
80. Profil Perempuan Dayak Kayan dengan peralatan pertanian di Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 442 / 66*  
Halaman: 116
81. Profil istri kepala Suku Dayak di Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 443 / 28*  
Halaman: 117
82. Rumah tinggal keluarga Sultan Kotawaringin di *Witteland*, Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 445 / 80*  
Halaman: 118
83. Rumah Kepala Suku Dayak Kayan Kwin Irang, Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 778 / 69*  
Halaman: 119
84. Kantor *controleurs* (pengawas) di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 778 / 4*  
Halaman: 120
85. Rumah penduduk Suku Dayak di Kasongan, Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 829 / 84*  
Halaman: 121
86. Rumah tinggal masyarakat Suku Dayak di Muara Teweh. Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 1091 / 76*  
Halaman: 122

87. Rumah jenazah berhias patung-patung kayu di Muara Teweh, Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 1091 / 34*  
Halaman: 123
88. Prosesi adat dalam keluarga Suku Dayak di Kayan, Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 442 / 4*  
Halaman: 124
89. Tarian adat suku Dayak, Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 411 /30*  
Halaman: 125
90. Perahu yang digunakan untuk menyambut kedatangan Presiden Soekarno secara adat di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 15 Juli 1957  
*ANRI: Kempen 570715 LL 2*  
Halaman: 126
91. Upacara penyambutan kedatangan kapal yang membawa rombongan Presiden Soekarno di Kalimantan Tengah, 15 Juli 1957  
*ANRI: Kempen 570716 LL 5*  
Halaman: 127
92. Tarian daerah menyambut kunjungan Presiden Soekarno di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 15 Juli 1957  
*ANRI: Kempen 570715 LL 2 - 10*  
Halaman: 128
93. Tarian daerah menyambut kunjungan Presiden Soekarno di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 15 Juli 1957  
*ANRI: Kempen 570715 LL 2 – 13*  
Halaman: 129

94. Tarian daerah menyambut kunjungan Presiden Soekarno di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 15 Juli 1957  
*ANRI: Kempen 570717 LL 4 – 6*  
Halaman: 130
95. Presiden Soekarno menari pada acara malam kesenian dalam rangka kunjungan Presiden di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 17 Juli 1957  
*ANRI: Kempen 570717 LL 6*  
Halaman: 131
96. Tarian adat yang dilakukan oleh perempuan Dayak, Kalimantan Tengah, 19 Juli 1957  
*ANRI: Kempen 570719 LL 2 – 9*  
Halaman: 132
97. Tarian adat yang disajikan dalam rangka memperingati Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-13 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 17 Agustus 1958  
*ANRI: Kempen 6 / 8*  
Halaman: 133
98. Tari Payung yang dibawa oleh anak-anak dalam rangka memperingati Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-13 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 17 Agustus 1958  
*ANRI: Kempen 7 / 8*  
Halaman: 134
99. Tari Menuga yang disajikan dalam acara kunjungan Ketua II Front Nasional Pembebasan Irian Barat, Brigjen Mustopo di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 30 Januari 1959  
*ANRI: Kempen 590130 LL 1 – 1*  
Halaman: 135
100. Tari daerah yang dilakukan oleh anak-anak di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 30 Januari 1959.  
*ANRI: Kempen: 590130 LL 1 – 6*  
Halaman: 136

101. Duta Besar Amerika, Malaya, dan Yugoslavia menghadiri malam kesenian dalam rangka kunjungan presiden Soekarno di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.  
8 September 1959  
*ANRI: Kempen 590908 LL 2 - 7*  
Halaman: 137
102. Presiden Soekarno dan rombongan menari bersama pada acara malam kesenian di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 8 September 1959  
*ANRI: Kempen 590908 LL 2 - 8*  
Halaman: 138

## G. INFRASTRUKTUR

103. Peta hasil penelitian dan pemetaan dari Komisi Lingkungan Alam (*Natuurkundige Commissie*) yang menyatakan bahwa aliran Sungai Barito dapat dilalui kapal-kapal besar, 1847.  
*ANRI: BZO No. 122*  
Halaman: 140
104. Bagian awal dari laporan perjalanan C.Muller Schaner (*Natuurkundige Commissie*) di Kalimantan Selatan dan Timur antara lain tentang keadaan Sungai Katingan dan Malahoei di wilayah Kahayan, Kalimantan Tengah,  
27 Desember 1850.  
*ANRI: BZO No. 124*  
Halaman: 141
105. Rumah Sakit di Semblimbingan, Kalimantan Tengah, 1920.  
*ANRI: KIT 348/24*  
Halaman: 142
106. Surat dari Residen Kalimantan Selatan dan Timur kepada Direktur *Verkeer en Waterstaat* tentang pembangunan gedung dan rumah tinggal pengawas (*controleur*) di Kuala Kapuas, 5 Maret 1938  
*ANRI: BOW No. BV 14*  
Halaman: 143

107. Transportasi sungai di Samuda, Sampit, Kalimantan Tengah, 15 Maret 1949  
*ANRI: Kempen 90315 LL 26*  
Halaman: 144
108. Pembukaan lahan untuk pemukiman di Kalimantan Tengah 22 Mei 1949  
*ANRI: Kempen 90522 LL 11*  
Halaman: 145
109. Sarana transportasi sungai yang membawa rombongan wartawan dalam rangka kunjungan Presiden Soekarno di Kalimantan Tengah, 16 Juli 1957  
*ANRI: Kempen: 570716 LL 2 -1*  
Halaman: 146
110. Peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Penerangan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 17 Agustus 1958  
*ANRI: Kempen 2 / 5*  
Halaman: 147
111. Peletakan batu pertama pembangunan Kantor Kehewan dan Perikanan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 17 Agustus 1958  
*ANRI: Kempen 5 / 9*  
Halaman: 148
112. Percobaan hubungan udara dari Banjarmasin ke Palangka Raya dengan menggunakan Pesawat Twin Otter dari Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), 9 Juni 1959  
*ANRI: Kempen 590609 LL 47*  
Halaman: 149
113. Gedung Kantor Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, 1964  
*ANRI: Kempen: 64 - 4714*  
Halaman: 150

114. Gedung Jawatan Penerangan Propinsi Kalimantan Tengah.  
21 Mei 1964.  
*ANRI: Kempen: 64 – 4768*  
Halaman: 151
115. Pembangunan jalan raya di Kalimantan Tengah,  
September 1965  
*ANRI: Kempen 65 – 12675*  
Halaman: 152
116. Studio Radio Republik Indonesia di Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah, September 1965  
*ANRI: Kempen 65 – 12706*  
Halaman: 153
117. Penyiar Radio Republik Indonesia di Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah, September 1965  
*ANRI: Kempen 65 – 12708*  
Halaman: 154
118. Survei dan pemetaan yang dilakukan dalam rangka  
pembukaan lahan pemukiman di Palangka Raya, 1965  
*ANRI: Kempen 65 – 12726*  
Halaman: 155
119. Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Kalimantan Tengah No. DA.1034/D.III.6/IX/1974 tentang  
penunjukkan sebidang tanah yang terletak di wilayah  
Kampung Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaka Mulya,  
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, untuk  
dijadikan pemukiman transmigrasi. 1 Oktober 1974  
*ANRI: Kementerian Pertanian No. 142*  
Halaman: 156

120. Surat dari Pimpinan Proyek Pembangunan Persawahan Pasang Surut (P4S) dan Pemukiman Baru Mandumai Kalimantan Tengah kepada Wakil Presiden RI tentang Permohonan tanggapan atas proyek pembangunan persawahan Pasang Surut (P4S) dan Pemukiman Baru Mandumai Kalimantan Tengah, 20 Juni 1986  
*ANRI: Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah 374*  
Halaman: 157

## H. KEAGAMAAN

121. Gereja di tepi sungai Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. 1920  
*ANRI: KIT 302/30*  
Halaman: 159
122. Gereja di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT: 302/32*  
Halaman: 160
123. Rumah seorang Pastur Khatolik di Kuala Kapuas, 1920.  
*ANRI: KIT: 302 / 34*  
Halaman: 161
124. Penduduk yang menganut agama Kristen di Pangkoh, Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 302/42*  
Halaman: 162
125. Seorang pastur dan keluarga berfoto di halaman rumahnya di Kuala Kapuas, 1920  
*ANRI: KIT 302 / 58*  
Halaman: 163
126. Masjid dengan kubah kerucut di Mantargai, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. 1920  
*ANRI: KIT 803/03*  
Halaman: 164

127. Masjid di daerah Tanjung, Kalimantan Tengah, 1920  
*ANRI: KIT 807/37*  
Halaman: 165
128. Kunjungan Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani dalam pembukaan Kursus dan Latihan bagi alim ulama se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya, 15 Maret 1963.  
*ANRI: Kempen 63 – 2707*  
Halaman: 166
129. Para jemaat menuju Gereja di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 24 September 1965.  
*ANRI: Kempen 65-12741*  
Halaman: 167
130. Surat dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Propinsi Kalimantan Tengah kepada Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama tentang permohonan petunjuk tertulis sebagai pegangan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pembinaan umat di Propinsi Daerah Tk I Kalimantan Tengah, 1 Mei 1991  
*ANRI: Departemen Agama II No. 148*  
Halaman: 168

# Penutup

## PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Kalimantan Tengah Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyebarkannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.